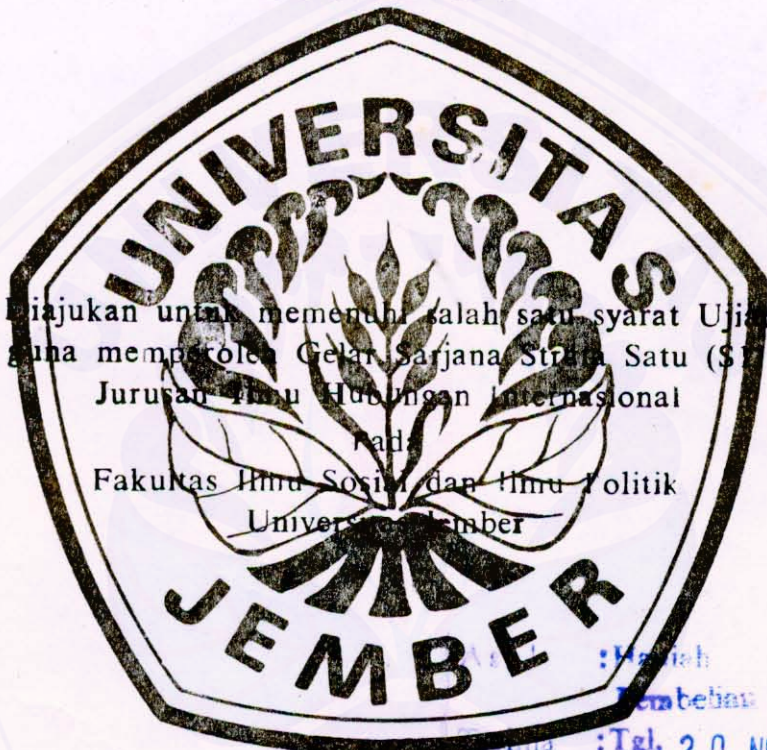




**PENGARUH KETERLIBATAN PAKISTAN
DALAM KONFLIK KASHMIR
TERHADAP HUBUNGAN PAKISTAN DAN INDIA**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh : No. Induk :

Elli Suopita

NIM. 980910101057

Pembimbing

Drs. DJOKO SUSILO, MSi
NIP. 131 832 318

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

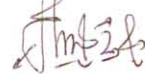
2002

Klass
327.59.91
Scs.
P
:Tgl. 20 NOV 2002
No. Induk :
c.1

Halaman Pernyataan

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan yang dipergunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui

Penulis



ELLI SUSPITA

980910101057



HALAMAN MOTTO

Tuhan anugerahi sebuah cinta
Kepada manusia untuk dapat
Saling menyayangi.
Bila kebencian meracunimu
Takkan ada jalan keluar
Damai hanya jadi impian.
Kita takkan bisa berlari dari
Kenyataan bahwa kita manusia
Tempatnya salah dan lupa.*



* Diambil dari lagu DEWA, "Cintailah Cinta".

HALAMAN UNGKAPAN

Karya ini kupersembahkan kepada
KELVARGA PIET HEIN SANGGEL.
Aku bangga menjadi bagian dari keluarga ini.
Semua pengorbanan yang telah diberikan,
Takkan aku sia-siakan.
Moh. Fachrudin P. U. S. sos,
Thank you for being my brother.
My best friend, my spirit
And the part of my life.

PERSETUJUAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan diterima di hadapan tim penguji skripsi
Guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 21 Oktober 2002

Jam : 08.00 WIB

Tim Penguji

Ketua

(Drs. A. Habibullah, MSi)

NIP : 131 953 242

Sekretaris

(Drs. Djoko Susilo, MSi)

NIP : 131 832 318

Anggota

(Drs. H. Umaid Radi, MA)

NIP : 130 239 058

(Drs. Supriyadi, MSi)

NIP : 131 474 383

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dekan,

(Drs. H. Moch Toerki)

NIP : 130 524 832



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia, petunjuk dan ilhamnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Keterlibatan Pakistan Dalam Konflik Kashmir Terhadap Hubungan Pakistan dan India" ini.

Pada tahun 2002 ini hubungan Pakistan dengan India tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik. Berawal dari serangan bom di gedung parlemen pemerintah India, India menganggap bahwa Pakistan terlibat atas serangan tersebut. Oleh India, Pakistan dituduh kurang bekerja keras dalam memberantas terorisme yang dalam hal ini disebut terorisme lintas batas. Pakistan membantah telah terlibat dalam aksi bom di gedung parlemen tersebut. Namun kecurigaan India tetap mengarah pada Pakistan yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya. Pakistan dianggap telah melatih dan memberi bantuan terhadap para militan Kashmir untuk melawan pemerintah India. Akibatnya, tentara kedua negara disiagakan di perbatasan dan menambah ketegangan antara Pakistan dan India.

Masalah Kashmir selalu memicu bentrokan-bentrokan bersenjata di antara mereka. Pakistan meskipun telah membantah tidak terlibat dalam aksi bom tersebut, namun tetap memberi dukungan bagi militan Kashmir yang menurut Pakistan sebagai pejuang kemerdekaan wilayah mereka sendiri. Sikap Pakistan inilah yang membuat India semakin waspada. Terbukti dengan pengembangan militernya yang berupa senjata nuklir. Oleh Pakistan, tindakan India dalam mengembangkan senjata nuklir tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pakistan akhirnya juga meningkatkan pertahanannya. Kedua negara ini terus-menerus meningkatkan senjata militernya dan yang paling mengkuatirkan bagi dunia internasional adalah senjata nuklirnya. Dalam melihat fenomena tersebut, penulis ingin melihat sejauh mana

keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir ini mempengaruhi hubungan Pakistan dan India.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember.

Bersama selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat atas dorongan, bimbingan dan bantuan, baik moril maupun materiil kepada :

1. Drs. Djoko Susilo, MSi, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Drs. Bagus Sigit Soenarko, selaku Dosen Wali.
5. Staf pengajar dan karyawan Fakultas dan Universitas.
6. Pihak perpustakaan dimana penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.
7. Keluarga P. H. Sanggel, atas segala pengorbanan dan dukungan selama penulis dibesarkan.
8. Sobat - sobatku : Evin, Ratna, Luluk, Sigin, Dian dan Ifen. Terima kasih atas kesetiakawanan yang kalian berikan padaku.
9. Keluarga Besar Hubungan Internasional '98. Good Luck Guys !!!!
10. Keluarga Besar HMI Cab. Jember Kom. FISIPOL. Terima kasih atas pembelajaran dan kreativitas selama penulis berproses.
11. Keluarga Besar Belitung 15. Tetaplah dengan keceriaan dan semangat jiwa muda kalian.
12. Terutama untuk Yaya-ku, yakinlah cita - cita Ellfach kita akan tercapai.
13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi rekan - rekan mahasiswa maupun siapa saja yang membacanya.

Jember, Oktober 2002

Elli Suspita



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN UNGKAPAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.3 Permasalahan.....	7
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	8
1.5 Hipotesis.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.6.2 Metode Analisa Data.....	18
1.7 Pendekatan.....	20
BAB II. AKAR HISTORIS KONFLIK KASHMIR.....	23
2.1 Sejarah Pemisahan Pakistan dari India.....	23
2.2 Konflik Kashmir.....	28
2.2.1 Gambaran Umum Kashmir.....	28
2.2.2 Latar Belakang Timbulnya Konflik Kashmir Antara Pakistan dan India.....	30
2.2.3 Kepentingan Pakistan dan India di Kashmir.....	32
a. Kepentingan Pakistan.....	32
b. Kepentingan India.....	35

2.3	Perang Terbuka Antara Pakistan dan India.....	36
2.3.1	Perang Pakistan dan India Tahun 1947 – 1948.....	36
2.3.2	Perang Pakistan dan India Tahun 1965.....	40
2.3.3	Perang Pakistan dan India Tahun 1971.....	45
BAB III KETERLIBATAN PAKISTAN DALAM KONFLIK KASHMIR.....		49
3.1	Keterlibatan Pakistan Tahun 1947.....	49
3.2	Kerjasama Pakistan dengan Amerika Serikat.....	54
3.3	Strategi Militer Pakistan di Kashmir.....	57
3.4	Dukungan Pakistan Terhadap Militer di Kashmir.....	60
BAB IV PENGARUH KETERLIBATAN PAKISTAN DALAM KONFLIK KASHMIR TERHADAP HUBUNGAN PAKISTAN DAN INDIA.....		62
4.1	Rivalitas Pengembangan Militer Antara Pakistan dan India.....	62
4.1.1	Pengembangan Militer Pakistan.....	62
a.	Anggaran Militer Pakistan.....	63
b.	Teknologi dan Industri Militer Pakistan.....	64
c.	Impor Perlengkapan Militer Pakistan.....	66
4.1.2	Pengembangan Militer India.....	67
a.	Anggaran Militer India.....	69
b.	Teknologi dan Industri Militer India.....	70
c.	Impor Perlengkapan Militer India.....	73
4.1.3	Perimbangan Militer Pakistan dan India.....	74
4.2	Perlombaan Senjata Nuklir Antara Pakistan dan India.....	75
4.2.1	Uji Coba Nuklir Pakistan.....	76
4.2.2	Uji Coba Nuklir India.....	80
4.3	Bentrokan Bersenjata Antara Pakistan dan India.....	83
BAB V KESIMPULAN.....		94
DAFTAR PUSTAKA.....		xii
LAMPIRAN.....		xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perimbangan Militer Pakistan dan India Tahun 2002.....	74
Tabel 2. Perimbangan Nuklir Pakistan dan India Tahun 2002.....	76





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Hubungan Pakistan dengan India tidak pernah baik sejak pemisahan / *partition* yang kurang mulus antara Pakistan yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan India yang mayoritas beragama Hindu. Pokok permasalahan yang menjadi ganjalan antara Pakistan dengan India adalah status wilayah Kashmir.¹ Persoalan Kashmir sebenarnya timbul sebelum Pakistan dan India resmi pecah. Pakistan dan India sudah mengincar Kashmir sebelum perjanjian kemerdekaan ditanda tangani, yang antara lain menegaskan kerajaan atau kesultanan kecil harus menjatuhkan pilihannya sendiri untuk bergabung dengan Pakistan atau India. Pada saat itu raja yang menguasai Kashmir yaitu Maharaja Hari Singh yang merupakan keturunan Hindu memilih bergabung dengan India dengan alasan Pakistan telah menyerang dan mengintervensi Kashmir untuk masuk wilayahnya.

Sebenarnya ketika Maharaja Jammu Kashmir setuju bergabung dengan India pada tahun 1947, Gubernur Jenderal Mountbatten menyarankan agar kesepakatan itu ditegaskan melalui referendum, plebisit dan pemilu.² Hal ini disarankan agar Pakistan dan India yang sama-sama mengklaim Kashmir, puas dengan pilihan rakyat di wilayah itu. Namun persoalan itu tidak berhenti begitu saja. Sejak kemerdekaan Pakistan dan India, Kashmir telah membawa Pakistan dan India dalam tiga kali perang terbuka yaitu tahun 1948, tahun 1965 dan tahun 1971.

Perang antara Pakistan dan India pertama pada tahun 1948 berakhir dengan campur tangan PBB. Campur tangan PBB tersebut menghasilkan

¹ Laporan KBRI di India Tahun 1996/1997, Hal 4.

² Jawa Pos, 26 Mei 2002.

perjanjian perdamaian antara Pakistan dan India tertanggal 5 Januari 1949, yang berisi pembagian wilayah Kashmir menjadi dua, sepertiga bagian wilayah dikuasai oleh Pakistan, yang kini disebut Azad Kashmir atau Kashmir Merdeka, sedangkan dua per tiga bagian dikuasai oleh India meliputi Ladakh, Jammu dan Lembah Kashmir yang dikenal dengan Jammu Kashmir.³

Dalam tiga resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dan komisi PBB untuk Pakistan dan India, yang disepakati oleh kedua negara bersengketa, disebutkan bahwa plebisit akan dilakukan untuk menentukan nasib wilayah itu.⁴ Namun sebagai prasyarat plebisit, warga beberapa suku di Pakistan yang ikut bertempur di Kashmir harus segera ditarik mundur.

Sekitar tahun 1950-an pemerintah India justru mengingkari komitmennya mengadakan plebisit. Sebab pasukan Pakistan tidak ditarik mundur dari Kashmir. Selain itu pemilu yang menguatkan status wilayah ini sebagai milik India telah diadakan. Tapi setelah terjadi pemberontakan di Lembah Kashmir pada akhir 1980-an kaum militan dan aktivis politik mengaku belum memperoleh hak ikut menentukan nasib wilayah itu.

Wilayah Jammu Kashmir inilah yang hingga saat ini memicu perselisihan antara Pakistan dan India. Apabila dipandang dari segi agama dan budaya, yaitu mayoritas beragama Islam, mereka tidak mau bergabung dengan India. Sedangkan bagi India, Jammu Kashmir adalah wilayah yang sangat strategis serta memiliki tanah yang subur dan memiliki sumber-sumber mata air, sungai-sungai yang dapat mendukung kehidupan India. Demikian pula bagi Pakistan yang memandang Jammu Kashmir sebagai wilayah yang sangat strategis, juga karena didorong oleh misi agama, yaitu sama-sama Islam maka Pakistan ingin memasukkan Jammu Kashmir dalam wilayahnya.

³ Tempo, 12 April 1990.

⁴ Jawa Pos, 26 Mei 2002.

Di awal tahun 1990-an, wilayah Jammu Kashmir kembali bergejolak. Gejalanya sudah muncul sejak tahun 1987 sewaktu diselenggarakan pemilu di negara bagian Jammu Kashmir. Pemerintah pusat India dinilai melakukan kecurangan dalam pemilu tersebut, yaitu sengaja memberi keuntungan kepada partai Hindu, sehingga hal tersebut memicu semangat anti India. India menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok militan Muslim terutama *Jammu Kashmir Liberation Front* (JKLF) dengan kekerasan pula. JKLF adalah kelompok militan Kashmir yang paling gigih memperjuangkan kemerdekaan Jammu Kashmir.⁵

India memandang Pakistan terlibat dalam gerakan tersebut. India menuduh Pakistan melatih para Kashmir militan dan mempersenjatainya, tetapi Pakistan menolak tuduhan itu dan menganggap India sengaja membuat masalah dengan Pakistan.⁶ Sikap saling curiga ini terus berlangsung, dimana keduanya melakukan uji coba nuklir yang menjurus pada perlombaan senjata nuklir. Hal ini justru menambah ketegangan antara kedua negara tersebut, karena kecurigaan itu mendorong mereka untuk membuat alat yang dapat digunakan untuk menggertak lawannya misalnya kekuatan nuklir.

Tepatnya pada tanggal 11 Mei 1998, pemerintah India mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa India telah berhasil melakukan uji coba nuklir dibawah tanah di daerah Pokhran.⁷ Pemimpin-pemimpin India berpendapat bahwa senjata-senjata nuklir bukanlah senjata perang melainkan untuk pemusnahan massal dan bahkan India berdalih bahwa dunia yang bebas dari senjata-senjata nuklir tidak saja akan meningkatkan keamanan India tetapi juga keamanan semua bangsa. Pandangan inilah yang menjadi dasar utama politik luar negerinya. Tanpa pelucutan senjata yang universal dan non-

⁵ Editor, No. 22/Th III. 3Pebruari1990.

⁶ Tempo, 22 Pebruari 1992.

⁷ India Perspektif, Januari 2000.

diskriminatif, India tidak dapat menerima suatu aturan yang memisahkan secara abritrator antara negara-negara yang punya nuklir (*nuclear haves*) dan negara-negara yang tidak punya nuklir (*nuclear have nots*). India memegang teguh prinsip bahwa adalah hak dan kedaulatan setiap bangsa untuk mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan nasional bangsa tersebut dan bahwa suatu bangsa mempunyai hak dan kedaulatan yang sama yang menyangkut kepentingan keamanannya. Hal ini justru menambah sensitivitas hubungan Pakistan dan India karena Pakistan merasa perlu memiliki senjata nuklir juga untuk menjaga keamanan negaranya. Terbukti pada tanggal 28 dan 30 Mei pada tahun yang sama, Pakistan juga melakukan uji coba nuklir di Bukit Chagai , Baluchistan. Pada tahun 1998 tersebut, kedua negara sama-sama menyatakan sebagai negara nuklir.

Saat ini perimbangan militer kedua negara menurut pakar militer Inggris, militer India menang dalam hal kuantitas. Tapi militer Pakistan dinilai justru unggul dalam kualitas. Dengan tentara aktif India yang berjumlah 1,263 juta memang lebih besar dibandingkan tentara Pakistan yang hanya berjumlah 620.000 saja. Senjata nuklir yang dimiliki Pakistan sekitar 12, sedangkan India berjumlah 60-90.⁸ Jumlah senjata lainnya juga lebih banyak India dibandingkan Pakistan. Namun Pakistan tidak takut berperang dalam menghadapi India. Terbukti dengan pernyataan presiden Pakistan Pervez Musharraf yang mengatakan bahwa seluruh bangsa Pakistan bersama angkatan bersenjata telah siap menumpahkan darah.

Dengan adanya keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir, maka India terus-menerus meningkatkan pertahanan keamanannya di bidang militer yang akhirnya mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut. Hubungan Pakistan dan India menjadi semakin buruk dan sulit untuk

⁸ Jawa Pos, 26 Mei 2002.

didamaikan. Pakistan yang menginginkan Jammu Kashmir, memberi dukungan terhadap pemberontakan yang dilakukan kaum militan Kashmir dan menganggap mereka sebagai pejuang kemerdekaan wilayah mereka. Akhirnya pengaruh keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir ini terhadap hubungan Pakistan dengan India semakin buruk. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena konflik itu belum menunjukkan titik terang ke arah penyelesaian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu tulisan yang berjudul :

***“PENGARUH KETERLIBATAN PAKISTAN
DALAM KONFLIK KASHMIR
TERHADAP HUBUNGAN PAKISTAN DAN INDIA”***

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Suatu tulisan ilmiah harus memiliki batasan jangkauan dan kajian. Tujuannya adalah agar analisa dapat terarah sehingga permasalahan lebih mudah dipahami. Pembatasan berguna agar tulisan tetap berada pada koridor yang telah digariskan. Dengan demikian pembahasan yang dilakukan akan tetap mengacu pada judul yang telah ditetapkan. Pembatasan juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya pembiasan. Sehingga analisa yang tajam akan diperoleh yang pada gilirannya dapat meningkatkan bobot ilmiah sebuah penulisan. Menurut Sutrisno Hadi :

“Bahwa sekali pokok persoalan telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyelidik sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada siapa laporan riset hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi untuk

mencegah timbulnya kericuhan pendapat dan kekaburan persoalan organisasi.”⁹

Sebelum India pecah menjadi Pakistan dan India, konflik sudah ada antara kaum Hindu dengan kaum Muslim. Perseteruan ini semakin tajam setelah pemisahan Pakistan dari India memunculkan konflik baru yaitu konflik perbatasan di wilayah Jammu Kashmir. Pakistan merasa Jammu Kashmir lebih cocok masuk Pakistan karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun India menganggap persetujuan raja Kashmir untuk masuk wilayah India adalah sah dan tidak dapat diubah.

Berdasarkan gambaran tersebut batasan yang penulis gunakan terbagi menjadi dua yaitu pembatasan materi dan pembatasan waktu.

a) Pembatasan Materi

Penulis memfokuskan pada keterlibatan militer Pakistan dalam konflik Kashmir sebagai variabel independen terhadap hubungan Pakistan dan India sebagai variabel dependen. Penulis menggambarkan bahwa keterlibatan militer Pakistan dalam konflik Kashmir ini mempengaruhi baik atau buruknya hubungan kedua negara tersebut. Keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir digunakan sebagai unit analisa dimana konflik Kashmir itu sendiri adalah konflik perbatasan antara Pakistan dengan India yang didalamnya ada keinginan rakyat Kashmir untuk lepas dari India dan Pakistan sendiri sejak awal menginginkan Kashmir masuk ke dalam negara Pakistan. Sehingga Pakistan membela perjuangan rakyat Kashmir untuk merdeka dan apabila Kashmir setuju maka Kashmir dapat menjadi bagian Pakistan. Penulis akan menjelaskan keterlibatan militer Pakistan dalam konflik Kashmir dan juga menjabarkan pengaruhnya terhadap hubungan kedua negara di bidang pertahanan keamanan,

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Field Study Thesis and Disertasi*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, Hal. 8.

karena dalam konflik ini Pakistan maupun India sama-sama meningkatkan pertahanan keamanan militernya. Terbukti dengan adanya uji coba nuklir yang dilakukan baik Pakistan maupun India.

b) Pembatasan Waktu

Batasan waktu yang penulis ambil yakni antara tahun 1998 sampai sekarang. Hal ini dengan alasan, pada tahun 1998 telah terjadi perlombaan senjata nuklir antara Pakistan dan India yang justru menambah ketegangan kedua negara tersebut. Permasalahan ini berlangsung terus-menerus dan tidak ada penyelesaiannya hingga pada tahun 2002 hampir terjadi perang terbuka kembali.

Pembatasan materi dan waktu ditetapkan agar dapat mempertajam analisa dan memperjelas uraian.

1.3 Permasalahan

Problematika yang muncul merupakan dimulainya proses pembahasan guna mencari kesimpulan dari suatu persoalan. Dengan demikian persoalan itulah yang menjadi akar penelitian untuk memecahkan suatu kasus. Winarno Surachmad mengatakan bahwa :

“Problematika adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui atau dengan jalan mengatasinya. Karena apabila kita berjalan terus, masalah akan menampakkan diri sebagai suatu tantangan.”¹⁰

Dengan demikian permasalahan adalah kesulitan yang dimaknai sebagai arah suatu pembahasan kritis. Permasalahan menggugah kesadaran penulis untuk mencari jawabnya. Jawaban yang tepat dan akurat akan diperoleh apabila didukung data-data objektif yang memadai.

¹⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, 1975, Hal. 23.

Berdasarkan kenyataan bahwa hubungan antara Pakistan dan India sampai saat ini kurang baik bahkan terus memanas dengan adanya uji coba nuklir yang telah dilakukan baik oleh Pakistan maupun India, maka dunia internasional memandang bahwa krisis Jammu Kashmir antara Pakistan dan India itu tidak akan pernah berakhir. Perbedaan-perbedaan yang besar antara Pakistan dan India menyebabkan keduanya sulit untuk mencapai kata sepakat yang kemudian ditaati oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa Jammu Kashmir. Dari kondisi tersebut, maka penulis mengajukan suatu permasalahan, yaitu :

Sejauh mana pengaruh keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir terhadap hubungan Pakistan dan India.

1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori sangat diperlukan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan tepat. Kerangka dasar teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang merupakan alat eksplanasi terhadap permasalahan yang terjadi. Secara spesifik Mc Cain dan Segal mendefinisikan teori sebagai berikut :

Suatu serangkaian statement yang saling berkaitan yang terdiri dari :

- 1. kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsepsi dasar teori itu.**
- 2. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain.**
- 3. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa).¹¹**

¹¹ Mc. Cain dan Segal Dalam Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hal. 219.

Dalam menjawab permasalahan mengenai sejauh mana pengaruh keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir terhadap hubungan Pakistan dan India maka penulis menggunakan dasar teori yaitu **Conflict Theory (Teori Konflik)**. Konsep Konflik itu sendiri menurut Kamus Analisa Politik diartikan sebagai suatu jenis interaksi yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan.¹² Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan / atau mempertahankan nilai-nilai juga disebut konflik.¹³

Ramlan Surbakti dalam bukunya menyatakan bahwa pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal.¹⁴ Kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk yang secara kultural seperti suku bangsa, agama dan ras serta majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kondisi di India memang sangat majemuk secara kultural. Secara kultur, masyarakat beragama Hindu mendominasi kehidupan India. Oleh karena itu, maka kelompok minoritas yang beragama Islam berusaha mempertahankan identitas serta karakteristiknya dari apa yang dilakukan oleh kaum mayoritas. Hal ini kemudian memicu timbulnya konflik di negara tersebut.

¹² Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helenan S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, Hal. 40.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, Hal. 8.

¹⁴ Ibid. Hal. 151.

Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, serta kekuasaan. Hal ini bisa menimbulkan konflik karena masyarakat yang memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan serta kekuasaan, kepentingannya akan cenderung dikalahkan oleh kelompok yang mendominasi ketiga hal tersebut. Dalam kasus India, maka kepentingan kelompok Muslim yang tidak memiliki kekuasaan di bidang pemerintahan, kepentingannya kalah dengan kelompok beragama Hindu yang mendominasi pemerintahan India. Kemajemukan horisontal maupun vertikal ini pada puncaknya menjadikan India pecah menjadi Pakistan dan India dimana dulunya Pakistan sebagai kaum minoritas Muslim dan India sebagai kaum mayoritas Hindu.

Dalam garis besarnya yang menjadi sasaran konflik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu konflik dengan *balancing objective* (sasaran keseimbangan) dan konflik dengan sasaran hegemoni. Konflik dengan sasaran keseimbangan bertujuan untuk mencapai suatu keadaan seimbang mengenai suatu masalah yang dipertentangkan. Contoh konflik dengan sasaran keseimbangan adalah ekspansionisme / perluasan wilayah dan revisionisme / kehendak untuk melakukan perubahan.¹⁵ Ekspansi terjadi karena didorong oleh keinginan untuk memiliki sumber-sumber bahan, pasar bagi barang-barang produksinya, tenaga buruh yang murah, pangkalan militer dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kasus Kashmir ini dapat dianalisis. Baik Pakistan maupun India memandang Kashmir sebagai suatu wilayah yang strategis, indah dan subur. Di Kashmir dapat dibangun suatu pangkalan militer, serta industri pariwisata karena daerahnya yang indah.

Sementara itu konflik dengan tujuan hegemoni adalah bertujuan untuk mendominasi. Hal ini memerlukan suatu strategi jangka panjang dan

¹⁵ Dahlan Nasution, *Politik Internasional : Konsep dan Teori*, Erlangga, Jakarta, 1989, Hal. 54.

perhitungan waktu. Setelah Perang Dingin usai maka pola hubungan internasional bergeser dari bipolar menjadi multipolar. Kondisi ini ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru dalam percaturan politik internasional yang tidak bisa dianggap remeh. Menanggapi hal tersebut, maka India berusaha menjadi kekuatan yang akan diperhitungkan dalam percaturan politik internasional, walaupun saat ini dominasi India masih pada wilayah Asia Selatan, Pakistan tidak dapat membiarkannya begitu saja.

Konflik yang sudah mencapai puncaknya dan mencapai taraf yang sangat menguatirkan sehingga membuat penyesuaian diri sudah tidak dapat dimungkinkan lagi, membuka kemungkinan bahwa pemusnahan lawan merupakan alternatif pilihan. Konflik yang mengarah kepada pemakaian kekerasan timbul oleh perpaduan dari berbagai sebab seperti tuntutan atas suatu masalah, sikap bermusuhan dan berbagai jenis tindakan militer serta diplomatik tertentu. Perilaku yang tercermin oleh tuntutan, sikap dan tindakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan wilayah, untuk memperoleh akses ke daerah pemasaran, prestise, penggulingan pemerintahan negara dan sebagainya.

Dalam pencapaian tujuan, tuntutan yang diajukan oleh negara A yang bertentangan dengan kepentingan negara B akan mengakibatkan timbulnya perilaku konflik berupa sikap dan tindakan bermusuhan. Adakalanya konflik timbul karena salah satu pemerintah negara ingin menyelesaikan masalah menurut caranya sendiri yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh negara lain. Konflik mencakup bermacam-macam tindakan seperti tindakan diplomatik, propaganda ancaman dan sanksi militer, tindakan – tindakan tersebut dilakukan oleh salah satu negara terhadap negara lainnya.

Dalam kaitannya dengan konflik Kashmir, Pakistan menginginkan adanya plebisit di wilayah Kashmir untuk menentukan nasib rakyat Kashmir sendiri dan Pakistan juga ingin adanya pihak ketiga untuk menjembatani

pembicaraan kedua negara ini, Pakistan dan India. Namun keinginan Pakistan ini jelas merugikan kepentingan India. Bagi India dengan diadakannya plebisit akan mengakibatkan lepasnya Kashmir dari India. Sehingga India menolak usulan Pakistan dengan alasan bahwa perjanjian yang telah ditanda-tangani oleh Maharaja Hari Singh sudah merupakan bukti sah bahwa Kashmir masuk wilayah India. Selain itu India juga menganggap bahwa persoalan Kashmir adalah persoalan internal, sehingga tidak diperlukan pihak ketiga dalam perundingan mereka dan persoalan Kashmir tersebut cukup diselesaikan secara bilateral.

Penetapan garis perbatasan negara mengabaikan garis pembagian alam antar bangsa yang berbeda. Garis politik seringkali tidak sesuai dengan garis etnografis.¹⁶ Suatu bangsa tertentu terpisah dalam dua negara yang berbeda, akhirnya bangsa yang terpisah itu berjuang agar bangsanya dapat bersatu kembali. Perjuangan itu mau tidak mau akan membawa negara-negara, dimana bangsa itu ada, dalam suatu konflik. Negara akan saling menuntut untuk bisa menyatukan bangsa tersebut. Tuntutan ini biasanya akan ditolak. Dasar penolakannya adalah pertalian sejarah serta perjanjian yang dianggap sah. Dalam kasus Kashmir ini, dasar yang digunakan India sebagai pegangan untuk mempertahankan wilayah Jammu Kashmir adalah perjanjian Simla yang dibuat oleh Indira Gandhi (India) dan Zulfikar Ali Bhutto (Pakistan) pada tahun 1972. Isi dari perjanjian Simla tersebut adalah konflik yang terjadi di antara mereka akan diselesaikan secara damai oleh kedua negara tersebut, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, mempertahankan status quo Kashmir, artinya India menguasai dua per tiga wilayah Kashmir dan sisanya dikuasai Pakistan.

¹⁶ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatahan Dunia Jilid 2*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993, Hal. 182.

Morgenthau dalam bukunya *Politik Antar Bangsa* menyatakan bahwa konflik internasional mengikuti dua pola, yaitu pola perlawanan langsung dan pola persaingan atau rivalitas. Pola perlawanan langsung adalah pola konflik internasional dimana konflik tersebut terdapat dua pihak yang terlibat dan berhadapan secara langsung. Sedangkan dalam pola persaingan terdapat tiga pihak atau lebih, misalnya bangsa A berusaha untuk menguasai bangsa C, bangsa B juga berusaha untuk menguasai atau mempertahankan status quonya terhadap bangsa C, akhirnya timbul konflik antara bangsa A dan bangsa B. Apabila kondisi Pakistan dan India diterapkan dalam teori tersebut, maka Kashmir adalah sebagai bangsa C yang diperebutkan oleh Pakistan dan India yang berkedudukan sebagai bangsa A dan bangsa B.

Apabila kita hendak memahami fenomena sosial, maka perlu kiranya untuk penyederhanaan fenomena tersebut dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti. Penyederhanaan fenomena itu berkaitan dengan konseptualisasi, karena ilmuwan menyederhanakan fenomena dengan menggunakan konsep. Konsep-konsep ini digunakan untuk mengorganisasikan persepsi yang muncul dan untuk membangun model yang dipakai menjelaskan berbagai peristiwa dalam masyarakat termasuk hubungan internasional.¹⁷

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat objek atau fenomena tertentu. Tiap disiplin keilmuan, ilmuwan akan mengembangkan serangkaian konsep-konsep yang relevan dengan bidang ilmu tersebut. Hal ini akan memudahkan mereka yang mengkaji disiplin ilmu tersebut untuk mengkomunikasikan hasil pemikirannya kepada orang lain yang juga tertarik dengan ilmu yang sama. Konsep juga bisa berfungsi memperkenalkan suatu cara mengamati fenomena empiris. Hal ini memungkinkan seorang ilmuwan

¹⁷ Mochtar Mas'ood. *Op. Cit.* Hal. 93

memberi definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep itu dan menggunakan konsep itu sesuai dengan makna yang didefinisikan.¹⁸

Dalam kasus ini, penulis menggunakan konsep **persepsi**. Menurut Kamus Analisa Politik, persepsi adalah penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan yang diterima oleh inderawi.¹⁹ Dengan demikian India dalam politik luar negerinya merupakan hasil dari persepsi nasionalnya yang diterima dari tingkah laku Pakistan. Kebijakan India untuk mengembangkan program-program nuklir yang secara khusus ditujukan untuk menguasai dan mengembangkan persenjataan nuklir, hal itu juga didasarkan pada alasan persepsi ancaman keamanan nasionalnya yang datang dari negara tetangga dekat, Pakistan. Pakistan bagi sebagian besar kalangan elite politik dan militer India dianggap sebagai musuh yang sewaktu-waktu dapat membahayakan bagi keamanan dan integritas nasionalnya.

Dalam mengamati fenomena yang terjadi di Pakistan dan India, penulis mencoba menggunakan konsep **security dilemma** untuk menjelaskan terjadinya perlombaan senjata nuklir antara Pakistan dan India dalam keterkaitannya dengan keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir. Sebelum melangkah lebih jauh kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep **security dilemma**. Menurut Charles Glaser, **security dilemma** adalah :

A situation in which the military forces required by state to protect itself threaten the forces other states need to protect themselves, in that situation state seeking security cannot avoid threatening each others military capabilities.²⁰

¹⁸ Ibid. Hal. 95.

¹⁹ Jack C. Plano. Op. Cit. Hal. 148.

²⁰ MG. Jane Davis (ed), Security Issue in the Post Cold War World, Departement of International Politic, University of Aberystwyth, UK, 1996, hal. 183 dalam Charles Glaser, *Political Consequences of Military Strategy*, World Politics, 44 (4) July 1992, hal 506.

Berangkat dari pendapat yang dikemukakan oleh Charles Glaser, dapat dilihat bahwa upaya suatu negara untuk memperkuat keamanannya secara tidak langsung dapat dipersepsikan sebagai ancaman yang dapat membahayakan keamanan negara lain di sekitarnya. Padahal benar tidaknya ancaman itu masih merupakan tanda-tanda yang tidak mudah dicari jawabannya. Apa yang dilakukan oleh negara pertama tadi juga dapat dilihat sebagai tindakan yang dapat menurunkan tingkat keamanan negara lain seperti yang diungkapkan oleh Barry Buzan :

In seeking power and security for themselves, states can easily threaten the power and security aspirations of other states.²¹

Jadi aksi suatu negara untuk meningkatkan kekuatan militernya dapat diasumsikan sebagai ancaman oleh negara-negara lain di sekitarnya. Dalam *security dilemma*, aksi suatu negara tertentu untuk meningkatkan kemampuan militernya akan memunculkan reaksi dari negara lain yang merasa terancam dengan berupaya untuk mengimbangi peningkatan militer yang dilakukan oleh negara pertama tadi. Apabila negara kedua menanggapi tindakan negara pertama dengan melakukan hal yang sama, maka akan muncul suatu kondisi yang mendorong terjadinya perlombaan senjata. Tindakan untuk saling mengungguli akhirnya justru membuat mereka semakin tidak aman.

Keadaan yang lebih buruk akan muncul karena masing-masing negara berusaha untuk mengejar tingkat keamanan yang mereka anggap lebih menjamin tanpa mereka sadari bahwa hal ini merupakan suatu kebijakan yang kurang tepat. Kebijakan yang mereka ambil banyak didasarkan pada persepsi yang kadang berlebihan akibat adanya kecurigaan terhadap pihak lain. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kondisi *security dilemma* dapat

²¹ Barry Buzan, *People, States and Fear : An Agenda for international Security Studies in the Post-Cold War Era*, Second Edition, First Edition Published in 1993, London and Boulder, Colorado : Harvester Wheat Sheat and Lynne Rienner Publisher, ibid, hal 183.

muncul melalui proses aksi reaksi dimana aksi suatu negara akan menimbulkan reaksi dari negara lain. Proses aksi reaksi ini akan menjadi rumit bila diikuti oleh kecurigaan berlebihan diantara negara-negara yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam kaitannya dengan permasalahan di Pakistan dan India, India menaruh kecurigaan yang berlebihan pada Pakistan karena Pakistan dianggap terlibat dalam konflik Kashmir. India dengan persepsi nasionalnya berusaha untuk mengembangkan persenjataan nuklir untuk waspada terhadap Pakistan. Namun tindakan India ini justru membuat Pakistan merasa terancam keamanan nasionalnya. Akhirnya Pakistan berupaya mengimbangi kekuatan militer India tadi dengan mengembangkan senjata nuklir pula. Kondisi ini terus menerus terjadi dan mengakibatkan perlombaan senjata yang menguatirkan dunia internasional.

Pengalaman perang dalam perebutan wilayah Kashmir, yang tidak ada tanda-tanda berakhir atau membaik memaksa pemerintah India untuk menemukan jalan penyelesaian yang dianggap efektif bagi kemenangan diplomasinya dengan Pakistan. Hal itulah yang mendorong India untuk memiliki dan mengembangkan persenjataan nuklir. Justru dengan pengembangan persenjataan nuklir ini membuat konflik Kashmir antara Pakistan dan India tidak terselesaikan. Kedua negara tersebut saling bersaing di bidang militer dan akhirnya berdampak pada hubungan yang tidak harmonis.

1.5 Hipotesis

Menurut Winarno Surachmad, hipotesis adalah suatu perumusan jawaban sementara terhadap suatu persoalan. Menurutnya hipotesis yang baik adalah hipotesis yang secara logis berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang diteliti, hipotesis hendaklah jelas, sederhana dan terbatas. Kesederhanaan ini dimaksudkan untuk mengurangi salah paham yang timbul

dari perbedaan pengertian. Terbatas dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai luas dan dalamnya masalah yang diselidiki, selain itu hipotesis yang baik hendaknya dapat diuji.²²

Berdasarkan pada teori konflik yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran serta hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis mengajukan suatu hipotesis :

Pengaruh keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir terhadap hubungan antara Pakistan dan India menyebabkan terjadinya perlombaan senjata nuklir yang justru membuat hubungan kedua negara tidak harmonis.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian harus dipakai dalam penulisan karya ilmiah guna memperoleh tulisan yang bermutu sesuai dengan kaidah keilmuan. Seorang peneliti menemukan suatu fenomena yang dianggapnya sebagai suatu permasalahan yang harus dipecahkan dalam penelitiannya. Untuk melakukan hal tersebut, seorang peneliti memerlukan metode. Dukungan data yang lengkap dan akurat akan mendukung proses analisa sehingga karya ilmiah yang baik dapat dihasilkan.

Menurut The Liang Gie, definisi metode adalah :

“Cara atau langkah yang berulang-ulang, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya, ini merupakan langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai masalah tersebut.”²³

²² Winarno Surachmad, Op. Cit. Hal. 39.

²³ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Fisip UGM, Yogyakarta, 1974, Hal. 130.

Dalam proses penelitian penulis berangkat dari hipotesa. Kelanjutannya, hipotesa digunakan sebagai acuan pengumpulan data maupun analisa data untuk menguji kebenaran hipotesa. Dalam proses penelitian ini, penulis membagi metode penelitian menjadi beberapa bagian yang mencakup :

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Tehnik yang penulis pilih dalam proses pengumpulan data adalah metode observasi melalui riset kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini langkah yang diambil adalah melengkapi literatur yang relevan dengan tujuan penulisan karena pada dasarnya dibutuhkan data yang lengkap dalam penulisan studi kasus.²⁴ Dalam melakukan studi literatur penulis mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, majalah dan lain-lain.

Guna menunjang perolehan data yang valid dan mencukupi, penulis mendatangi dan menghubungi beberapa pusat informasi antara lain :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
3. Pusat Informasi Kompas.
4. Perpustakaan dimana data-data dapat penulis temukan.
5. Situs-situs internet.

1.6.2 Metode Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data usai, selanjutnya adalah proses analisa data. Proses analisa data yang terarah akan menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah. Definisi tentang analisa data, salah satunya dikemukakan oleh The Liang Gie yaitu sebagai berikut :

²⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus : Desain dan Metode*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal. 30.

“Sege nap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri dari masing-masing bagian, hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu.”²⁵

Mengingat sifat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung, metode analisa data yang dipergunakan adalah secara kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh hasil analisa data yang baik, maka penulis akan menggunakan metode berpikir deduktif. Definisi mengenai berpikir deduktif menurut Sutrisno Hadi yaitu :

“Apa yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.”²⁶

Hal ini berarti bahwa cara berpikir deduktif berangkat dari peristiwa dalam skala luas atau umum yang dikenakan pada peristiwa yang sifatnya khusus. Cara berpikir deduktif penulis pilih sebagai landasan hipotesa. Keterkaitan antara cara berpikir deduktif dengan studi kasus pengaruh keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir terhadap hubungan Pakistan dan India adalah Kashmir , suatu wilayah strategis serta memiliki sungai-sungai yang sangat mendukung kehidupan Pakistan dan India, merupakan kondisi yang telah membawa Pakistan dan India dalam suatu persaingan yang bersifat umum.

Kemudian kerangka global tadi diterapkan secara spesifik pada persepsi India terhadap keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir yang mengakibatkan India meningkatkan senjata militernya. Hal ini menyebabkan pihak Pakistan tidak mau diungguli oleh pihak India, sehingga persaingan itu

²⁵ The Liang Gie, Op. Cit. Hal. 89.

²⁶ Sutrisno Hadi, Op. Cit. Hal. 36.

telah membawa mereka dalam suatu perlombaan senjata nuklir. Pada akhirnya mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut.

1.7 Pendekatan

Pendekatan diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Pendekatan berkaitan dengan penggambaran kita mengenai suatu peristiwa, yaitu dari sisi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut.

The Liang Gie mengatakan bahwa pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.²⁷

Dalam menjawab permasalahan mengenai sejauh mana pengaruh keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir terhadap hubungan Pakistan dan India, maka penulis menggunakan pendekatan berupa ***Political History***. *Political History* merupakan suatu pendekatan yang melihat ataupun memahami gejala-gejala politik yang muncul dengan berdasar pada proses sejarahnya.

Pemahaman terhadap suatu kejadian atau fenomena akan lebih mudah, apabila kita mengetahui latar belakang ataupun kejadian-kejadian yang mendahului timbulnya fenomena tersebut. Eisemann memberikan perumusan mengenai *Political History*, bahwa *Political History* adalah suatu deskripsi kronologis dari kenyataan politik berbagai hal, baik itu bersifat institusional maupun non institusional dalam kehidupan suatu negara (atau sosial politik) dalam pertimbangan kebijakan dalam negeri maupun dalam

²⁷ The Liang Gie, Op. Cit. Hal. 109.

hubungannya dengan negara lain atau pada luar negeri atau kebijakan internasional.²⁸

Politik dan sejarah memiliki kaitan yang sangat erat, keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi untuk perkembangan kedua unsur tersebut. Segala peristiwa politik dipengaruhi proyeksi sejarah baik dalam hubungannya dengan sejarah masa kini maupun masa depan yang tidak terlepas dari situasi masa lalu sejalan dengan perjalanan waktu.

Faktor sejarah yang diambil dalam kehidupan negara India sangat besar artinya bagi penjelasan ataupun jawaban atas permasalahan yang dikemukakan diatas. Ditinjau dari sejarah, maka Pakistan semula adalah bagian dari India. Perbedaan agama maupun budaya menyebabkan Pakistan berusaha melepaskan diri dari negara India dan mendirikan negara baru.

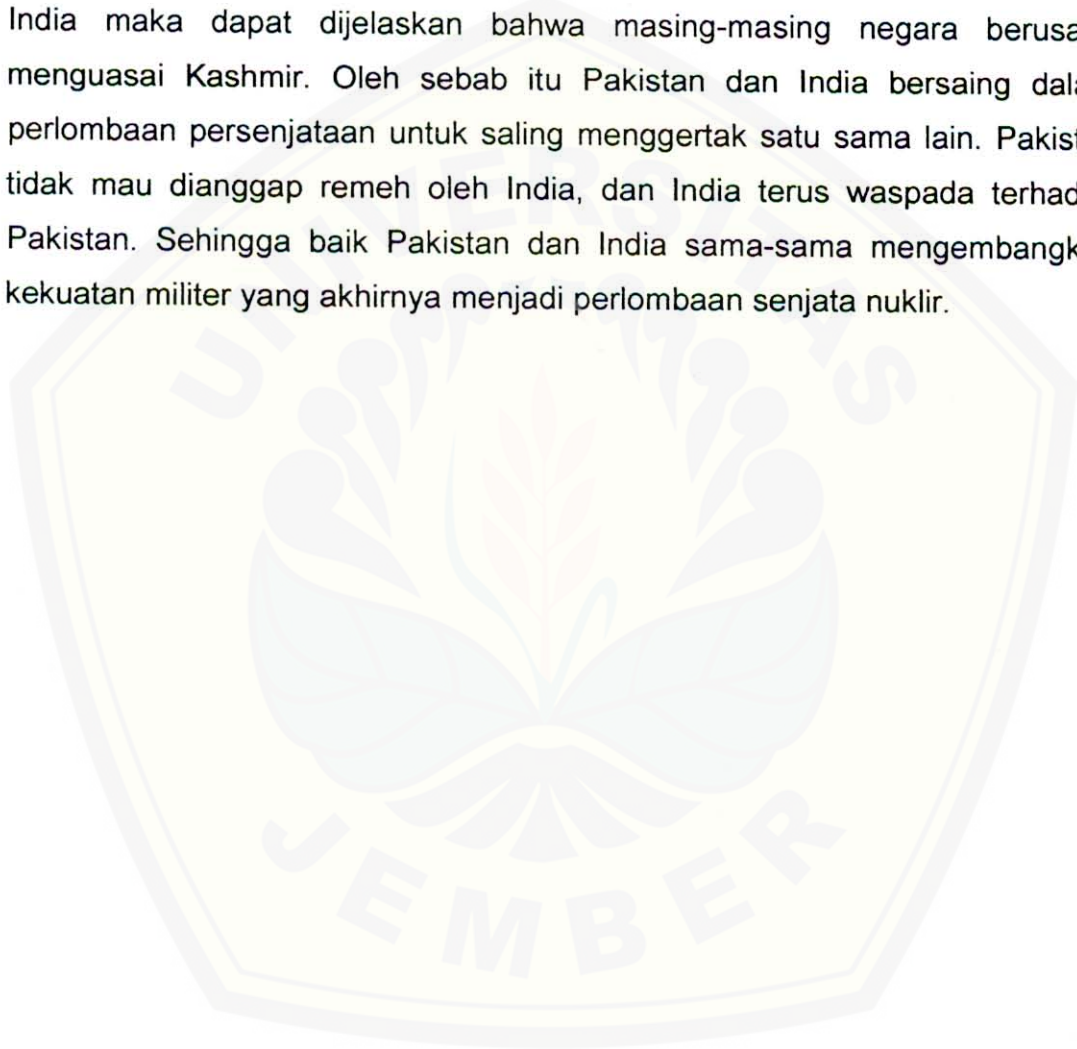
Pemisahan diri Pakistan dari India ini pada akhirnya menimbulkan konflik, salah satunya adalah konflik Jammu Kashmir yang merupakan wilayah perbatasan antara kedua negara tersebut. Disini dapat dilihat bahwa sejarah pemisahan Pakistan dari India, maupun sejarah daerah Jammu Kashmir, sangat bermanfaat dan sangat diperlukan bagi penjelasan gejala politik yang timbul saat ini, yaitu konflik antara Pakistan dan India yang didasarkan atas perebutan wilayah Jammu Kashmir tersebut dan akhirnya mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut.

Pendekatan lain yang penulis gunakan adalah pendekatan **kepentingan**. Kepentingan mengandung nilai-nilai yang merupakan dasar bagi usaha negara untuk mencapai apa yang diidam –idamkan dan untuk itu perlu disusun strategi yang merumuskan pangkalan dan sasaran beserta gagasan gerak dari pangkalan menuju sasaran.²⁹

²⁸ Ibid. Hal. 87.

²⁹ Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal 30.

Baik Pakistan maupun India memiliki kepentingan yang sama dalam konflik Kashmir. Pakistan ingin melepaskan Kashmir dari India dan apabila mungkin Kashmir masuk menjadi bagian Pakistan. Demikian pula India, India ingin terus menguasai Kashmir dan tidak ingin melepaskan Kashmir ke tangan Pakistan. Dengan melihat kepentingan yang ada antara Pakistan dan India maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing negara berusaha menguasai Kashmir. Oleh sebab itu Pakistan dan India bersaing dalam perlombaan persenjataan untuk saling menggertak satu sama lain. Pakistan tidak mau dianggap remeh oleh India, dan India terus waspada terhadap Pakistan. Sehingga baik Pakistan dan India sama-sama mengembangkan kekuatan militer yang akhirnya menjadi perlombaan senjata nuklir.





BAB II

AKAR HISTORIS KONFLIK KASHMIR

2.1 Sejarah Pemisahan Pakistan dari India

India adalah gambaran suatu negara yang kompleks, yang didalamnya terdapat bermacam-macam agama, suku serta bahasa. Variasi kultural yang ada di India dapat dihubungkan dengan tipe-tipe rasial yang ada di India. Mereka datang dari Timur maupun Barat dalam waktu yang berbeda. Mereka mendiami wilayah India secara tersebar, menyebabkan adanya perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, misalnya budaya India daerah Timur berbeda dengan budaya India daerah Barat, budaya India daerah Selatan berbeda dengan budaya India daerah Utara.

India memiliki beberapa macam agama. Pada awalnya agama yang dianut oleh penduduk India adalah Hindu, Budha, Jain dan Sikh. Pada perkembangan selanjutnya agama Islam dan agama Kristen memasuki India. Dengan adanya bermacam-macam agama tersebut, masalah seringkali muncul yang diakibatkan oleh adanya pertentangan diantara penganut ajaran agama tersebut. Namun demikian, agama Hindulah yang paling dominan di India baik dalam kehidupan masyarakat biasa maupun dalam bidang pemerintahan. Sedangkan agama Islam di India mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Mughal (Mogul) yang memerintah India pada tahun 1526 sampai tahun 1707 dimana menghasilkan karya seni serta arsitektur yang terkenal yaitu Taj Mahal. Akan tetapi kekuasaan itu memudar, bahkan kedudukan kaum Muslim India semakin terpuruk karena kedatangan bangsa Inggris ke India. Bangsa Inggris tersebut datang ke India dengan alasan awalnya adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang

perdagangan, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya niatan tersebut berubah sebagai suatu bentuk penjajahan.³⁰

Masalah mengenai berdirinya negara Pakistan yang semula adalah bagian dari India, dilatar belakangi oleh faktor agama. Konflik antara pemeluk Hindu dan pemeluk Islam telah berlangsung lama dan meracuni setiap bentuk hubungan mereka. Perbedaan ajaran yang sangat besar menyebabkan mereka sulit untuk hidup berdampingan secara damai.

Dari sisi ajaran agama, agama Hindu dan agama Islam ada yang bertolak belakang misalnya tentang penyembelihan sapi. Ajaran agama Hindu melarang keras penyembelihan sapi, sapi dianggapnya keramat dan dipuja. Berbeda dengan ajaran agama Islam yang memperbolehkan umatnya menyembelih sapi dan memakan daging sapi, bahkan sapi adalah binatang yang dapat dijadikan binatang kurban pada Idul Adha.

Kaum Muslim India sebagai kelompok minoritas berusaha untuk mempertahankan dan menentukan identitas muslim dihadapan suatu budaya yang sudah mapan dan dianut oleh kelompok mayoritas yaitu agama Hindu. Kesadaran kaum Muslim untuk mempertahankan identitasnya itu diawali dengan kesadaran mengenai runtuhnya kekhalifahan Mughal yang berkaitan dengan kedatangan bangsa Inggris ke India. Bangsa Inggris yang datang ke India langsung mendapatkan tempat yang istimewa dan memiliki kekuasaan yang luas. Pada saat itu otoritas kaum Muslim sangat terbatas. Mereka hanya memiliki kekuasaan di New Delhi sebagai sisa-sisa kekuasaan kekhalifahan Mughal. Kondisi ini semakin parah ketika timbul pemberontakan India terhadap penjajahan Inggris pada tahun 1857 sampai tahun 1858 yang dimotori oleh kaum Muslim India. Penjajah Inggris dapat dengan mudah menumpas pemberontakan tersebut, karena jumlah kaum pemberontak hanya sedikit.

³⁰ Grollier Inc. encyclopedia of knowledge, Grollier Inc, Danbury Conecticut, 1990.

Kekalahan kaum Muslim dalam pemberontakan itu semakin memperburuk posisi kaum Muslim India dan menjadi kelompok lapis bawah yang dimusuhi dan selalu dicurigai oleh Inggris. Pada saat pemberontakan tersebut, otoritas kaum Muslim hanya terbatas di New Delhi saja. Karena kekalahan mereka, maka otoritas tersebut menjadi hilang.³¹

Keberadaan bangsa Inggris di India yang semula dengan dalih perdagangan, tetapi kemudian berubah menjadi penjajahan telah mengusik hati bangsa India. Mereka merasa terancam dan tertindas ditanah air mereka sendiri. Pada tanggal 25-31 Desember 1885, diadakan suatu pertemuan di Bombay, yang terdiri dari wakil-wakil rakyat India dari berbagai agama. Mereka membentuk suatu organisasi yang bernama "*All Indian Congress*" yang untuk selanjutnya disebut Congress saja. Tujuan Congress tersebut adalah untuk memelihara dan mempertinggi kesejahteraan penduduk negara India dengan segala daya upaya yang sah.³²

Pada perkembangan selanjutnya, Congress yang didominasi oleh kaum Hindu menyeleweng dari tujuan semula. Mereka lebih banyak memperjuangkan kepentingan kaum Hindu daripada kaum yang lain. Dalam memperjuangkannya, Congress selalu mempergunakan slogan "India untuk Hindu". Hal ini tentu saja sangat menyinggung perasaan anggota yang tidak beragama Hindu. Mereka sangat tersinggung dan tidak bisa menerima slogan tersebut, karena hal itu berarti kaum Hindu menganggap bahwa selain penganut Hindu sama sekali tidak punya hak tinggal di India. Mereka yang non Hindu akhirnya mengundurkan diri dari keanggotaannya pada Congress.

Tahun 1906 merupakan tonggak bersejarah bagi kaum Muslim India. Pada tahun itu, mereka mendirikan suatu organisasi bagi kaum Muslim India yang bernama "Liga Muslimin". Liga Muslimin dipimpin oleh seorang

³¹ Akbar S. Akhmed, *Living Islam*, Mizan, Bandung, 1997, Hal. 176.

³² Sofyan Naim, *Hubungan India-Pakistan pada Era Meredanya Ketegangan Negara Adi Kuasa*, IKIP Padang, Padang, 1990, hal 17.

pengacara yang bernama Muhammad Ali Jinnah. Tujuan dari organisasi ini adalah membela kepentingan kaum Muslim India dalam segala lapangan baik politik, ekonomi maupun sosial. Dibawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah mereka menyuarakan bahwa mereka kaum Muslim tidak akan menjadi budak kaum Hindu. Akan tetapi disamping hal tersebut, Muhammad Ali Jinnah telah membawa organisasi itu sebagai organisasi yang tidak fanatik, mereka tetap mengembangkan suatu toleransi beragama dan menganggap pemeluk agama lain itu ada dan berhak tinggal di India.

Liga Muslimin banyak mendapatkan dukungan dari kaum Muslim India, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama Liga Muslimin telah berkembang pesat dan menjadi partai yang kuat disamping Partai Congress (dulu adalah *All Indian National Congress*). Tuntutan Liga Muslimin adalah umat Islam di India memiliki wilayah kekuasaan sendiri untuk mereka diami dan mereka atur sendiri sebagai suatu negara. Muhammad Ali Jinnah menginginkan adanya negara Islam dan negara Hindu dalam suatu federasi India.³³ Liga Muslimin dalam konferensinya di Lahore tahun 1940, menuntut adanya suatu pemerintahan Muslim sendiri yang berdaulat. Akan tetapi usul ini ditolak oleh Partai Congress.

Perjuangan menuju India merdeka dimulai dengan suatu kesadaran bahwa penjajah Inggris tidak akan memberikan kemerdekaan kepada India. Ketika itu pihak India mengetahui isi *Atlantik Charter* yang salah satunya berisi bahwa bangsa-bangsa yang akan dimerdekakan adalah bangsa-bangsa yang masih dalam pengawasan sekutu.

Selain itu mereka juga diilhami oleh keberhasilan Jepang dalam menaklukkan bangsa Barat yang telah menjajah bangsa Asia, misalnya bangsa Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Di pihak penjajah Inggris, mereka khawatir apabila Jepang bergerak

³³ Ibid. Hal. 20.

menuju India. Kondisi dalam negeri India sedang mengalami perpecahan, yaitu antara kaum Hindu dan kaum Muslim. Apabila perpecahan itu terus berlangsung, maka India tidak akan mungkin mampu menghadapi serangan Jepang. Karena itu, Inggris berusaha mencari cara agar pihak yang berkonflik berdamai agar kekuatan mereka bersatu.

Pada tanggal 14 Juli 1942, Partai Congress menuntut ditariknya pasukan Inggris dari India dan memberikan kemerdekaan pada India. Sebagai tindak lanjut dari tuntutan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1942 diresmikan suatu gerakan pemogokan, yaitu mereka tidak akan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris di India. Gerakan ini semakin membuat Inggris terpojok. Keadaan India ketika itu semakin kacau. Kerusuhan demi kerusuhan terjadi, bentrokan antara kaum Hindu dan kaum Muslim sering terjadi dan menelan banyak korban.

Keadaan tersebut memojokkan Lord Mountbatten (wakil Ratu Inggris di India). Untuk menyelesaikan konflik dalam negeri India tersebut, ia kemudian mengajukan usul kepada parlemen Inggris mengenai kemerdekaan India. Usulan Lord Mountbatten adalah akan dibentuk dua dominion di wilayah India, yaitu Pakistan (sebagai wadah kaum Muslim) dan India (sebagai wadah kaum Hindu). Konsekuensi dari hal tersebut adalah daerah Punjab dan daerah Benggala dibagi dua, sebagian untuk India dan bagian yang lain adalah untuk Pakistan.

Lord Mountbatten mengusulkan tentang penyerahan kekuasaan Inggris di India kepada kedua negara baru tersebut. Secara resmi, pada tanggal 4 Juli 1947 diajukan "*Indian Independent Bill*" yang berisi bahwa di India akan dibentuk dua dominion baru, yaitu Pakistan dan India. Mereka akan resmi berkuasa diwilayahnya sejak tanggal 15 Agustus 1947. Dengan berbagai pertimbangan mengenai keselamatan India, maka pihak Parlemen Inggris akhirnya menerima usulan Lord Mountbatten tersebut. Demikianlah pada tanggal 15 Agustus 1947 Inggris menyerahkan kekuasaan India kepada

Pakistan dan India. Tanggal 15 Agustus selanjutnya mereka peringati sebagai hari kemerdekaan mereka. Akhirnya di wilayah India terbentuklah dua negara baru, yaitu India yang dipimpin oleh Pandit Jawaharlal Nehru dan Pakistan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah.

2.2 Konflik Kashmir

2.2.1 Gambaran Umum Kashmir

Jammu dan Kashmir atau yang lazim disebut Kashmir saja adalah suatu daerah yang subur dan indah, terletak di lembah pegunungan Himalaya. Kashmir yang terletak di bagian Barat Laut India ini memiliki luas wilayah kurang lebih 222,236 km². Daerah Kashmir adalah daerah yang bergunung-gunung dan letaknya sangat strategis. Bagian Barat Laut berbatasan dengan Afghanistan, Timur Laut berbatasan dengan Cina, bagian Selatan berbatasan dengan negara bagian India yaitu Himachal Pradesh dan Punjab (Punjab Timur), sedangkan bagian Barat berbatasan dengan tapal batas Utara - Barat dan Punjab yang masuk wilayah Pakistan (Punjab Barat).³⁴

Di Kashmir yang berbasis pegunungan terdapat jalur yang menghubungkan dataran Pathankot, Jammu, Akhnur, Chamb dan perbatasan Pakistan. Dari daerah tersebut ke Utara, terdapat pegunungan yang ketinggiannya sama. Sebelah Utaranya lagi terdapat Gilgit, Hunza, bagian Timur Ladakh dan Kargil yang merupakan dataran tinggi. Lembah Kashmir yang indah terdapat di pusat kota Anant Nag, Srinagar dan Baramula.

Kashmir merupakan daerah yang subur ditunjang oleh adanya sungai-sungai serta mata air yang sangat dibutuhkan oleh baik Pakistan maupun India. Sungai-sungai tersebut adalah sungai Sutlej, sungai Ravi, sungai

³⁴ Jammu & Kashmir, Microsoft ® Encarta (R), 1996,Encyclopedia 1995-1996.

Indus, sungai Jhelum dan sungai Chenab. Diantara sungai-sungai tersebut, sungai Sutlej dan sungai Ravi memiliki sumber air yang terletak di wilayah India (yang tidak bersengketa), yang kemudian aliran sungainya melewati wilayah Kashmir, sedangkan sungai Indus, sungai Jhelum dan sungai Chenab memiliki sumber air di wilayah Kashmir dan mengalir melewati Pakistan.³⁵

Dataran Jammu terletak di bagian Barat Daya Kashmir. Jammu merupakan daerah yang paling subur di Kashmir. Jammu merupakan daerah *hearthland* yang dimiliki Kashmir. Kesuburan tanah yang dimiliki oleh Jammu ditunjang oleh adanya bendungan dari sungai Jhelum yang mengairi wilayah Jammu. Pertanian di daerah Jammu sangat maju, menghasilkan beras, jagung, gandum yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Kashmir maupun India.

Masyarakat Kashmir berasal dari berbagai ras seperti Arya, Mongol, Turki dan Afghanistan. Warga negara ini sekitar 13 juta jiwa, mayoritas Muslim termasuk 1,5 juta pengungsi di Pakistan dan setengah juta lainnya mencari suaka politik di lebih dari 114 negara.³⁶ Kehidupan beragama penduduk Kashmir tidak homogen, akan tetapi mayoritas dari mereka menganut agama Islam. Penduduk Muslim Kashmir berjumlah kurang lebih 78%, mereka bermukim di daerah bagian Selatan Kashmir sampai bagian Barat Jammu. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Urdu dan Kashmiri. Pemeluk Hindu dan Sikh tinggal di bagian Timur Kashmir dan menggunakan bahasa Hindi, Dogri dan Punjabi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagian Utara dan Barat Ladakh, penduduknya beragama Budha dan dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Balti dan Ladakh.

³⁵ Sofyan Naim. Op. Cit. Hal. 49.

³⁶ Republika. 29 Mei 2002.

Dalam bidang perekonomian atau mata pencaharian, mayoritas penduduk Kashmir adalah petani. Mereka hidup dari hasil pertanian karena wilayah itu adalah wilayah yang subur, sehingga sangat baik untuk bertani. Hasil pertanian mereka berupa beras, jagung, gandum dan lain-lain. Di samping itu, mereka juga beternak kerbau, domba, kambing, lembu dan unggas. Di Kashmir juga terdapat industri yang cukup besar, yaitu industri tenunan sutera dan karpet. Penduduk Kashmir ada juga yang bekerja sebagai buruh pabrik tersebut.

Wilayah Kasmir terbagi dalam tiga propinsi, yaitu propinsi Ladakh, propinsi Kashmir dan propinsi Jammu. Propinsi Ladakh merupakan daerah tapal batas, hampir seluruh wilayahnya adalah daerah pegunungan yang jarang penduduknya. Mayoritas penduduk Ladakh beragama Islam. Propinsi Kashmir memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, yaitu sekitar 93%. Mereka mendiami lembah Kashmir yang subur dan indah. Penduduk Kashmir adalah petani dan pekerja kasar. Kehidupannya miskin dan tertindas. Sementara itu propinsi Jammu terletak di bagian Barat Daya Kashmir, penduduknya 53% adalah Muslim dan hidup dari pertanian.

2.2.2 Latar Belakang Timbulnya Konflik Kashmir antara Pakistan dan India

Pemisahan Pakistan dari India telah membawa dampak yang sangat besar bagi stabilitas keamanan wilayah tersebut. Setelah masalah mereka dengan Inggris selesai, muncul masalah baru dalam hubungannya dengan pemisahan negara Pakistan dan India. Masalah yang pertama-tama harus dihadapi adalah masalah pembagian wilayah dan pemindahan penduduk yang akan menjadi penduduk Pakistan atau menjadi penduduk India. Namun tidak semua penduduk berkehendak pindah dari tempat tinggalnya semula.

Menindak-lanjuti pemisahan tersebut, maka pemerintah Inggris memberi hak kebebasan kepada setiap kerajaan yang dulu menjadi bagian

dari India pada masa penjajahannya. Hak tersebut berupa kebebasan setiap kerajaan untuk masuk ke negara India atau masuk ke negara Pakistan, atau mereka ingin mendirikan negara sendiri yang merdeka. Ketika itu ada beberapa kerajaan yang belum menentukan pilihannya. Mereka adalah Hyderabad, Junagadh dan Kashmir.

Hyderabad dan Junagadh adalah kerajaan yang maharajanya beragama Islam, akan tetapi penduduknya mayoritas beragama Hindu. Dengan diplomasi maupun tindakan militer dari India, akhirnya kedua kerajaan tersebut masuk dalam negara India. Sementara itu, Kashmir memutuskan untuk menjadi negara merdeka dalam pemerintahan maharaja Kashmir, yaitu Hari Singh. Penduduk Kashmir mayoritas beragama Islam, sedangkan maharaja Hari Singh adalah keturunan Hindu. Nenek moyang Hari Singh telah membeli daerah Kashmir dari penjajah Inggris ketika Inggris masih berkuasa di India.

Wilayah Kashmir inilah yang kemudian memicu perselisihan antara Pakistan dan India. Pakistan berupaya untuk menguasai Kashmir dengan cara memberikan tekanan-tekanan baik secara ekonomi maupun militer kepada kerajaan Kashmir. Kekuatan kerajaan Kashmir sangat terbatas, sebagian dari tentaranya telah ditugaskan untuk menjaga perbatasan Kashmir dengan negara lainnya, sehingga tidak sanggup menghadapi apa yang dilakukan oleh Pakistan terhadapnya. Untuk mempertahankan diri, akhirnya maharaja Kashmir memutuskan untuk bergabung dengan India dengan penandatanganan berkas penggabungan diri Kashmir kepada India pada tanggal 26 Oktober 1947.

2.2.3 Kepentingan Pakistan dan India di Kashmir

a. Kepentingan Pakistan

Keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir karena adanya kepentingan Pakistan. Klasifikasi kepentingan Pakistan dapat dilihat dari segi pertahanan keamanan, segi perekonomian, dan segi sosial budaya. Ditinjau dari segi pertahanan keamanan, Pakistan memandang Kashmir sebagai daerah yang paling strategis untuk membangun kekuatan militer, karena Kashmir berbatasan dengan negara-negara yang dahulu pernah terlibat konflik dengan Pakistan. Negara-negara tersebut antara lain adalah India dan Afghanistan. Konflik dengan India sudah dimulai sejak dahulu ketika keduanya masih dalam satu negara. Konflik terus berlangsung, bahkan semakin tajam setelah mereka terpisah dan menjadi dua negara yang merdeka.

Dalam kenyataannya, komunikasi Kashmir dengan Pakistan lebih mudah daripada dengan India. Jalan-jalan yang menghubungkan Kashmir dengan Pakistan lebih banyak dan lebih baik, khususnya pada awal pemisahan Pakistan dan India. Jalur kereta dan jalan raya Pakistan mudah diakses melalui Kashmir, sehingga Kashmir berfungsi sebagai wilayah penyangga bagi Pakistan.³⁷ Hal ini memudahkan Pakistan untuk bergerak ke Kashmir dan melakukan penyerangan kepada India melalui Kashmir. Sebaliknya, jalan yang menghubungkan antara India dengan Kashmir kurang baik dan jumlahnya sedikit. Sehingga sulit bagi India untuk menahan serangan Pakistan apabila Pakistan melakukan penyerangan terhadap India melalui daerah tersebut.

Sehubungan dengan Afghanistan, Pakistan pernah terlibat konflik dengan negara tersebut pada masa awal kemerdekaan Pakistan. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh dorongan Afghanistan pada suku bangsa -

³⁷ Republika. 29 Mei 2002.

suku bangsa di garis Durand (bagian Pakistan) untuk memberontak kepada Pakistan dan mendirikan negara Pathanistan yang merdeka. Pemerintah Afghanistan memberikan bantuan berupa pemberian dukungan untuk berkampanye di radio dan pers Kabul. Selain itu, Afghanistan juga memberikan hadiah-hadiah kepada suku bangsa-suku bangsa tersebut.

Dalam perjalanan Pakistan menuju dunia internasional, dimana Pakistan berusaha untuk masuk menjadi salah satu anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Afghanistan adalah negara yang menolak keanggotaan Pakistan di PBB tersebut.³⁸ Sehubungan dengan konflik yang terjadi antara Pakistan dan Afghanistan tersebut, maka apabila suatu saat pecah perang terbuka antara Pakistan dengan Afghanistan, Pakistan dapat melakukan penyerangan ke wilayah Afghanistan salah satunya melewati daerah Kashmir tersebut.

Semenjak berdirinya, Pakistan menyadari pentingnya menjalin kerjasama dengan negara lain. Kemudian Pakistan menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dan Cina. Sehubungan dengan masalah Kashmir, Pakistan dengan Amerika Serikat pada tahun 1950-an bekerja sama untuk membuat pangkalan militer, pemasangan radar, pembuatan lapangan udara di Kashmir. Karena hal itulah penting bagi Pakistan untuk menguasai seluruh Kashmir.³⁹

Ditinjau dari segi perekonomian, maka Pakistan sangat membutuhkan Kashmir. Kehidupan penduduk Pakistan sebagian besar tergantung pada sungai-sungai yang mengalir di Kashmir. Sungai Sutlej dan sungai Ravi berhulu di India, sedangkan sungai Indus, sungai Jhelum dan sungai Chenab berhulu di Kashmir. Kelima sungai itu sangat dibutuhkan oleh Pakistan. Selama ini dalam menggunakan sungai Sutlej dan sungai Ravi, Pakistan

³⁸ Sofyan Naim. Op. Cit. Hal. 44.

³⁹ Cecil Victor, *India, The Security Dilema*, Patriot Publisher, New Delhi, 1990, Hal. 261.

diwajibkan membayar ongkos penggunaan air oleh India. India mengancam apabila Pakistan tidak mau memenuhi kewajiban itu, maka India akan membelokkan aliran sungai tersebut sehingga Pakistan akan kesulitan dalam memperoleh air sungai. Selain itu sungai Jhelum juga penting bagi Pakistan karena mengairi 50 % tanah pertanian dan 70 % tanah di Punjab. Jika India membendung sungai tersebut, Pakistan akan menghadapi bencana kekeringan.⁴⁰ Menanggapi hal tersebut, akan berbahaya bagi Pakistan apabila seluruh Kashmir dikuasai oleh India, karena Pakistan akan menjadi sangat tergantung kepada India.

Hal lain yang mendorong Pakistan berusaha untuk menguasai Kashmir seluruhnya adalah dorongan agama bila dilihat dari segi sosial budaya. Kashmir mayoritas penduduknya beragama Islam, demikian pula dengan Pakistan. Kehidupan Muslim Kashmir sangat menderita dan tertindas. Maharaja yang memerintah Kashmir beragama Hindu dan memperlakukan kaum Muslim dengan tidak adil. Mereka diperlakukan semena-mena oleh maharaja. Hal ini sangat menyentuh hati penduduk Pakistan yang dalam arti sama agamanya. Kaum Hindu Kashmir menempati tempat yang istimewa. Kepada kaum Muslim, maharaja Kashmir menarik pajak yang sangat besar. Mereka adalah yang memiliki domba, rumah, bekerja sebagai tukang daging, tukang perahu dan sebagainya. Penjualan gandum dimonopoli oleh maharaja. Dan barangsiapa kaum Muslim yang berani menyembelih sapi, maka ia akan dikenai hukuman penjara selama sepuluh tahun.

Melihat gambaran kehidupan saudara-saudara seagamanya yang menderita tersebut, maka Pakistan berusaha untuk membantu mereka membebaskan diri dari penderitaan tersebut dengan cara melepaskan Kashmir dari India. Perjuangan itu mereka anggap sebagai perang sabil.

⁴⁰ Republika. 29 Mei 2002.

Pemimpin-pemimpin perjuangan mendapat penghormatan yang besar dari penduduk Pakistan. Rakyat Pakistan mengumpulkan dana untuk membiayai perjuangan tersebut.

b. Kepentingan India

Kashmir adalah wilayah yang sangat berarti bagi India. India memandang Kashmir sebagai wilayah yang letaknya strategis. Letak Kashmir yang berbatasan dengan Cina, Pakistan dan Afghanistan dinilai sangat strategis dalam bidang pertahanan keamanan. Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, juga antara India dengan Cina memberi pelajaran penting kepada India bahwa Kashmir adalah wilayah yang sangat penting dan harus dikuasai.

India berbatasan langsung dengan Cina di daerah Himalaya sepanjang 2500 mil. Perbatasan tersebut salah satunya melewati wilayah Barat Daya Ladakh. Perebutan wilayah antara India dan Cina seringkali terjadi. Pada perkembangan selanjutnya, Cina membuat jalan Sinking ke Tibet. Jalan itu melewati daerah Timur Kashmir. Melihat hal tersebut India sangat marah, karena itu semua tanpa persetujuan dari pemerintahan India. India bertekad untuk menguasai wilayah tersebut agar apabila India dan Cina terlibat perang, Kashmir bisa dijadikan tempat pertahanan.⁴¹

Selain hubungannya dengan Cina, India juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan Pakistan. Konflik antara keduanya sudah mengakar dan mendarah daging sejak lama, jauh sebelum kedua negara tersebut terbentuk. Karena itu India harus berjaga-jaga apabila terjadi perang dengan Pakistan. Pakistan akan dapat melumpuhkan India dari wilayah tersebut, karena itu India harus menguasainya.

⁴¹ Sofyan Naim Op.Cit. Hal. 40.

Dari sisi keindahan alam Kashmir yang terletak di lembah Himalaya, industri pariwisata dapat dibangun di sana. Letak Kashmir yang dekat dengan New Delhi membuat tempat itu lebih strategis, karena sarana bagi industri pariwisata lebih mudah dipenuhi. Kashmir dapat menarik wisatawan asing, sehingga dapat mendatangkan *income* bagi India. Kesuburan wilayahnya pun sangat berarti bagi India. Kashmir dapat dianggap sebagai lumbung padi bagi India, selain hasil-hasil pertanian lainnya, seperti gandum, jagung dan hasil-hasil peternakan. Di samping itu, Kashmir memiliki sungai-sungai yang sangat dibutuhkan oleh Pakistan. Dengan menguasai Kashmir seutuhnya, berarti juga menguasai seluruh sungai-sungai yang ada di Kashmir. Dengan demikian secara tidak langsung kehidupan Pakistan akan sangat tergantung kepada India.

2.3 Perang Terbuka antara Pakistan dan India

2.3.1 Perang Pakistan dan India Tahun 1947-1948

Kemerdekaan India pada tahun 1947 membawa dampak yang luas bagi India. Pemisahan Pakistan dari India melatarbelakangi munculnya konflik tahun 1947 – 1948 antara Pakistan dan India. Masalah mulai timbul manakala Pakistan melanggar kesepakatan bahwa Kashmir akan menjadi negara yang merdeka, bukan menjadi bagian dari Pakistan maupun India. Pakistan melakukan tekanan baik secara ekonomi maupun militer kepada Kashmir, sehingga pada tanggal 26 Oktober 1947, Maharaja Kashmir, Hari Singh, memutuskan untuk bergabung dan menjadi bagian dari negara India.

Sejak saat itu Kashmir adalah bagian dari India, karena itu India wajib melindungi Kashmir dari serangan negara manapun termasuk Pakistan. India menyerukan kepada Pakistan untuk menarik pasukannya dari wilayah Kashmir dan bekerjasama dengan India untuk tetap menjaga keamanan Kashmir. Seruan tersebut ditolak oleh Pakistan, sehingga India mengirimkan

pasukannya ke Kashmir. Inilah awal mulainya perang terbuka antara Pakistan dan India pada tahun 1947.

Operasi India ke Kashmir dipimpin oleh Jendral Russel, komandan daerah militer sektor Barat India. Sebenarnya saat itu posisi India untuk mencapai Kashmir lebih sulit dibandingkan dengan Pakistan. Jalan yang menghubungkan Pakistan dengan Kashmir lebih baik dan mudah dilalui. Hal ini merupakan masalah bagi India untuk menempatkan pasukannya di Kashmir, sementara itu Pakistan tidak mengalami kesulitan dalam menempatkan pasukannya di Kashmir.

Pada saat itu kekuatan India meliputi Angkatan Darat dua belas Resimen Armour (pasukan lapis baja), delapan Resimen Artileri, delapan puluh delapan Batalyon Infantri, sedangkan Angkatan Udaranya meliputi enam squadron pesawat tempur, satu squadron transportasi. Angkatan Laut terdiri dari empat sekoci, dan tiga penyapu ranjau.

Sementara itu kekuatan Pakistan meliputi Angkatan Darat terdiri dari enam Resimen Armour, delapan setengah Resimen Artileri, tiga puluh tiga Batalyon Infantri, Angkatan Udara meliputi dua squadron pesawat tempur, satu squadron transportasi. Sedangkan Angkatan Lautnya terdiri dari dua sekoci dan satu penyapu ranjau.⁴²

Tindakan pertama yang dilakukan oleh India adalah mengirim tiga ratus orang dari pasukan kesukuan Sikh I dibawah pimpinan Letkol Rai ke Srinagar pada tanggal 27 Oktober 1947 untuk mengamankan bandara Srinagar dan bergerak menuju Baramula. Selanjutnya India menerbangkan Brigif 161 (Para Kumaon I) dan satu kompi penembak dengan senapan mesin ke Srinagar untuk membantu pasukan terdahulu. Pada awal Nopember 1947, India mengirim Para Punjab 4 dan dua kompi dari Para Kumaon 4. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Letjend Kalwant Singh.

⁴² Rajendra Nath, *Military Leadership in India*, PVSM Lancer Books, New Delhi, 1990, Hal. 265.

Ketika Brigif 161 sedang beroperasi, mereka dibantu oleh satu brigade artileri yang mengacau pertahanan pasukan Pakistan dan selanjutnya pasukan Infanteri dapat bergerak maju. Dalam operasi tersebut, India berhasil menguasai daerah Baramula dan Uri. Akan tetapi daerah Gilgit berhasil dikuasai oleh Pakistan.

Pada saat terjadinya perang tersebut, Panglima Daerah Militer bagian Barat (India) yang meliputi Kashmir sampai Rajasthan dijabat oleh Jenderal Russel. Tanggal 20 Januari 1948, dia digantikan oleh Jenderal Cariappa. Kekuatan Pakistan di Kashmir semakin bertambah yaitu sekitar 30.000 personil yang meliputi tentara tetap Pakistan dan tentara kesukuan Pakistan. Sedangkan India memiliki lima belas Batalyon Infantri, satu Resimen pasukan lapis baja dan satu Resimen pegunungan dan medan.

Langkah pertama-tama yang diambil oleh Jenderal Cariappa adalah berusaha untuk menguasai Neushera. Neushera adalah daerah yang penting untuk menguasai Jammu Kashmir. Jenderal Cariappa berhasil menguasai daerah tersebut, tetapi kemudian Pakistan menyerang Neushera. Serangan Pakistan terhadap Neushera terbagi dalam tiga sisi, yaitu 4000 prajurit menyerang dari Utara, 3000 prajurit menyerang dari Barat dan 2000 prajurit menyerang dari Selatan. Serangan Pakistan tersebut gagal, Cariappa berhasil mempertahankan Naushera, bahkan kemudian berencana untuk menguasai Rajauri, Uri dan Domel. Muzafarabad tidak berhasil dikuasai oleh Jenderal Cariappa dan pasukannya karena cuaca yang buruk, yaitu jalan menuju daerah tersebut tertutup salju.⁴³

Pada saat datangnya musim panas, di Srinagar dibentuklah suatu Divisi baru yaitu Divisi 19 dan Mayjend K.S. Thimayya diangkat sebagai komandan dari divisi tersebut. Divisi 19 bertugas untuk menguasai Domel dengan menggunakan dua brigade dan satu brigade untuk menyerang Uri.

⁴³ Ibid. Hal. 275.

Brigif 161 terdiri dari empat Batalyon Infantri dan didukung oleh tiga Batalyon Artileri, menyerang Uri dan Domel pada tanggal 20 Mei 1948. Serangan itu mendapat perlawanan yang gigih dari pasukan Pakistan, tetapi akhirnya kedua daerah itu dapat dikuasai oleh India.

Tindakan yang diambil oleh Jenderal Cariappa selanjutnya adalah menguasai Poonch. Tindakan tersebut dilakukannya dengan melewati Rajauri (sebelah Selatan), Pir Badesar, yang dapat digunakan untuk menguasai Zoji La, Kargil, Ladakh, akan tetapi hal itupun dapat digagalkan oleh pasukan Pakistan.

Pertempuran terus berlangsung sampai akhirnya PBB turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tanggal 13 Agustus 1948, PBB mengeluarkan suatu Resolusi tentang penghentian perang dan penyelesaian konflik secara damai. Resolusi tersebut menyerukan kepada pihak-pihak yang berperang agar sesegera mungkin melakukan gencatan senjata dan menyerukan kepada Pakistan agar menarik mundur pasukannya dari wilayah Kashmir. Kepada India juga diperintahkan untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Jammu Kashmir dan menjamin perdamaian, pelaksanaan hukum dan aturan yang benar dan menjamin hak asasi manusia di Kashmir.

India menerima resolusi tersebut dan menghentikan serangannya terhadap Pakistan, akan tetapi Pakistan menolak resolusi tersebut dan terus melancarkan serangannya kepada India, sehingga resolusi itu belum bisa terlaksana. Baru setelah Pakistan terdesak, kemudian ia menerima resolusi tersebut pada tanggal 1 Januari 1949.

Demikianlah akhirnya, perang antara Pakistan dan India pada tahun 1947-1948 dapat diselesaikan dengan campur tangan dari PBB. Penyelesaian perang yang terjadi karena adanya intervensi PBB menghasilkan pembagian wilayah Kashmir, yaitu sepertiga wilayah Kashmir dikuasai oleh Pakistan yang selanjutnya disebut Azad Kashmir (Kashmir

Merdeka) yang meliputi daerah bulan sabit yang terletak antara Jammu Kashmir dan Pakistan, Gilgit dan Skardu. Sementara itu dua per tiga wilayah Kashmir dikuasai oleh India, yang selanjutnya disebut sebagai negara bagian Jammu Kashmir.⁴⁴

Sebagai tambahan dari resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 13 Agustus 1948, maka pada tanggal 5 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi lagi. Resolusi tanggal 5 Januari 1949 tersebut berisi akan diadakannya plebisit di wilayah Kashmir secara jujur dan adil untuk menentukan apakah rakyat Kashmir akan bergabung dengan Pakistan ataukah bergabung dengan India. Plebisit tersebut dapat dilaksanakan apabila resolusi tanggal 13 Agustus 1948 telah benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan plebisit tersebut, maka diperlukan plebisit administrator yang berasal dari Kashmir dan diangkat oleh pemerintah Kashmir.

2.3.2 Perang Pakistan dan India Tahun 1965

Perang antara Pakistan dan India pada tahun 1965 ini dilatar belakangi oleh terjadinya perang antara India dan Cina pada tahun 1962. Perang India dan Cina terjadi karena adanya perebutan daerah perbatasan sepanjang 2500 mil di pegunungan Himalaya. Pertempuran kecil mulai terjadi pada tahun 1950-an di daerah perbatasan India dengan Tibet, Barat Daya Ladakh. Cina membuat jalan Sinking ke Tibet yang melewati daerah India. Pada tanggal 20 Oktober 1962, Cina melancarkan serangan ke daerah perbatasan India. Hasil dari pertempuran tersebut, India mengalami kekalahan.

Melihat kekalahan India dalam perseteruannya dengan Cina, Pakistan ingin memanfaatkan hal tersebut untuk kembali mencoba menguasai seluruh Kashmir. Pakistan mulai melanggar garis gencatan senjata yang dibuatnya

⁴⁴ Jammu Kashmir, Microsoft © Encarta (R), 1996, Encyclopedia, 1995-1996.

dengan India dan PBB untuk mengakhiri perang Pakistan-India pada tahun 1947-1948. Serangan Pakistan terhadap India pada tahun 1965 itu dipimpin oleh Field Marshal Ayub Khan.

Berbeda dengan perang Pakistan dan India pada tahun 1947-1948, dimana Pakistan dalam posisi yang kalah dengan India dari sisi kekuatan militernya, pada tahun 1965 kemampuan dan kekuatan militer Pakistan mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini tidak terlepas dari bantuan Amerika Serikat. Pakistan secara resmi menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat bersedia membantu Pakistan dalam mengembangkan kemampuan militernya. Sekitar tahun 1954 sampai tahun 1962, Pakistan berlatih dengan gigih agar kekuatan militernya dapat maju. Amerika Serikat juga memberikan bantuan perangkat militer berupa Tank dan Artileri. Pada perang tahun 1947-1948, baik Pakistan maupun India menggunakan Sherman Tanks, akan tetapi pada tahun 1965, Pakistan menggunakan Patton Tanks yang lebih modern dan lebih canggih dibandingkan dengan Sherman Tanks yang saat itu masih digunakan oleh India.

Pada pertempuran tahun 1965 itu, Pakistan lebih menonjol dibandingkan dengan India. Ketika itu kekuatan India meliputi dua Resimen Armour, tujuh Resimen Cavalry, enam puluh tiga Resimen Cavalry yang dilengkapi oleh PT-76 Tank yang diproduksi oleh Uni Soviet. PT-76 Tank kurang begitu berguna untuk menghadapi serangan Pakistan, karena PT-76 Tank itu hanya cocok digunakan di daerah berair.

Peralatan tempur yang digunakan Pakistan lebih canggih, antara lain penggunaan Tank Anti Peluru. Pengorganisasian formasi Armour Pakistan lebih baik daripada India. Hal ini terjadi atas bimbingan Amerika Serikat. Pakistan memiliki tujuh belas resimen Armour yang dilengkapi dengan 720 tank. Selain itu Pakistan juga menggunakan 588 senjata dari semua tipe,

dimana senjata tersebut lebih canggih daripada yang dimiliki oleh India. Jangkauannya lebih panjang dan berkaliber lebih besar.

Angkatan Udara India memiliki dua puluh lima squadron, sedangkan Pakistan memiliki empat belas squadron yang dilengkapi dengan pesawat F-104 Star Fighter buatan Amerika Serikat. Pesawat tersebut lebih canggih daripada yang dimiliki oleh India. Dengan bantuan Amerika Serikat, Pakistan memasang instalasi radar di Punjab untuk memantau kegiatan pesawat-pesawat India. Pakistan memasang rintangan-rintangan buatan diantara sungai Chenab dan sungai Ravi, dan di antara sungai Ravi dan sungai Sutlej.⁴⁵

Operasi India dalam perang antara Pakistan dan India pada tahun 1965 tersebut dibagi dalam enam bagian. Bagian pertama, dipimpin oleh Kepala Staff Angkatan Darat India Jenderal Chaudhuary yang dibantu oleh Letjend Harbakh Singh Vrc yang merupakan Panglima Daerah Militer bagian Barat yang terdiri dari Kashmir sampai Rajasthan. Selain itu Jenderal Chaudhuary juga dibantu oleh Letjend Katoch, Komandan Corps XV dan bertanggung jawab atas operasi di negara bagian Jammu Kashmir.

Pada bagian pertama ini, serangan Pakistan dimulai pada minggu kedua bulan Maret 1965. Brigif 51 Pakistan berusaha untuk menyerang pos-pos penjagaan di perbatasan India. Ketika itu terjadi kerusuhan di Rann of Kutch, yaitu di Sardar Post, Kanjar Kot, Vigorkot, dan Bier Pet. Keempat pos penjagaan India tersebut berhasil dikuasai oleh Pakistan. Pakistan merasa serangan di Rann of Kutch harus dihentikan, kemudian ia mengajukan suatu gencatan senjata. Konsekuensinya adalah Pakistan dan India menandatangani perjanjian gencatan senjata mengenai daerah Rann of Kutch pada pukul 06.00 tanggal 1 Juli 1965.

⁴⁵ Rajendra Nath, Op. Cit. Hal. 378.

Serangan Rann of Kutch terhenti dengan adanya perjanjian tersebut, akan tetapi Pakistan ternyata berencana untuk melanjutkan serangannya di wilayah Jammu Kashmir. Rencana Field Marshall Ayub Khan, Pakistan akan menyerang Jammu Kashmir dalam suatu serangan dari tempat yang bervariasi. Pakistan juga berencana merusak instalasi sipil dan militer, mendorong penduduk setempat untuk memberontak kepada India. Di samping itu Pakistan juga melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah India yang lain.

Serangan Jammu Kashmir masuk dalam bagian kedua dari operasi tersebut. Operasi terhadap Jammu Kashmir disebut Operasi Gibraltar. Markas besar Gibraltar Force terdapat di Muree. Pasukan Pakistan terdiri dari pasukan Azad Kashmir, Unit Perbatasan serta anggota Mujahids dan Razakars, yang dilengkapi dengan senjata api, Rifle, set gun, granat dan bahan peledak. Mereka maju dan melanggar garis gencatan senjata. India sangat terkejut dengan serangan tersebut dan segera membalas serangan itu secara ofensif.

Bagian ketiga adalah pertempuran di Chamb. Sementara India sedang sibuk melawan pasukan Pakistan yang menyerang wilayah Jammu Kashmir, ternyata Pakistan sudah melakukan penyerangan terhadap Chamb. Operasi itu disebut Grand Chamb, yang dimulai pada tanggal 1 September 1965. Bagi India, Chamb adalah tempat yang penting, karena letaknya dekat dengan Pakistan Barat. India dapat langsung menyerang bagian vital Pakistan melalui tempat tersebut. Serangan Pakistan dimulai dengan menyerang pos-pos penjagaan India. Pakistan terus bergerak maju dengan menggunakan persenjataan yang lebih canggih dibandingkan dengan India. Sehingga India banyak menderita kerugian, antara lain 246 personil tewas, 871 luka-luka, 240 hilang dan 15 tank hancur.

Bagian keempat dari operasi tahun 1965 adalah operasi yang dilakukan oleh Corps XI. Jenderal Harbakh Singh, Panglima Daerah Militer

bagian Barat India memerintahkan suatu serangan balik terhadap Pakistan. Operasi Corps XI dimulai dari Utara melalui jalan yang menghubungkan Amritsar dan Lahore. Pakistan mengirimkan dua divisi infantri (Divisi infantri X dan XI) untuk melawan Corps XI milik India dan merebut Lahore.

Corps XI terdiri dari Divisi Infantri 15, Divisi Infantri 7, Divisi Pegunungan 4, satu brigade Armour. Dengan operasi itu India berusaha untuk menguasai terusan Khogil. Markas pasukan Pakistan di Wagah berhasil dikuasai oleh India. Pakistan sangat terkejut oleh serangan yang besar dan mendadak itu, bahkan Pakistan mengalami kerugian.

Bagian kelima meliputi operasi Divisi Pegunungan 4 (India) yang terletak di Ambala. Mereka bergerak ke Valtoha, sebelah Utara Khem Karan, sekitar 320 km. Divisi Pegunungan 4 memulai serangan pada tanggal 6 September 1965. Pasukan India mendapat serangan balik dari Pakistan dengan menggunakan tank dan artileri dan tidak memberi kesempatan kepada pasukan India untuk bertahan, Khem Karan berhasil direbut oleh Pakistan. Divisi Pegunungan 4 diperkuat dengan penambahan pasukan yaitu brigade 29 dan brigade pegunungan 41. Akhirnya mereka berhasil menguasai 140 mil² wilayah Pakistan.

Bagian terakhir dari operasi itu adalah operasi yang dilakukan oleh Corps I (India). Operasi ini dilatar belakangi oleh keinginan membalas dendam kepada Pakistan atas serangannya di Jammu Kashmir dan Chamb, juga untuk membebaskan Akhnur. Corps I melancarkan serangannya pada tanggal 7 September 1965. Corps itu terdiri dari Brigif 162 dan Brigif 168 yang menguasai jalan Jammu – Sialkot. Divisi pegunungan 6 menyerang daerah Charwa – Maharajke, di sini pasukan Pakistan dapat memukul mundur pasukan India. Pertempuran terus terjadi antara lain di Phillora dan Chandhiwa. Corps I akhirnya dapat menguasai 180 mil² wilayah Pakistan. Perang antara Pakistan dan India tahun 1965 akhirnya dapat diselesaikan dengan bantuan PBB yang menyerukan kepada keduanya untuk melakukan

gencatan senjata. Bentrokan senjata diantara mereka baru berakhir pada Januari 1966 setelah melakukan perundingan di Tashkent, Uni Soviet, dimana USSR sebagai penengahnya.⁴⁶

2.3.3 Perang Pakistan dan India Tahun 1971

Perang antara Pakistan dan India pada tahun 1971 ini berhubungan dengan pendirian negara Bangladesh. Pakistan terdiri dari dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang terpisah sepanjang 1600 mil. Mereka berbeda dari segi bahasa, budaya, makanan, pakaian dan lain-lain. Penduduk Pakistan Timur merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah yang didominasi oleh penduduk Pakistan Barat. Karena hal itu penduduk Pakistan Timur kemudian memberontak kepada pemerintah Pakistan dan ingin mendirikan negara sendiri yang disebut Bangladesh.

Menanggapi hal tersebut, Pakistan dibawah Jenderal Tikka Khan memulai penumpasan brutal terhadap pemberontak. Pemberontak itu kemudian meminta bantuan India untuk menghadapi serangan Jenderal Tikka Khan dan memberikan tempat berlindung kepada pengungsi Pakistan Timur.

Perang antara Pakistan dengan India secara resmi dimulai pada tanggal 3 Desember 1971. Ketika itu Pakistan marah kepada India, karena India membantu pemberontak. Angkatan Darat Pakistan menyerang India di perbatasan Jammu Kashmir dan Punjab. Kepala Staff Angkatan Darat India, Jenderal Manekshaw, mengeluarkan suatu perintah untuk menahan serangan Pakistan di Jammu Kashmir dan Punjab. Ia juga memerintahkan kepada komando daerah militer Timur untuk melakukan serangan kepada Pakistan guna membantu penduduk Bangladesh.

⁴⁶ Grollier Inc. encyclopedia of knowledge, Grollier Inc, Danbury Conecticut, 1990

Corps 33 India dibawah Jenderal Thapan menyerang dari Utara dan Divisi Pegunungan 20 menjaga keamanan Corps 33. Kekuatan Corps 33 terdiri dari lima brigade dan 3000 pasukan dari sektor tersebut. Pasukan India ini berhasil menguasai daerah sebelah Barat sungai Jamuna, kemudian Rangpur, Bogra dan Nator, sehingga pasukan Pakistan terkepung.

Operasi Corps 2 India di daerah Barat Daya Bangladesh dipimpin oleh Letjend Raina. Di daerah ini terdapat aliran sungai Jamuna yang memisahkan daerah ini dengan Dacca. Akan tetapi di sini sudah terdapat jalan yang baik serta jalur kereta api. Komando daerah militer Timur merupakan penyuplai senjata dan peralatan lainnya bagi Corps 2. Selain operasi Corps 2 terdapat pula operasi yang dilakukan oleh Divisi Pegunungan 4 yang dipimpin oleh Mayjend Barar. Divisi Pegunungan 4 bergerak di daerah antara sungai Padma dan Jibban Nagar. Divisi Infanteri 9 dibawah Mayjend Dalbir Singh bergerak di daerah Jessore – Khulna. Pasukan Pakistan semakin terdesak, dan pada tanggal 10 Desember 1971, Komandan sektor Dacca memerintahkan penarikan mundur pasukan Pakistan dari wilayah Jamalpur dan Mymensingh, tetapi terlambat, sehingga pasukan Pakistan terkepung oleh pasukan India.

Corps 4 bertugas melakukan operasi di daerah bagian Timur Bangladesh. Jenderal Nianzi, panglima perang Pakistan, menahan serangan India itu dengan dua divisi. Dia merasa dalam posisi yang sangat berbahaya, karena sebagian besar pasukannya telah terjebak dalam serangan Corps 33 dan Corps 2 India. Corps 4 memiliki tiga divisi, yaitu Divisi 8 yang bertugas untuk menguasai Saidpur dan Sherpur, Divisi 57 yang bertugas menguasai Daudkandi dan Chanpurdan ditugaskan pada Divisi 23, serta satu batalyon sektor Kilo dan Bengal Timur. Pakistan merasa kewalahan menghadapi serangan India.

Disamping pertempuran tersebut, Pakistan dan India juga terlibat dalam pertempuran di Tapal Batas Barat. Komandan daerah militer India

bagian Barat dan bagian Selatan terlibat perang dengan Pakistan. Pertempuran tersebut terutama terjadi di Jammu Kashmir dan Rajasthan.

Pakistan berusaha untuk menguasai Jammu Kashmir melalui Poonch, Kargil dan Chamb. Dari daerah ini Pakistan dapat dengan leluasa melancarkan serangannya ke daerah Jammu Kashmir. India melawan serangan itu dan melancarkan serangan balasan yang membuat Pakistan gagal untuk menguasai Jammu Kashmir dan Rajasthan.⁴⁷ Demikianlah akhirnya, dalam perang antara Pakistan dan India pada tahun 1971 Pakistan mengalami kekalahan dan ia harus merelakan sebagian dari wilayahnya untuk memisahkan diri dari kekuasaannya dan mendirikan negara baru yang disebut Bangladesh.

Akhir perang terbuka antara Pakistan dan India pada tahun 1971 ditandai dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Simla antara Pakistan dan India oleh Presiden Zulfikar Ali Bhutto dan PM India Indira Gandhi. Perjanjian Simla tersebut berisi kesepakatan antara Pakistan dan India untuk mengakhiri konflik diantara kedua negara tersebut dan menjalin hubungan yang harmonis, menciptakan perdamaian di sub kontinen. Masing-masing negara mencegah timbulnya propaganda yang akan memecah belah mereka, serta memperbaiki sistem komunikasi dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan kerjasama pada bidang lain antara mereka, mengadakan dialog untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka India harus menarik pasukannya dari wilayah perbatasan. Di Kashmir, *Line of Control* yang dihasilkan pada saat gencatan senjata pada tanggal 11 Desember 1972, harus dihormati oleh kedua belah pihak. Mereka menyepakati untuk mengadakan pertemuan oleh kedua belah pihak untuk membicarakan masalah perdamaian dan normalisasi hubungan antara keduanya, meliputi pengembalian tahanan

⁴⁷ Rajendra Nath. Op. Cit. Hal. 531.

perang, penyelesaian masalah Jammu Kashmir dan pembukaan hubungan diplomatik.⁴⁸



⁴⁸ Salmand Khursyid, *Beyond The Terrorissm, New Hope for Kashmir*, UBS Publisher, Bombay, 1995. Hal. 185.



BAB III

KETERLIBATAN PAKISTAN DALAM KONFLIK KASHMIR

3.1 Keterlibatan Pakistan Tahun 1947

Konflik Kashmir tidak terlepas dari masalah pembagian wilayah antara Pakistan dan India pada waktu terbentuknya negara Pakistan dan India pada tahun 1947 melalui peristiwa *partition* ketika mendapat kemerdekaan dari Inggris. Pada umumnya proses penggabungan itu berjalan dengan lancar kecuali tiga daerah, yaitu Hyderabad, Junagadh dan Kashmir. Hyderabad adalah sebuah swapraja terbesar di India dengan penduduk waktu itu 16 juta jiwa dengan 15 % beragama Islam dan 85 % beragama Hindu.⁴⁹ Tetapi pemerintahan Hyderabad adalah seorang Muslim (Nizam Hyderabad). Pemerintah berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan tidak bergabung dengan Pakistan atau India. Tetapi India mengirimkan pasukannya ke Hyderabad dan memaksa bergabung dengan India. Hal ini tentu saja tidak menyenangkan Pakistan dan memprotes hal tersebut kepada PBB. Tetapi penggabungan Hyderabad dengan India terus berjalan. Akhirnya Hyderabad menjadi bagian dari negara India.

Junagadh merupakan swapraja yang kecil terletak di Kathiwar, tanah semenanjung Bombay.⁵⁰ Penduduknya 800 ribu jiwa dimana 80 % beragama Hindu dan 20 % beragama Islam dengan penguasanya seorang Muslim (Nawab).⁵¹ Pada Juli 1947, Nawab memilih bergabung dengan Pakistan tanpa memperhatikan keinginan rakyatnya dan seterusnya meninggalkan negeri dan kerabatnya. Kekacauan timbul oleh karena dewan pemerintahan yang ada tidak bisa mengatasinya, maka mereka meminta bantuan India

⁴⁹ Dr. T. S. G. Mulia, *Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, Hal. 267.

⁵⁰ Ibid. Hal. 266.

⁵¹ S.M. Burke, *Pakistan Foreign Policy, An Historical Analysis*, LIPI, Jakarta, 1990, Hal. 17.

dengan mengirimkan tentaranya. Negara India setuju dengan syarat secepat mungkin diadakan plebisit yang akan menentukan suara rakyat. Pada bulan Februari 1948 plebisit dilakukan dengan menunjukkan bahwa seluruh rakyat Junagadh setuju dengan penggabungan dalam negara India, kecuali beberapa suara saja.⁵² Pakistan memprotes tindakan India dan ternyata penggabungan berjalan terus.

Kashmir ditinjau dari segi geografis dan ekonomis merupakan kesatuan dengan Pakistan apalagi penduduknya mayoritas beragama Islam. Dengan adanya *India Independence Act*, Kashmir dapat menentukan pilihan apakah bergabung dengan Pakistan, bergabung dengan India atau merdeka. Hal tersebut membuat Maharaja Harri Singh mempunyai kedudukan yang absolut, yaitu ia dapat membuat keputusan – keputusan untuk hubungan masa depan Kashmir dengan Pakistan dan India. Ia dapat memutuskan untuk bergabung dengan Pakistan atau India atau dapat memutuskan menjadi negara yang *independent*. Akan tetapi para penguasa baik di Pakistan maupun di India, tetap diizinkan untuk terus mendominasi Kashmir, dengan pertimbangan alasan geografis dan isu-isu etnis.⁵³

Sebelum Maharaja menentukan pilihan dengan negara mana ia akan menggabungkan diri setelah penyerahan kedaulatan kepada Pakistan atau India di bulan Oktober 1947, negerinya diserang dan dimasuki oleh bangsa Afridi yang berdiam di daerah perbatasan Kashmir dan beragama Islam. Mereka menyerang secara teratur dengan mempergunakan senjata lengkap, sehingga tuduhan India, mereka diajak dan dibantu oleh pemerintah Pakistan yang hendak menduduki dan akhirnya menarik Kashmir ke dalam negaranya. Di samping itu juga adanya kebijaksanaan yang dilakukan India terhadap Pakistan banyak merugikan perekonomian Kashmir. Hal ini terlihat, misalnya

⁵² Dr. T.S.G. Mulia, Op. Cit., Hal. 266.

⁵³ Kompas. 04 Agustus 1998.

ketidaklancaran dalam komunikasi, angkutan darat dan beberapa penghentian suplai bahan makanan dan minyak ke Kashmir. Akibatnya menimbulkan gejolak sosial di beberapa daerah. Penguasa Kashmir juga khawatir akan pecah perang suku. Sehingga pada tanggal 26 Oktober 1947 Maharaja Harri Singh menyatakan dengan resmi bahwa ia menggabungkan diri dengan India dengan menandatangani *Instrument of Accession*. Kashmir dengan terus terang meminta bantuan militer untuk melindungi diri terhadap serangan suku Afridi dan Pakistan.⁵⁴ Maharaja Harri Singh memberi jalan bagi masuknya tentara India.

Menurut *Instrument of Accession* tersebut, Kashmir untuk sementara menjadi bagian Union India dan menunda pelaksanaan plebisit bebas dan jujur (yang dimaksudkan memberi kebebasan kepada rakyat untuk bergabung dengan Pakistan, bergabung dengan India atau merdeka).⁵⁵ Namun bagi India, India merasa memperoleh mandat (walau itu bersyarat : sementara) untuk berkuasa di Kashmir.

Gubernur Jenderal Lord Mountbatten menerima surat dari Maharaja yang isinya pernyataan bahwa : berdasarkan kondisi-kondisi yang kami miliki dan dalam keadaan darurat, terpaksa kami meminta bantuan dari pemerintah India. Bantuan ini berupa peralatan perang, serta suplai bahan makanan dan minyak ke Kashmir. Untuk melaksanakan bantuan tersebut menurut Lord Mountbatten, melalui beberapa persyaratan. Persyaratan bantuan tersebut sungguh-sungguh harus didasarkan untuk kepentingan rakyat dan pemerintahannya. Di samping itu Kashmir harus memperbaharui undang-undang dan peraturan di Kashmir, serta wilayahnya bebas dari penyerbuan.

Saat itu India mengirimkan sejumlah pasukannya ke *front* Srinagar untuk memperkuat angkatan bersenjata sang Maharaja. Hingga akhir

⁵⁴ Dr. T.S.G. Mulia, Op.Cit., Hal. 290.

⁵⁵ Kompas. 04 Agustus 1998.

Oktober mereka telah bergerak sejauh 29 km (18 mil) dari ibukota negara. Sementara itu kaum pemberontak mendirikan suatu *Provisional Government of Azad (Free) Kashmir* , yang dipimpin oleh Sardar Mohamad Ibrahim, yang bertindak sebagai ketua Konferensi Islam dan juga yang pro terhadap Pakistan.

Pakistan memprotes tindakan India yang menggabungkan Kashmir dengan India. Tetapi India bersikeras dengan mengatakan bahwa menurut hukum, dengan bergabungnya Kashmir dengan India, maka Kashmir telah menjadi bagian dari India.⁵⁶ Sementara itu pada tanggal 1 Januari 1948 India mengajukan dakwaan pada Dewan Keamanan PBB, dimana Pakistan dituduh membantu bangsa Afridi untuk menyerang Kashmir dengan terang-terangan. Serangan itu dipandang sebagai agresi yang mungkin membahayakan perdamaian.⁵⁷ Pakistan tidak mengakui hubungan Kashmir dengan India dan menolak tuduhan India tersebut dan sebaliknya menuduh India melanggar perbatasan. Pakistan tidak menerima penggabungan itu karena dilakukan oleh India secara tidak jujur dan bertentangan dengan kemauan sebagian besar rakyat Kashmir. India juga dituduh telah merampas kedaulatan Pakistan atas Junagadh yang juga menurut hukum adalah bagian dari Pakistan.⁵⁸

Perseteruan kian tajam setelah berdasarkan konstitusi baru, India memasukkan Kashmir ke dalam Uni India. Kebijakan ini bertentangan dengan resolusi PBB dan ketentuan dalam *Instrument of Accession* : pelaksanaan plebisit secara bebas, adil, dan jujur di Kashmir. Tetapi kenyataannya, India mendirikan pemerintahan boneka di Kashmir di bawah pimpinan Bakshi Ghulam Mohammed.⁵⁹ Pemerintah ini dibentuk tanpa

⁵⁶ Pelita, 12 Februari 1990.

⁵⁷ Dr. T.S.G. Mulia, Op. Cit., Hal. 271.

⁵⁸ Pelita, 12 Februari 1990.

⁵⁹ Kompas. 04 Agustus 1998.

dikonsultasikan apakah rakyat bersedia atau tidak. Sejak saat itu, ketegangan antara Pakistan dan India bukannya menyusut tetapi malah meningkat.

Hal ini juga disebabkan oleh Inggris yang kurang bertanggung jawab terhadap negara bekas jajahannya dengan membiarkan mereka menyelesaikan sendiri, dimana Inggris melepaskan begitu saja. Sehingga timbul konflik perebutan wilayah antara Pakistan dan India antara lain wilayah Kashmir.

Dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada, Dewan Keamanan PBB pada Juli 1948 mengangkat suatu panitia dengan nama UNCIP (*United Nation Comission for India and Pakistan*) yang bertugas menyelidiki dan memberi perantara mengenai sengketa Kashmir. Pada tanggal 13 Agustus 1948 diterima suatu resolusi yang isinya :

1. Penghentian tembak-menembak di Kashmir dan menetapkan garis batas demarkasi.
2. Demiliterisasi Kashmir
3. Plebisit yang bebas di bawah pengawasan PBB untuk mengetahui keinginan rakyat Kashmir, apakah akan bergabung dengan Pakistan, bergabung dengan India atau merdeka.

Gencatan senjata dan penentuan garis demarkasi mulai berlaku 1 Januari 1949. Mengenai demiliterisasi dan plebisit timbul perbedaan pendapat yang tajam sehingga UNCIP tidak bisa melaksanakan tugasnya. India keberatan menarik pasukannya dan keberatan memberikan kuasa kepada PBB untuk mengawasi plebisit. Dengan demikian terkatung-katunglah persengketaan antara Pakistan dan India. Sayang PBB tidak berdaya menghadapi India guna melaksanakan resolusi komisi PBB tersebut. Dengan tidak terlaksananya plebisit maka timbul kerusuhan-kerusuhan yang menuntut untuk melepaskan diri dari India.

Peristiwa yang terjadi diatas merupakan rasa ketidakrelaan Pakistan terhadap hasil pembagian atau penggabungan wilayah-wilayah tersebut. Pakistan tidak bisa menerima tindakan India terhadap wilayah-wilayah yang bergabung dengan India terlebih lagi wilayah Jammu Kashmir. Tahun 1947 yang mana awal konflik Kashmir terjadi, Pakistan telah terlibat di dalamnya. Bagi Pakistan tindakan yang dilakukan India sudah melanggar kesepakatan kedua negara. Meski serangan bangsa Afridi yang menurut persepsi India di dukung oleh Pakistan tidak diakui oleh Pakistan sendiri, sedikit banyak terlihat bahwa ada dukungan moral dari Pakistan karena bangsa Afridi juga beragama Islam yang mana Pakistan akan mendukung apabila Kashmir dimasukkan dalam Pakistan yang juga beragama Islam.

Pakistan memegang prinsip, mereka masuk karena sesuai dengan keinginan rakyat yang mayoritas Muslim. Sebaliknya, India masuk karena memegang sikap pemimpin Kashmir yang berpihak pada India. Apalagi penguasa Kashmir menegaskan sikap untuk bergabung dengan India lewat perjanjian penggabungan pada tanggal 26 Oktober 1947.⁶⁰ Pakistan menentang perjanjian itu karena dianggap melanggar prinsip dasar bahwa agama yang menentukan pemisahan Pakistan dan India. Kashmir yang beragama Islam seharusnya masuk Pakistan. Sebaliknya India sejak awal menganut paham sekuler, memisahkan urusan agama dan negara, dan mengakui semua agama termasuk Islam.

3.2 Kerjasama Pakistan dengan Amerika Serikat

Pakistan dan India masih memperebutkan wilayah Jammu Kashmir hingga kini. Bagi Pakistan, India merupakan ancaman utama, sementara kekuatan militer India jauh lebih besar daripada yang dimiliki Pakistan. Pada

⁶⁰ Kompas. 06 Juli 1999.

tahun 1981 Presiden Pakistan Zia Ul Haq mengakui 80% angkatan bersenjata Pakistan telah digelar di perbatasan Pakistan dan India.

Dengan bantuan Amerika Serikat, Pakistan dapat mengurangi beban ekonomi yang sedang ditanggungnya. Pakistan menerima peralatan militer yang canggih yang dapat dipergunakan untuk memperkuat pertahanan Pakistan dalam menghadapi Afghanistan (saat itu Pakistan berseteru dengan Afghanistan juga) serta mengimbangi kekuatan India.

Dalam melaksanakan paket bantuan tersebut, maka diadakan perundingan yang intensif antara kedua negara yaitu Pakistan dengan Amerika Serikat. Pakistan diwakili Menteri Luar Negeri, Agha Shahi yang berkunjung ke Washington menyelesaikan masalah perundingan mengenai rencana bantuan itu pada bulan April 1981.⁶¹ Kunjungan ini kemudian segera disusul dengan pengiriman delegasi Pakistan dipimpin oleh pejabat-pejabat militer utama untuk membahas perincian bantuan militer itu. Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Jean J. Kirkpatrick ke Pakistan awal September pada tahun yang sama semakin mengkonkritkan rencana tersebut.

Amerika Serikat telah mempercepat pembuatan pesawat F-16 yang sangat diperlukan oleh Pakistan. Kedua negara bersepakat bahwa pada tahun pertama, mulai pada bulan Oktober 1981, Amerika Serikat akan memberikan seluruhnya US\$ 500 juta. US\$ 100 juta sebagai bantuan ekonomi dan US\$ 400 juta sebagai kredit penjualan peralatan militernya untuk pertahanan Pakistan.⁶² Pada bulan Desember 1981 kedua negara melanjutkan penandatanganan "*A Letter of Offer and Agreement*" yang secara teknisnya dapat diartikan sebagai persetujuan penjualan peralatan militer.⁶³ Dalam persetujuan ini tercakup hal yang paling penting yaitu

⁶¹ Pakistan Horison, Vol. XXXIV, No. 2, 1981.

⁶² Ibid. Hal. 6.

⁶³ Pakistan Horison, Vol. XXXV, No. 1, 1982.

penjualan sebanyak 40 buah pesawat pembom tempur mutakhir F-16 kepada Pakistan. Berdasarkan persetujuannya yang telah disepakati kedua negara itu, keseluruhan persenjataan yang diterima Pakistan meliputi 100 tank M-48, 75 tank APCS, 24 peluncur peluru kendali, 100 helikopter penyerang AH-1, 75 meriam Hewitzer 155 mm, 100 kendaraan artileri, 1000 peluru kendali dan 40 pesawat tempur F-16 ditambah sejumlah peralatan tambahan lain seperti radar-radar otomatis dan peralatan untuk melihat didalam gelap.

Peralatan militer ini oleh Pakistan digunakan untuk menghadapi Afghanistan namun dalam kenyataannya, peralatan militer yang dibeli dari Amerika Serikat tersebut juga digunakan untuk melawan India dalam perebutan wilayah Kashmir. Pada saat itu dua negara adi kuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama berusaha menanamkan ambisinya di Asia Selatan. India merupakan negara yang didukung oleh Uni Soviet, oleh sebab itu sebagai lawan India, Pakistan berupaya mendekati Amerika Serikat guna meningkatkan militernya. Amerika Serikat setuju dalam membantu Pakistan karena Amerika Serikat tidak akan mau dikalahkan oleh Uni Soviet.

Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini semata-mata ingin menanamkan hegemoninya di dunia internasional. Setelah Uni Soviet runtuh, ambisi Amerika Serikat sedikit bergeser. Saat ini pasukan Amerika Serikat di Pakistan bukan sebagai bantuan dalam menghadapi India melainkan sebagai operasi Amerika Serikat dalam membasmi terorisme, dalam hal ini yang dituduh adalah Taliban yang dianggap dalang peristiwa 11 September di WTC. Meskipun demikian, dalam konflik Kashmir, Amerika Serikat condong berpihak kepada Pakistan, sekutu utamanya dalam apa yang disebut perang terhadap terorisme di Afghanistan.⁶⁴

⁶⁴ Kompas. 13 Januari 2002.

Namun oleh India, Pakistan dapat memanfaatkan kehadiran Amerika Serikat untuk menyerang India. Senjata-senjata yang menurut Pakistan digunakan untuk membantu Amerika Serikat dalam membasmi Taliban, ternyata sering dipergunakan dalam membantu militan Kashmir.

3.3 Strategi Militer Pakistan di Kashmir

Ada sebuah desain besar dibalik pelanggaran Pakistan terhadap *Line of Control* (LoC) di Ladakh, region Jammu dan Kashmir. Garis ini ditanda tangani pada tanggal 11 Desember 1972. Pakistan menyadari benar terhadap garis pelurusan LoC saat menjatuhkan pesawat India dan menembakkan tembakan artileri langsung ke dalam posisi-posisi dan jalan-jalan India. Presiden Zia Ul Haq yang mengeluarkan strategi untuk memberontak di Jammu dan Kashmir pada tahun 1985.⁶⁵ Ia bermaksud untuk menginspirasi timbulnya sebuah perlawanan ke India dengan membuka latihan militan-militan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Muslim fundamentalis.

Pemuda Kashmir dibujuk dengan uang dan janji palsu untuk pergi ke Pakistan untuk latihan dan penempatan. Tentara Pakistan dihubungi oleh *Jammu Kashmir Liberation Front* (JKLF) yang setuju untuk bekerjasama dalam kondisi bahwa Kashmir akan diberi kemerdekaan setelah India memutuskan kontrol terhadap negara bagian tersebut. Tentara Pakistan memberikan perlawanan terbaik terhadap India namun Pakistan kembali pada komitmennya semula yaitu menyatukan Kashmir dengan Azad Kashmir.⁶⁶

Operasi kontrol terhadap anti India melalui elemen pro Pakistan membuat gerakan pro Islami dan menegakkan slogan jalan masuk Kashmir

⁶⁵ Maj. Gen. Ashok Krishna, *Pakistan Army's Strategy in Kashmir*, Dalam www.ipcs.org.

⁶⁶ Ibid.

untuk Pakistan. Pemuda Kashmir melihat kebohongan Pakistan dan ketidakseketuan mereka dari hal tersebut. Penduduk Jammu dan Kashmir yang menerobos adalah mereka yang selalu disertai dengan semangat Kashmiriat (yaitu pandangan sekuler dan kurangnya fanatisme agama) yang mampu mengalahkan rencana Pakistan. Hingga tahun 1997 situasi terkontrol dengan baik yang memungkinkan pemerintah India untuk melaksanakan pemilu.

Pada Mei 1998 terlihat uji coba-uji coba nuklir dan hal ini menekankan kepada kedua negara baik Pakistan maupun India untuk tidak menaikkan suhu ketegangan. Beberapa analisis pertahanan India mempercayai bahwa senjata-senjata nuklir akan menghindarkan sebuah perang konvensional dan mengantarkan pada pembentukan isu-isu Jammu dan Kashmir selama ada LoC. Sekitar tahun 1997-1999, Pakistan melihat jelas bahwa penduduk Jammu dan Kashmir di India 10 % murni berharap untuk bergabung dengan Pakistan dan sisanya memilih untuk otonomi. Situasi terburuk pada era POK (*Pakistan Occupied Kashmir*) adalah setelah kebebasan politik dan ekonomi mereka diambil selama 50 tahun dan mereka ingin lepas dari hal itu.⁶⁷

Demikianlah Pakistan harus melakukan suatu hal secepatnya untuk mengatasi situasi. Konsekuensinya yaitu diubah ke pendekatan militer. Esensi dari strategi ini adalah menggunakan tentara Pakistan untuk menempati dataran tinggi yang penting di wilayah Dras-Kargil-Batalik-Turtok dengan demikian memotong Divisi Ladakh dan Brigade Siachen. Hal ini sudah diperhitungkan bahwa situasi terkritis adalah melawan tentara India dan menghindarkan pasukan dari lembah dan tempat lainnya dalam Jammu dan Kashmir untuk menghadapi tantangan tersebut. Hal ini memungkinkan Pakistan untuk menempatkan 2000 sampai 3000 orang sewaan seluruh

⁶⁷ Ibid.

Jammu dan Kashmir dan mencambuk semangat besar pemberontakan. Kesuksesan tersebut akan memberi semangat pada tentara Pakistan untuk melanggar LoC di *point* lain. Selebihnya adalah merenggangkan kekuatan keamanan India yang tidak mampu merintangi dua invasi garpu ini yang akan berlanjut pada kehilangan kontrol dan akhirnya Pakistan mampu menjadikan Jammu dan Kashmir sebagai isu internasional.

Staf Jenderal Pakistan tidak mengantisipasi respon keras India yang terutama menggunakan kekuatan udara yang tentu saja tidak dalam dataran tinggi yang paling atas dimana India menghendaki untuk mengusir pengganggu. Nawaz Sharif sebenarnya terlalu percaya diri, akan tetapi ia sendiri tidak dapat mengembalikan kepemimpinannya sebagai keamanan nasional di Pakistan yaitu satu-satunya pelindung tentara Pakistan. Pelanggaran tersebut tidak dapat diterima oleh pihak oposisi, sehingga ada kontra di antara partai oposisi dengan pemerintah. Keduanya tidak dapat disatukan.

LoC mungkin tidak terlanggar di point-point yang lain dalam penjagaan perbatasan di operasi wilayah konflik yang ada. Namun bagaimanapun juga, hal ini memiliki bentuk gangguan yang penting dimana akan memalukan bagi tentara Pakistan untuk menarik kembali menyeberang LoC. Oleh karena itu Pakistan tidak mengenal kompromi dalam perundingan Delhi. Penerobosan akan terus berlanjut dan perang akan berjalan seutuhnya. India akan kesulitan untuk mempercayai kembali Pakistan. Tentara India keluar dengan pesawat-pesawatnya dimana sebelumnya telah latihan secara luar biasa untuk penahanan dalam menjaga lokasi konflik. Meski Pakistan mendapat dukungan sedikit dari luar negeri untuk bencana ini, isu Jammu Kashmir telah menjadi isu internasional. Hal ini akan berlangsung tidak lama sebelum kekuatan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mulai mengumumkan mereka tidak dapat diam begitu saja menjadi penonton.

3.4 Dukungan Pakistan Terhadap Militan di Kashmir

Sejak Pakistan terpisah dari India, Pakistan berupaya menguasai Kashmir. Pakistan merasa bahwa kesamaan agama yaitu Islam menyebabkan Kashmir semestinya tergabung dalam Pakistan. Namun Maharaja Harri Singh justru menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan India. Masyarakat Kashmir sendiri memiliki keinginan untuk berdiri menjadi negara yang bukan bagian dari Pakistan maupun India atau setidaknya tergabung dengan Pakistan yang dinilai lebih dekat dengan Kashmir baik secara sosial budaya maupun agama.

Tergabungnya Kashmir dengan India ini mengakibatkan terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan Muslim Kashmir. Kelompok-kelompok militan Muslim Kashmir ini menginginkan Kashmir lepas dari India dan merdeka dari pemerintahan India yang mayoritas beragama Hindu. Kedudukan Muslim Kashmir selama di bawah pemerintahan India selalu kalah dengan kaum Hindu yang mendominasi seluruh kehidupan negara India baik dalam kehidupan sehari-hari maupun politik.

Hak asasi manusia kaum Muslim Kashmir sering tertindas. Hal inilah yang menjadikan Pakistan tidak bisa tinggal diam. Pakistan berupaya menjadikan Kashmir sebagai isu internasional dimana India telah melanggar hak asasi manusia kaum Muslim Kashmir. Dengan demikian dunia internasional tidak akan membiarkannya begitu saja. Pakistan berharap India mau berdialog atas masalah Kashmir dengan dimediasi negara lain yang ditunjuk oleh organisasi internasional seperti PBB. Namun India tidak mau menerima usulan tersebut dengan alasan bahwa masalah Kashmir adalah masalah internal yang cukup diselesaikan secara bilateral tanpa mengikutsertakan pihak ketiga.

Kedua negara yang bertikai tersebut sama-sama mempertahankan pendiriannya. Sehingga para militan Kashmir tetap melancarkan

pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah India. Aksi penyerangan terhadap tentara India seringkali dilakukan oleh mereka para militan Kashmir. India menuduh bahwa penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh kelompok militan Muslim Kashmir ini didukung oleh Pakistan. Pakistan tidak mengakui bahwa negaranya telah mensponsori kelompok militan tersebut. Namun kenyataannya Pakistan mendukung perjuangan kelompok militan Muslim Kashmir untuk lepas dari pemerintah India. Pakistan secara terang-terangan mendukung setiap gerakan yang dilakukan kelompok militan Kashmir sebab Pakistan menganggap pemberontakan tersebut adalah perjuangan mereka untuk kemerdekaan wilayahnya.

Dalam bentrokan bersenjata yang terjadi pada tahun 2002 ini, Presiden Pervez Musharraf juga menunjukkan sikap yang mendukung terhadap para militan Muslim Kashmir ini. Hal tersebut memberikan semangat bagi kelompok-kelompok militan Kashmir. Menurut Abbas Ansari, anggota eksekutif partai aliansi separatis *All Party Hurriyat Conference*, bahwa sikap dan niat Presiden Pervez Musharraf yang mendukung gerakan mereka akan disambut baik oleh mereka.⁶⁸ Begitu pula dengan Jamel Ahmed, juru bicara kelompok militan Jamiat-ul-Mujahedin di Kashmir, menyatakan terima kasih kepada Presiden Pervez Musharraf atas janjinya untuk mendukung perjuangan mereka di Kashmir. Bahkan menurutnya, apabila Pakistan dan India benar-benar terlibat perang, kelompoknya akan berjuang di pihak Pakistan⁶⁹. Ternyata Pakistan memperoleh imbalan yang sepadan atas pemberian dukungannya terhadap kelompok militan Muslim Kashmir yang berupa dukungan moril maupun materi.

⁶⁸ Jawa Pos, 29 Mei 2002

⁶⁹ Ibid.

BAB V
KESIMPULAN



Kemerdekaan India dari Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947 telah menimbulkan dua negara baru yang merdeka, yaitu Pakistan dan India. Kemerdekaan itu ternyata telah membawa dampak berupa timbulnya konflik antara Pakistan dengan India mengenai Kashmir. Sejak masa kemerdekaan tersebut, Pakistan dan India telah terlibat dalam tiga kali perang terbuka karena daerah Kashmir, yaitu pada tahun 1947, tahun 1965 dan tahun 1971. Hingga saat ini konflik tersebut belum terselesaikan dan terus terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata yang merugikan bagi pihak Pakistan maupun India.

Konflik Kashmir selalu menjadi ganjalan setiap bentuk hubungan antara Pakistan dan India. Hal ini terjadi karena Pakistan dan India memiliki dasar yang berbeda yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah Kashmir. India menginginkan masalah Kashmir diselesaikan secara bilateral antara Pakistan dengan India dengan semangat Perjanjian Simla tahun 1972. India tidak menginginkan adanya pihak ketiga yang turut dalam penyelesaian masalah Kashmir tersebut. Bahkan bagi India, sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari kekuasaan India atas Kashmir. India merasa sah memiliki Kashmir berdasarkan perjanjian penggabungan Kashmir kepada India oleh Maharaja Harri Singh yang memerintah Kashmir saat itu dengan menandatangani *Instrument of Accession*. India menolak usulan Pakistan untuk mengadakan plebisit di wilayah Kashmir karena bagi India, Kashmir adalah milik India secara sah dan sesuai dengan hukum.

Dasar pemikiran India itu berbeda dengan Pakistan. Pakistan menginginkan diadakannya plebisit di wilayah Kashmir berdasar pada Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 5 Januari 1949 untuk menentukan apakah rakyat Kashmir ingin bergabung dengan Pakistan,

bergabung dengan India atau merdeka mendirikan negara sendiri. Pakistan juga menghendaki adanya pihak ketiga yang akan menjembatani pembicaraan yang dilakukan oleh Pakistan dan India. Keinginan tersebut diwujudkan dengan usaha Pakistan untuk menginternasionalkan masalah Kashmir.

Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB memiliki syarat tertentu. Syarat tersebut adalah pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tertanggal 13 Agustus 1948. Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 13 Agustus 1948 disebutkan bahwa pasukan Pakistan harus ditarik mundur dari seluruh wilayah Kashmir dan menyerukan kepada India untuk menjamin keamanan, keselamatan serta hak-hak rakyat Kashmir.

Apabila dilihat kenyataan yang terjadi saat ini, kondisi yang ada tidak memenuhi syarat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB. Pasukan Pakistan saat ini belum ditarik dari wilayah Kashmir karena Pakistan saat ini menguasai sepertiga wilayah Kashmir yang disebut Azad Kashmir. Disisi lain India-pun belum menjamin hak-hak dan keselamatan rakyat Kashmir dengan adanya penindasan yang terjadi di Kashmir.

Perbedaan dasar pemikiran tersebut menyebabkan masalah Kashmir berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Kedua belah pihak tidak memperoleh titik temu yang dapat membawa kemajuan di Kashmir. Sebenarnya masalah Kashmir adalah masalah internasional yang amat banyak melibatkan prasangka dan rasa curiga. Antagonisme dan tak adanya sikap saling percaya telah menghalangi setiap langkah ke arah penyelesaian.

Secara historis, rasa curiga dan prasangka ini merupakan warisan penguasa Inggris yang membagi kawasan anak benua itu secara tak seimbang dan tergesa-gesa. Inggris meninggalkan berbagai persoalan yang belum sempat diselesaikan, termasuk yang berkaitan dengan aset, militer dan penguasa dari kerajaan-kerajaan (negara bagian) yang ditinggalkan. Isu -isu menggantung ini melahirkan masalah-masalah teritorial yang rumit.

Berbagai masalah yang berhubungan dengan pengalihan kekuasaan muncul karena Inggris mencoba melakukan tiga hal sekaligus : menguasai, mengalihkan kekuasaan serta membagi wilayah secara terburu-buru. Karenanya negara-negara bagian tak memiliki cukup kesempatan membuat berbagai keputusan yang baik. Kondisi yang ada juga tak memberi cukup waktu bagi para penguasanya untuk segera melanjutkan kekuasaan Inggris secara efektif.

Akhirnya masalah Kashmir yang berlarut-larut tersebut membawa dampak bagi hubungan antara Pakistan dan India. Pakistan terus-menerus melibatkan diri dalam konflik Kashmir baik dengan cara menginternasionalkan isu Kashmir agar dunia internasional menekan India untuk mau berunding dengan Pakistan, maupun mendukung perjuangan militan-militan Muslim yang ingin lepas dari India. Dengan keterlibatan Pakistan dalam konflik Kashmir ini menyebabkan hubungan kedua negara bertetangga tersebut tidak harmonis dan semakin buruk. Hal ini mengakibatkan baik Pakistan maupun India saling mengembangkan pertahanan keamanan militernya dan kian meningkat pada perlombaan senjata nuklir.

Mekipun mendapat kecaman dari masyarakat internasional bahkan mendapatkan sanksi ekonomi, kedua negara ini tidak mpedulkannya. Justru baik Pakistan maupun India dengan bangga menyatakan bahwa saat ini mereka adalah negara nuklir yang tidak dapat diremehkan oleh negara manapun. Pasukan kedua negara ini masih terus siaga di perbatasan dan sering terlibat dalam bentrokan bersenjata.

Melihat kerasnya pendirian kedua negara tersebut terhadap konflik Kashmir maka masalah ini belum akan selesai. Konflik Kashmir akan selalu menjadi ganjalan bagi hubungan Pakistan dan India. Bahkan kondisi saat ini akan lebih berbahaya karena kedua negara tersebut telah memiliki senjata nuklir. Kedua negara tersebut harus memegang janjinya untuk tidak

menggunakan senjata nuklir dalam persengketaan wilayah Kashmir karena tidak hanya akan membahayakan kedua negara tersebut melainkan negara-negara lainnya juga.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmed, A. S. 1997. *Living Islam*. Bandung: Mizan.
- Burke, S. M. 1990. *Pakistan Foreign Policy, An Historical Analysis*. Jakarta: LIPI.
- Dani, G. G. M. 1981. *Nuclear India, A Technological Assesement*. New Delhi: P. K. S. Namboodiri Vision Books Inc.
- Gie, T. L. 1974. *Ilmu Politik*, Yogyakarta: FISIP UGM.
- Hadi, S. 1986. *Metodologi Reseach Field Study Thesis and Disertasi*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Jones, W. S. 1993. *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia Jilid 2*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum.
- Kausik, M. 1986. *Pakistan 's Nuclear Bomb*. New Delhi: Sophan Publishing House.
- Khursyid, S. 1995. *Beyond The Terorism, New Hope for Kashmir*. Bombay: UBS Publisher.
- Mas'oed, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.
- Mulia, T. S.G. 1952. *Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Naim, S. 1990. *Hubungan India - Pakistan Pada Era Meredanya Ketegangan Negara Adi Kuasa*. Padang: IKIP Padang.
- Nasution, D. 1989. *Politik Internasional, Konsep dan Teori*, Jakarta: Erlangga.
- Nath, R. 1990. *Military Leadership In India*. New Delhi: PVSM Lancer Books.
- Plano, J. C. Robert E. Riggs dan H. S. Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: CV. Rajawali.

- Surachmad, W. 1975. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Victor, C. 1990. India, *The Security Dilema*. New Delhi: Patriot Publisher.
- Yin, Robert K. 1998. *Studi Kasus : Desain dan Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Buku Tahunan

- Laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia di India Tahun 1996 / 1997.
- Stockholm International Peace Reseach Institute. 1995. *Armements, Disarmements and International Security 1994 Yearbook*. London: Oxford University Press.
- 1999. *Armements, Disarmements and International Security 1998 Yearbook*. London: Oxford University Press.
- 2000. *Armements, Disarmements and International Security 1999 Yearbook*. London: Oxford University Press.
- 2001. *Armements, Disarmements and International Security 2000 Yearbook*. London: Oxford University Press.
- The International Institute for Strategic Studies. 1998. *The Military Balance 1998/1999*. London. Oxford University Press.
- 1999. *The Military Balance 1999/2000*. London. Oxford University Press.
- 2000. *The Military Balance 2000/2001*. London. Oxford University Press.
- 2001. *The Military Balance 2001/2002*. London. Oxford University Press.

Journal dan Majalah-majalah

Analisis CSIS. Januari – Februari 1999.
The Army Quarterly and Defence Journal. Vol. 128. No. 3. Juli 1998.
Asian Security. Tahun 1997 / 1998.
Asian Security. Tahun 1998 / 1999.
Editor. No. 22 / Th III. 3 Pebruari 1990.
Foreign Affairs. Vol. 77. No. 5. September – Oktober 1998.
Foreign Affairs. Vol. 70. No. 2. Maret - April 1999.
International Institute for Strategic Studies. Vol. 13. Januari 1997.
International Institute for Strategic Studies. Vol. 4. Juni 1998.
India Perspektif. Januari 2000.
Pakistan Horison. Vol. XXXIV. No. 2. 1981.
Pakistan Horison. Vol. XXXV. No. 1. 1982.
Pelita. 12 Februari 1990.
Tempo. 12 April 1990.
Tempo. 22 April 1992.

Koran – Koran

Jawa Pos. 26 Maret 2002.
..... 10 April 2002.
..... 15 Mei 2002.
..... 20 Mei 2002.
..... 22 Mei 2002.
..... 23 Mei 2002.
..... 25 Mei 2002.
..... 26 Mei 2002.
..... 27 Mei 2002.
..... 29 Mei 2002.
..... 11 Juni 2002.

Kompas. 03 Juni 1998.

.....04 Agustus 1998.

.....06 Juli 1999.

.....01 Maret 2001.

.....13 Januari 2002.

.....19 Mei 2002.

.....21 Mei 2002.

.....22 Mei 2002.

.....23 Mei 2002.

.....31 Mei 2002.

Republika. 29 Mei 2002.

Suara Merdeka. 18 Mei 2002.

CD Room

Grollier Inc. Encyclopedia of Knowledge. 1990. Grollier Inc. Danburry
Conecticut.

Jammu and Kashmir. Microsoft ® Encarta (R) . 1996. Encyclopedia 1995-
1996.

Situs – situs Internet

www.cdw.org

www.cnn.com

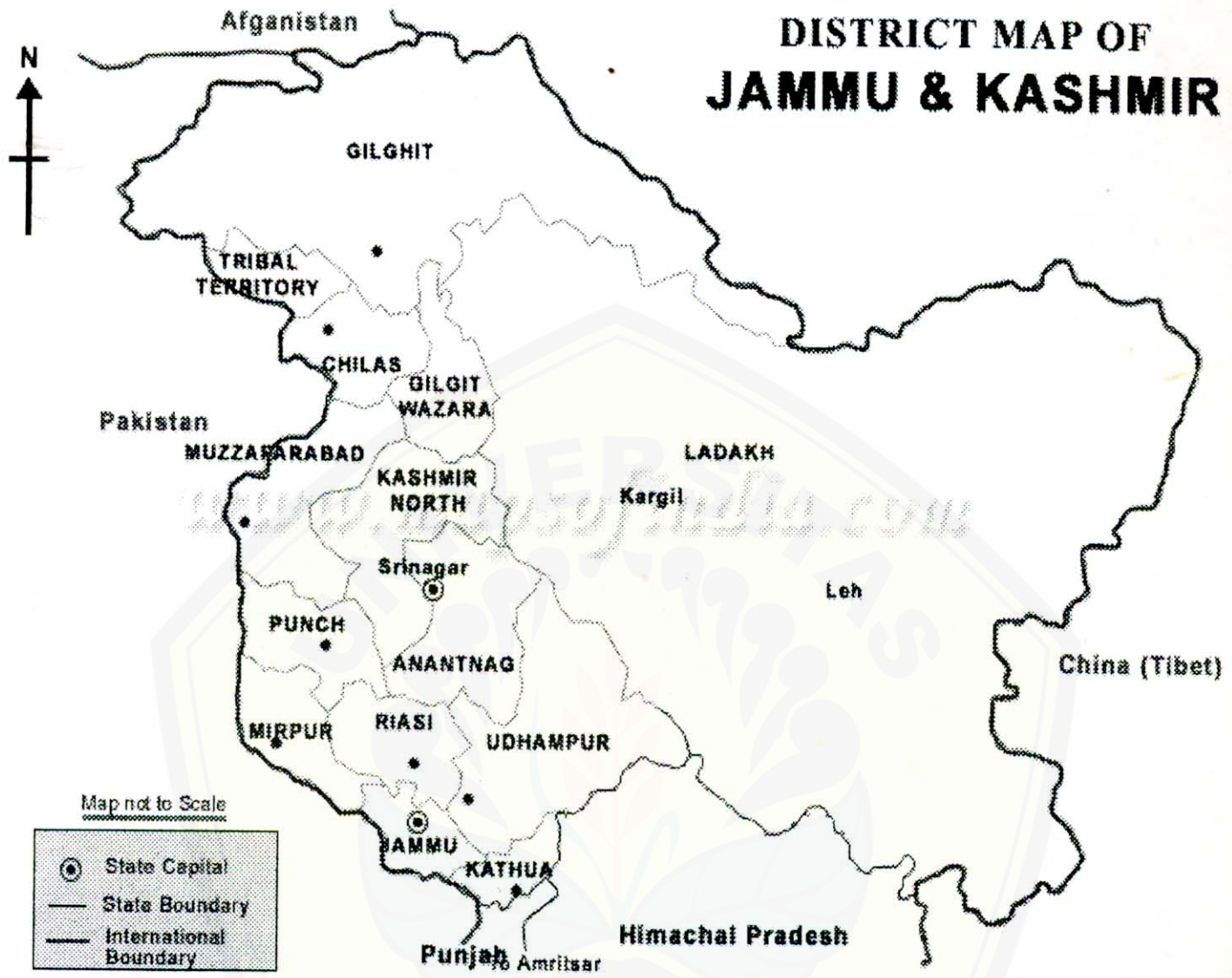
www.ipcs.org

www.islamonline.org

www.klc.org

www.mapsofindia.com

DISTRICT MAP OF JAMMU & KASHMIR



Copyright (c) Compare Infobase Pvt. Ltd. 2001-02

Sumber : www.mapsofindia.com

Lampiran 2. Peta Perbatasan Pakistan dan India

kashmir.bmp (992x1260x16M bmp)

India-Pakistan Border: Kashmir Area





800912 (A0R010) 8-88

Sumber : www.klc.org

Pakistan & India.. Military Balance



the balance of powers, India's military resources far exceed that of Pakistan—nearly double.

		
Active forces (in 1000s)	620	1200
Manpower fit for service (million)	21.9	164.4
Area (Million Km ²)	0.8039	3.288
Nuclear warheads	30	90
Submarines	353	738
Tanks	2300	3414
Aircraft carriers	30	107
Military expenditures (percent of GDP)	3.9	2.5



Source: IISS

	1997	1998	1999	2000
GDP	Rs2.4tr (\$58bn)	Rs2.8tr (\$61bn)		
<i>per capita</i>	\$2,300	\$2,400		
Growth	-0.4%	5.3%		
Inflation	11.4%	6.2%		
Debt	\$30bn	\$31bn		
Def exp	Rs161bn (\$3.9bn)	Rs180bn (\$4.0bn)		
Def bdgt		Rs145bn (\$3.2bn)	Rs142bn (\$2.7bn)	
FMA* (US)	\$2.5m	\$1.5m	\$2.9m	\$0.4m
FMA (Aus)	\$0.02m	\$0.02m	\$0.02m	
\$1 = rupee	41.1	45.0	51.7	
* UNMOGIP 1997 \$7m 1998 \$8m				

Population	144,350,000 (less than 3% Hindu)		
Age	13-17	18-22	23-32
Men	8,520,000	7,317,000	11,814,000
Women	8,051,000	6,622,000	10,485,000

Total Armed Forces

ACTIVE 587,000

RESERVES 513,000

Army €500,000; obligation to age 45 (men) or 50 (officers); active liability for 8 years after service Navy 5,000 Air Force 8,000

Army 520,000

9 Corps HQ • 2 armd div • 9 Corps arty bde • 19 inf div • 7 engr bde • 1 area comd (div) • 3 armd recce regt • 7 indep armd bde • 1 SF gp (3 bn) • 9 indep inf bde • 1 AD comd (3 AD gp: 8 bde)

AVN 17 sqn

7 ac, 8 hel, 1 VIP, 1 obs flt

EQUIPMENT

MBT 2,320+: 15 M-47, 250 M-48A5, 50 T-54/-55, 1,200 PRC Type-59, 250 PRC Type-69, 200+ PRC Type-85, €300 T-80UD

APC 850 M-113

TOWED ARTY 1,590: 85mm: 200 PRC Type-56; 105mm: 300 M-101, 50 M-56 pack; 122mm: 200 PRC Type-60, 400 PRC Type-54; 130mm: 200 PRC Type-59-1; 155mm: 30 M-59, 60 M-114, 124 M-198; 203mm: 26 M-115

SP ARTY 240: 105mm: 50 M-7; 155mm: 150 M-109A2; 203mm: 40 M-110A2

MRL 122mm: 45 Azar (PRC Type-83)

MOR 81mm: 500; 120mm: 225 AM-50, M-61

SSM 18 *Hatf 1*, *Hatf 2*, *Shaheen 1*

ATGW 800 incl: *Cobra*, 200 TOW (incl 24 on M-901 SP), *Green Arrow* (PRC *Red Arrow*)

RL 89mm: M-20 3.5in

RCL 75mm: Type-52; 106mm: M-40A1

AD GUNS 2,000+ incl: 14.5mm; 35mm: 200 GDF-002; 37mm: PRC Type-55/-65; 40mm: M1, 100 L/60; 57mm: PRC Type-59

SAM 350 *Stinger*, *Redeye*, RBS-70, 500 *Anza* Mk-1/-2 SURV RASIT (veh, arty), AN/TPQ-36 (arty, mor)

AIRCRAFT

SURVEY 1 *Commander* 840

LIAISON 1 Cessna 421, 2 *Commander* 690, 80 *Mashshaq*, 1 F-27

OBS 40 O-1E, 50 *Mashshaq*

HELICOPTERS

ATTACK 20 AH-1F (TOW)

TPT 12 Bell 47G, 7 -205, 10 -206B, 16 Mi-8, 6 IAR/SA-315B, 23 IAR/SA-316, 35 SA-330, 5 UH-1H

Navy 22,000

(incl Naval Air, €1,200 Marines and €2,000 Maritime Security Agency (see *Paramilitary*))

BASE Karachi (Fleet HQ)

SUBMARINES 10

SSK 7

1 *Khalid* (Fr *Agosta* 90B) with 533mm TT, *Exocet* SM39 USGW

2 *Hashmat* (Fr *Agosta*) with 533mm TT (F-17 HWT), *Harpoon* USGW

4 *Hangor* (Fr *Daphné*) with 533mm TT (L-5 HWT), *Harpoon* USGW

SSI 3 MG110 (SF delivery)

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 8

FRIGATES 8

FFG 6 *Tariq* (UK *Amazon*) with 4 x *Harpoon* SSM (in 3 of class), 1 x LY-60N SAM (in 3 of class), 2 x 324mm ASIT (in 2 of class); 1 114mm gun (2 *Lynx* hel delivered)

FF 2 *Shamsher* (UK *Leander*) with SA-319B hel, 1 x 3 ASW mor, plus 2 114mm guns

PATROL AND COASTAL COMBATANTS 10

MISSILE CRAFT 5

4 PRC *Huangfeng* with 4 HY 2 SSM

1 x *Jalat II* with 4 C-802 SSM

PATROL, COASTAL 1 *Larkana* PCC

PATROL, INSHORE 3

2 *Quetta* (PRC *Shanghai*) PFI

1 *Rajshahi* PCI

MINE COUNTERMEASURES 3

3 *Munsif* (Fr *Eridan*) MHC

SUPPORT AND MISCELLANEOUS 10

1 *Behr Paima* AGHS, 2 *Gwadar* AOT, 1 *Attack* AOT, 1 *Nasr* AO, 1 *Morain* AOR, 3 AT, 1 *Fuqing* AOR

NAVAL AIR

7 cbt ac, 12 armed hel

ASW/MR 1 sqn with 4 *Atlantic* plus 2 in store, 3 P-3C (operated by Air Force)

ASW/SAR 2 hel sqn with 4 SA-319B (ASW), 6 *Sea King*

Pakistan **Pak**

	1998	1999	2000	2001
rupee Rs				
GDP				
Rs	2.8tr	3.0tr		
US\$	60.8bn	61.6bn		
<i>per capita</i>				
US\$	2,400	2,500		
Growth				
%	4	3.1		
Inflation				
%	6.2	4.1		
Debt				
US\$	32bn	34.5bn		
Def exp				
Rs	180bn	173bn		
US\$	4.0bn	3.5bn		
Def bdtg				
Rs	145bn	142bn	170bn	
US\$	3.2bn	2.9bn	3.3bn	
FMA (US) US\$	1.5m	2.9m	0.4m	-
FMA (Aus) US\$	0.02m	0.02m		
US\$1=Rs	45.0	49.1	52.0	

• UNMOGIP 1997 US\$7m 1998 US\$8m

Population	148,012,000 (less than 3% Hindu)		
Age	13-17	18-22	23-32
Men	8,755,000	7,501,000	12,112,000
Women	8,337,000	6,815,000	10,735,000

Total Armed Forces

ACTIVE 612,000

RESERVES 513,000

Army €500,000; obligation to age 45 (men) or 50 (officers); active liability for 8 years after service Navy 5,000 Air Force 8,000

Army 550,000

9 Corps HQ • 2 armd div • 9 Corps arty bde • 19 inf div • 7 engr bde • 1 area comd (div) • 3 armd recce regt • 7 indep armd bde • 1 SF gp (3 bn) • 9 indep inf bde • 1 AD comd (3 AD gp: 8 bde)
AVN 17 sqn
 7 ac, 8 hel, 1 VIP, 1 obs flt

EQUIPMENT

MBT 2,285+: 15 M-47, 250 M-48A5, 50 T-54/-55, 1,200 PRC Type-59, 250 PRC Type-69, 200+ PRC Type-85, 320 T-80UD
APC 1,000+ M-113
TOWED ARTY 1,467: 85mm: 200 PRC Type-56; 105mm: 300 M-101, 50 M-56 pack; 122mm: 200 PRC Type-60, 250 PRC Type-54; 130mm: 227 PRC Type-59-1; 155mm: 30 M-59, 60 M-114, 124 M-198; 203mm: 26 M-115
SP ARTY 105mm: 50 M-7; 155mm: 150 M-109A2; 203mm: 40 M-110A2
MRL 122mm: 45 Azar (PRC Type-83)
MOR 81mm: 500; 120mm: 225 AM-50, M-61
SSM 80 *Hatf* 1, 30 *Hatf* 3 (PRC M-11), *Shaheen* 1, 12 *Ghauri*
ATGW 800 incl: *Cobra*, 200 TOW (incl 24 on M-901 SP), *Green Arrow* (PRC *Red Arrow*)
RL 89mm: M-20 3.5in
RCL 75mm: Type-52; 106mm: M-40A1
AD GUNS 2,000+ incl: 14.5mm; 35mm: 200 GDF-002; 37mm: PRC Type-55/-65; 40mm: M1, 100 L/60; 57mm: PRC Type-59
SAM 350 *Stinger*, *Redeye*, RBS-70, 500 *Anza* Mk-1/-2
SURV RASIT (veh, arty), AN/TPQ-36 (arty, mor)

AIRCRAFT

SURVEY 1 *Commander* 840
LIAISON 1 Cessna 421, 2 *Commander* 690, 80 *Mashshaq*, 1 F-27, 2 Y-12 (II)
OBS 40 O-1E, 50 *Mashshaq*

HELICOPTERS

ATTACK 20 AH-iF (TOW)
TPT 12 Bell 47G, 7 -205, 10 -206B, 16 Mi-8, 6 IAR/SA-315B, 23 IAR/SA-316, 35 SA-330, 5 UH-1H

Navy 22,000

(incl Naval Air, €1,200 Marines and €2,000 Maritime Security Agency (see *Paramilitary*))
BASE Karachi (Fleet HQ) (2 bases being built at Gwadar and Ormara)

SUBMARINES 10

SSK 7
 1 *Khalid* (Fr *Agosta* 90B) with 533mm TT, *Exocet* SM39 USGW
 2 *Hashmat* (Fr *Agosta*) with 533mm TT (F-17 HWT), *Harpoon* USGW
 4 *Hangor* (Fr *Daphne*) with 533mm TT (L-5 HWT), *Harpoon* USGW
 SSI 3 MG110 (SF delivery)

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 8

FRIGATES 8

FFG 6 *Tariq* (UK *Amazon*) with 4 x *Harpoon* SSM (in 3

Central and South Asia

of class), 1 *LY 60N SAM* (in 3 of class), 1 *114mm* gun, 6 *324mm ASTT*, 1 *Lynx HAS-3* FF2 *Shamsher* (UK *Leander*) with 2 *114mm* guns, 1 *3 ASW* mor, 1 *SA-319B* hel

PATROL AND COASTAL COMBATANTS 9

MISSILE CRAFT 5

4 *Sabqat* (PRC *Huangfeng*) PFM with 4 *HY 2 SSM*
1 *Jalalat II* with 4 *C-802 SSM*

PATROL, COASTAL 1 *Larkana* PCC

PATROL, INSHORE 3

2 *Quetta* (PRC *Shanghai*) PFI
1 *Rajshahi* PCI

MINE COUNTERMEASURES 3

3 *Munsif* (Fr *Eridan*) MHC

SUPPORT AND MISCELLANEOUS 9

1 *Fuqing* AO, 1 *Moatwin* AO, 2 *Gwadar* AOT, 1 *Attack* AOT, 3 AT, 1 *Behr Paima* AGHS

NAVAL AIR

5 cbt ac (all operated by Air Force), 9 armed hel
ASW/MR 1 sqn with 3 *Atlantic* plus 2 in store, 2 *P-3C* (operated by Air Force)
ASW/SAR 2 hel sqn with 6 *Sea King* Mk 45 (ASW), 3 *Lynx* HAS Mk-3 (ASW)
COMMS 5 *Fokker F-27* ac (Air Force) hel 4 *SA-319B*
ASM *Exocet* AM-39

MARINES (€1,200)

1 cdo/SF gp

Air Force 40,000

353 cbt ac, no armed hel Flying hours some 210
3 regional cmds: Northern (Peshawar) Central (Sargodha) Southern (Faisal). The Composite Air Tpt Wg, Combat Cdrs School and PAF Academy are Direct Reporting Units.

FGA 6 sqn

1 with 16 *Mirage* (13 IIIIP (some with ANI-39 ASM), 3 IIIIP (trg))
3 (1 OCU) with 52 *Mirage* 5 (40 -5PA/PA2, 10 5PA3 (ASuW), 2 5DPA/DPA2)
2 with 42 *Q-5* (A-5III *Lantani*), some FT-6

FTR 12 sqn

3 (1 OCU) with 40 *F-6*/FT-6 (J-6/JJ-6), 2 (1 OCU) with 32 *F-16* (22 A, 10 B), 6 (1 OCU) with 77 *F-7P*/FT-7 (J-7), 1 with 43 *Mirage* IIIIO/7-OD

RECCE 1 sqn with 11* *Mirage* IIIIP

ELINT/ECM 2 *Falcon* DA-20

SAR 1 hel sqn with 15 *SA-319*

TPT ac 12 *C-130* (11 B/E, 1 L-100), 2 *Boeing* 707, 1 *Boeing* 737, 1 *Falcon* 20, 2 *F-27-200* (1 with Navy), 1 *Beech Super King Air* 200, 2 *Y-12* (II), hel 15 *SA-316/319*, 4 *Cessna* 172, 1 *Cessna* 560 *Citation*, 1 *Piper* PA-34 *Seneca*, 4 *MFI-17B Mashshuq*

TRG 30 *FT-5*, 15 *FT-6*, 13 *FT-7*, 40* *MFI-17B Mashshuq*, 30 *T-37B/C*, 12 *K-8*

AD 7 SAM bty

6 each with 24 *Crotale*, 1 with 6 *CSA-1* (SA-2)

MISSILES

ASM *AM-39 Exocet*, *AGM-65 Maverick*, *AS-30*, *AGM-84 Harpoon*
AAM *AIM-7 Sparrow*, *AIM-9L/P Sidewinder*, *R-530 Magic*
ARM *AGM-88 Harm*.

Forces Abroad

UN AND PEACEKEEPING

CROATIA (UNMOP): 1 obs **DROC** (MONUC): 29 obs
EAST TIMOR (UNTAET): 804 incl 30 obs **GEORGIA** (UNOMIG): 7 obs **IRAQ/KUWAIT** (UNIKOM): 6 obs
SIERRA LEONE (UNAMSIL): 10 obs **WESTERN SAHARA** (MINURSO): 6 obs

Paramilitary €288,000 active

NATIONAL GUARD 185,000

incl *Janbaz* Force, *Mujahid* Force, National Cadet Corps, Women Guards

FRONTIER CORPS up to 65,000 reported (Ministry of Interior)

11 regt (40 bn), 1 indep armd car sqn; 45 *UR-416 APC*

PAKISTAN RANGERS €25,000-30,000 (Ministry of Interior)

NORTHERN LIGHT INFANTRY €12,000; 3 bn

MARITIME SECURITY AGENCY €1,000

1 *Alamgir* (US *Gearing* DD) (no ASROC or TT), 4 *Barkat* PCO, 2 (PRC *Shanghai*) PFI<

COAST GUARD

some 23 craft

Foreign Forces

UN (UNMCGIP): 46 mil obs from 8 countries

Pakistan Pak

rupee Rs		1999	2000	2001	2002
GDP	Rs	3.0tr	3.3tr		
	US\$	61.6bn	62.8bn		
per capita	US\$	2,357	2,400		
Growth	%	3.1	4.6		
Inflation	%	4.1	4.4		
Debt	US\$	34.5bn	31.0bn		
Def exp	Rs	173bn	190bn		
	US\$	3.5bn	3.65bn		
Def bdgt	Rs	142bn	156bn	157.6bn	
	US\$	2.9bn	3.0bn	2.6bn	
FMA (US)	US\$	2.9m	0.4m	-	
FMA (Aus)	US\$	0.02m			
US\$1=Rs		49.1	52.0	61	
Population		161,838,000 Hindu less than 3%			
Age		13-17	18-22	23-32	
Men		8,989,000	7,684,000	12,410,000	
Women		8,623,000	7,008,000	10,985,000	

Total Armed Forces

ACTIVE 620,000

RESERVES 513,000

Army €500,000; obligation to age 45 (other ranks) or 50 (officers); active liability for 8 years after service Navy 5,000 Air Force 8,000

Army 550,000

9 Corps HQ • 2 armd div • 9 Corps arty bde • 19 inf div • 22 indep bde (7 armd, 6 mech, 9 inf), 7 engr bde • 1 area comd (div) • 3 armd recce regt • 1 SF gp (3 bn) • 1 AD comd (3 AD gp: 8 bde)
AVN 17 sqn
7 ac, 8 hel, 1 VIP, 1 obs flt

EQUIPMENT

MBT 2,300+: 15 M-47, 250 M-48A5, 50 T-54/-55, 1,200 PRC Type-59, 250 PRC Type-69, 200+ PRC Type-85, 320 T-80UD, 15 *Al-Khalid*
APC 1,150+ M-113
TOWED ARTY 1,467: 85mm: 200 PRC Type-56; 105mm: 300 M-101, 50 M-56 pack; 122mm: 200 PRC Type-60, 250 PRC Type-54; 130mm: 227 PRC Type-59-1; 155mm: 30 M-59, 60 M-114, 124 M-198; 203mm: 26 M-115
SP ARTY 105mm: 50 M-7; 155mm: 150 M-109A2; 203mm: 40 M-110A2
MRL 122mm: 45 *Azar* (PRC Type-83)
MOR some 1,200 incl: 81mm; 120mm AM-50, M-61 SSM 80 *Hatf 1*, 30 *Hatf 3* (PRC M-11), *Shaheen 1*, 12 *Glauri*
ATGW 800 incl: *Cobra*, 200 TOW (incl 24 on M-901 SP), *Baktar Shikan* (PRC Red Arrow 8)
RL 89mm: M-20 3.5in
RCL 3,700: 75mm: Type-52; 106mm: M-40A1
AD GUNS 2,000+ incl: 14.5mm: 35mm: 200 GDF-002; 37mm: PRC Type-55/-65; 40mm: M1, 100 L/60; 57mm: PRC Type-59
SAM some 1,400 incl: 350 *Stinger*, HN-5A, RBS-70, 500 *Anza Mk-1/-2*
SURV RASIT (veh, arty), AN/TPQ-36 (arty, mor)
AIRCRAFT
SURVEY 1 *Commander 840*
LIAISON 1 Cessna 421, 2 *Commander 690*, 50 *Mashshaq*, 1 F-27, 2 Y-12 (II)
OBS 25 O-1E, 50 *Mashshaq*
HELICOPTERS
ATTACK 20 AH-1F (TOW)
TPT 12 Bell 47G, 6 -205, 10 -206B, 16 Mi-8, 18 IAR/SA-315B, 24 IAR/SA-316, 25 SA-330, 6 UH-1H
UAV *Bravo*
Navy 25,000
(incl Naval Air, €1,200 Marines and €2,000 Maritime Security Agency (see *Paramilitary*))
BASE Karachi (Fleet HQ) (2 bases being built at Gwadar and Ormara)
SUBMARINES 10
SSK 7
1 *Khalid* (Fr *Agosta 90B*) with 533mm TT, *Exocet SM39* USGW
2 *Hashmat* (Fr *Agosta*) with 533mm TT (F-17 HWT), *Harpoon* USGW
4 *Hangor* (Fr *Daphné*) with 533mm TT (L-5 HWT),

Harpoon USGW
SSI 3 MGI10 (SF delivery)

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 8

FRIGATES 8

FG 6 *Tariq* (UK *Amazon*) with 4 × *Harpoon* SSM (in 3 of class), 1 × *LY-60N* SAM (in 3 of class), 1 × 114mm gun, 6 × 324mm ASTT, 1 *Lynx* HAS-3
FF 2 *Shamsher* (UK *Leander*) with 2 × 114mm guns, 1 × 3 ASW mor, 1 SA-319B hel

PATROL AND COASTAL COMBATANTS 9

MISSILE CRAFT 5

3 *Sabqat* (PRC *Huangfeng*) PFM with 4 *HY 2* SSM
2 × *Jalalat* II PFM with 4 C-802 SSM

PATROL, COASTAL 3

1 *Larkana* PCC
2 *Quetta* (PRC *Shanghai*) PCC (operated by the Maritime Security Agency)

PATROL, INSHORE 1

1 *Rajshahi* PCI<

MINE WARFARE 3

MINE COUNTERMEASURES 3

3 *Munsif* (Fr *Eridan*) MHC

SUPPORT AND MISCELLANEOUS 9

1 *Fuqing* AO, 1 *Moawin* AO, 2 *Gwadar* AOT, 1 *Attock* AOT; 3 AT; 1 *Behr Paima* AGHS

NAVAL AVIATION

EQUIPMENT

5 cbt ac; 9 armed hel

AIRCRAFT

ASW/MR 1 sqn with 3 *Atlantic* plus 2 in store, 2 P-3C (operated by Air Force)
COMMS 1 sqn with 5 *Fokker F-27* (Air Force)

HELICOPTERS

ASW/SAR 2 sqn with 6 *Sea King* Mk-45, 3 *Lynx* HAS-Mk-3
COMMS 1 sqn with 4 SA-319B

MISSILES

ASM *Exocet* AM-39

MARINES (€1,200)

1 cdo/SF gp

Air Force 45,000

353 cbt ac, no armed hel **Flying hours** some 210
3 regional comds: **Northern** (Peshawar) **Central** (Sargodha) **Southern** (Faisal). The Composite Air Tpt Wg, Combat Cdrs School and PAF Academy are Direct Reporting Units.

FGA 6 sqn

1 with 16 *Mirage* (13 IIIEP (some with AM-39 ASM), 3 IIIDP (trg))
3 (1 OCU) with 52 *Mirage* 5 (40 -5PA/PA2, 10 5PA3 (ASuW), 2 5DPA/DPA2)
2 with 42 Q-5 (A-5III *Fantan*), some FT-6

FT-12 sqn

3 (1 OCU) with 40 F-6/FT-6 (J-6/JJ-6) (to be replaced by the first of 80 F-7PG early 2002), 2 (1 OCU) with 32 F-16 (22 -A, 10 -B), 6 (1 OCU) with 77 F-7P/FT-7 (J-7), 1 with 43 *Mirage* IIIIO/7-OD

RECCE 1 sqn with 11* *Mirage* IIIIRP

ELINT/ECM 2 *Falcon* DA-20

SAR 1 hel sqn with 15 SA-319

TPT ac 12 C-130 (11 B/E, 1 L-100), 2 Boeing 707, 1 Boeing 737, 1 *Falcon* 20, 2 F-27-200 (1 with Navy), 1 Beech *Super King Air* 200, 2 Y-12 (II), hel 15 SA 316/319, 4 Cessna 172, 1 Cessna 560 *Citation*, 1 *Piper* PA-34 *Seneca*, 4 MFI-17B *Mashshaq*

TRG 30 FT-5, 15 FT-6, 13 FT-7, 40* MFI-17B *Mashshaq*, 30 T-37B/C, 12 K-8

AD 7 SAM bty

6 each with 24 *Crotale*, 1 with 6 CSA-1 (SA-2)

MISSILES

ASM AM-39 *Exocet*, AGM-65 *Maverick*, AS 30, AGM-84 *Harpoon*

AAM AIM-7 *Sparrow*, AIM-9L/P *Sidewinder*, R-530 *Magic*

ARM AGM-88 *Harm*

Forces Abroad

UN AND PEACEKEEPING

CROATIA (UNMOP): 1 obs **DROC** (MONUC): 31 incl 16 obs **EAST TIMOR** (UNTAET): 837 incl 15 obs

GEORGIA (UNOMIG): 7 obs **IRAQ/KUWAIT** (UNIKOM): 6 obs **SIERRA LEONE** (UNAMSIL): 538 incl 10 obs **WESTERN SAHARA** (MINURSO): 6 obs

Paramilitary €288,000 active

NATIONAL GUARD 185,000

incl *Janbaz* Force, *Mujahid* Force, National Cadet Corps, Women Guards

FRONTIER CORPS up to 65,000 reported (Ministry of Interior)

11 regt (40 bn), 1 indep armd car sqn; 45 UR-416 APC

PAKISTAN RANGERS €25,000-30,000 (Ministry of Interior)

NORTHERN LIGHT INFANTRY €12,000; 3 bn

MARITIME SECURITY AGENCY €1,000

1 *Alamgir* (US *Gearing* DD) (no ASROC or TT), 4 *Barkat* PCO, 2 (PRC *Shanghai*) PCC

COAST GUARD

some 23 craft

Foreign Forces

UN (UNMOGIP): 43 mil obs from 8 countries

India	Ind			
	1997	1998	1999	2000
GDP	Rs15.6tr (\$431bn)	Rs19.0tr (\$469bn)		
<i>per capita</i>	\$1,600	\$1,700		
Growth	5.0%	6.7%		
Inflation	7.2%	13.2%		
Debt	\$94bn	\$101bn		
Def exp*	Rs465bn (\$12.8bn)	Rs580bn (\$14.1bn)		
Def bdgt		Rs412bn (\$10.0bn)	Rs457bn (\$10.7bn)	
FMA^b (US)	\$0.4m	\$0.2m	\$0.5m	\$0.5m
FMA (Aus)	\$0.2m	\$0.2m	\$0.2m	
\$1 = rupee	36.3	41.3	42.7	
* Incl exp on paramil org				
^b UNMOGIP 1997 \$7m 1998 \$8m				
Population	999,839,000			
(Hindu 80%, Muslim 14%, Christian 2%, Sikh 2%)				
Age	13-17	18-22	23-32	
<i>Men</i>	52,985,000	48,592,000	85,587,000	
<i>Women</i>	49,572,000	45,011,000	78,187,000	

Total Armed Forces

ACTIVE 1,173,000

RESERVES 528,400

Army 300,000 (first-line reserves within 5 years' full-time service, a further 500,000 have commitment until age 50) Territorial Army (volunteers) 33,400 Air Force 140,000 Navy 55,000

Army 980,000

HQ: 5 Regional Comd, 4 Fd Army, 11 Corps
3 armd div (each 2-3 armed, 1 SP arty (2 SP fd, 1 med regt) bde) • 4 RAPID div (each 2 inf, 1 mech bde) • 18 inf div (each 2-5 inf, 1 arty bde; some have armd regt) • 9 mtn div (each 3-4 bde, 1 or more arty regt) • 1 arty div (3 bde) • 15 indep bde: 7 armd, 5 inf, 2 mtn, 1 AB/cdo • 1 SSM regt (*Prithvi*) • 4 AD bde (plus 14 cadre) • 3 engr bde

These formations comprise

59 tk regt (bn) • 355 inf bn (incl 25 mech, 8 AB, 3 cdo) • 190 arty regt (bn) reported: incl 1 SSM, 2 MRL, 50 med (11 SP), 69 fd (3 SP), 39 mtn, 29 AD arty regt; perhaps 2 SAM gp (3-5 bty each) plus 15 SAM regt • 14 hel sqn: 6 atk, 8 air obs

EQUIPMENT

MBT €3,414 (€1,100 in store); some 700 T-55 (450 op), €1,500 T-72/M1, 1,200 *Vijayanta*, €14 *Arjun*
LT TK €90 PT-76
RECCE €100 BRDM-2
AIFV 350 BMP-1, 1,000 BMP-2 (*Sarath*)
APC 157 OT-62/-64 (in store), some *Casspir*
TOWED ARTY 4,175 (perhaps 600 in store) incl:
75mm: 900 75/24 mtn, 215 FRY M-48; 105mm: some 1,300 IFG Mk I/II, 50 M-56; 122mm: some 550 D-30; 130mm: 750 M-46; 155mm: 410 FH-77B
SP ARTY 105mm: 80 *Abbot* (€30 in store); 130mm 100 mod M-46 (€70 in store); 152mm: some 251
MRL 122mm: 150 incl BM-21, LRAR; 214mm *Pinacha* (being deployed)
MOR 81mm: L16A1, E1; 120mm: 500 Brandt AM-50, E1; 160mm: 500 M-1943, 200 Tampella M-58 (all in store)
SSM *Prithvi* (3-5 launchers)
ATGW *Milan*, AT-3 *Sagger*, AT-4 *Spigot* (some SP), AT-5 *Spandrel* (some SP)
RCL 84mm: *Carl Gustav*; 106mm: 1,000+ M-40A1
AD GUNS some 2,400: 20mm: Oerlikon (reported); 23mm: 300 ZU 23-2, 100 ZSU-23-4 SP; 30mm: 24 2S6 SP; 40mm: 1,200 L40/60, 800 L40 70

SAM 180 SA-6, 620 SA-7, 50 SA-8B, 400 SA-9, 45

SA-3, SA-13, 500 SA-16

SURV MUFAR, *Green Archer* (mor)

UAV *Searcher* (reported), *Nishant*

HEL 199 *Chetak*, *Cheetah*

LC 2 LCVP

RESERVES

Territorial Army 25 inf bn, plus 29 'departmental' units

DEPLOYMENT

North 2 Corps with 8 inf, 2 mtn div West 3 Corps with 1 armd, 5 inf div, 3 RAPID Central 1 Corps with 1 armd, 1 inf, 1 RAPID East 3 Corps with 1 inf, 7 mtn div South 2 Corps with 1 armd, 3 inf div

Navy 53,000

(incl 5,000 Naval Aviation and €1,200 Marines, €2,000 women)

PRINCIPAL COMMAND Western, Eastern, Southern, Far Eastern

SUB-COMMAND Submarine, Naval Air

BASES Mumbai (Bombay) (HQ Western Comd), Goa (HQ Naval Air), Karwar (under construction), Kochi (Cochin) (HQ Southern Comd), Vishakhapatnam (HQ Eastern and submarines), Calcutta, Madras, Port Blair (Andaman Is) (HQ Far Eastern Comd), Arakonam (Naval Air)

FLEETS Western base Bombay Eastern base Visakhapatnam

SUBMARINES 16

SSK 16

9 *Sindhughosh* (Sov *Kilo*) with 533mm TT

4 *Shishumar* (Ge T-209/1500) with 533mm TT

3 *Kursura* (Sov *Foxtrot*)† with 533mm TT (plus 3 in reserve)

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 26

CARRIERS 1 *Viraat* (UK *Hermes*) (29,000t) CVV

Air group typically ac 6 *Sea Harrier* frt/attack hel 6 *Sea King* ASW/ASUW (*Sea Eagle* ASM) (in refit until April 2001)

DESTROYERS 7

DDG 7

5 *Rajput* (Sov *Kashin*) with 2 x 2 SA-N-1 *Goa* SAM, 4 SS-N-2C *Styx* SSM, 5 533mm TT, 2 ASW RL, 1 Ka-25 or 28 hel (ASW)

2 *Delhi* with 16 SS-N-25 *Sapless* SSM, 2 x SA-N-7 *Gadfly* SAM, 1 100mm gun, 5 533mm TT, 2 hel

FRIGATES 13

FFG 4

1 *Brahmaputra* with 20 SA-N-4 *Gecko* SAM, 8 x SS-N-25 *Sapless* SSM, 1 x 76mm gun

3 *Godavari* with 1 *Sea King* hel, 2 x 3 324mm ASTT, 4 SS-N-2C *Styx* SSM and 1 x 2 SA-N-4 *Gecko* SAM

FF 9

5 *Nilgiri* (UK *Leander*) with 2 x 3 ASTT, 4 with 1 x 3 *Limbo* ASW mor, 1 *Chetak* hel, 2 with 1 *Sea King*, 1 x

2 ASW RL, 2 114mm guns (plus 1 in reserve)

3 *Krishna* (UK *Leander*) (trg role)
3 *Arnala* (Sov *Petya*) with 4 ASW RL, 3 533mm TT
CORVETES 5

4 *Khukri* with 2 or 4 SS-N-2C *Styx* SSM, hel deck

1 mod *Khukri* with 8 x SS-N-25 *Sapless* SSM

PATROL AND COASTAL COMBATANTS 40

CORVETTES 19

3 *Vijay Durg* (Sov *Nanuchka* II) with 4 SS-N-2B *Styx* SSM

6 *Veer* (Sov *Tarantul*) with 4 *Styx* SSM

6 *Vibhuti* (similar to *Tarantul*) with 4 *Styx* SSM

4 *Abhay* (Sov *Pauk* II) (ASW) with 4 ASTT, 2 ASW mor

MISSILE CRAFT 6 *Vidyut* (Sov *Osa* II) with 4 *Styx* (all non-op) (plus 6 *Osa* 1 reserve and 2 *Osa* 1 for special forces penetration)

PATROL, OFFSHORE 7 *Sukanya* PCO

PATROL, INSHORE 8

6 SDB Mk 3 (1 SDB Mk 2 may be op)

2 *Super Dvora*

MINE WARFARE 18

MINELAYERS 0

none, but *Kamorta* FF and *Pondicherry* MSO have minelaying capability

MINE COUNTERMEASURES 18

12 *Pondicherry* (Sov *Natya*) MSO, 6 *Mahé* (Sov *Yeugonya*) MSI<

AMPHIBIOUS 9

2 *Magar* LST, capacity 500 tps, 18 tk, 1 hel (plus 1 fitting out)

7 *Ghorpad* (Sov *Polnocny* C) LSM, capacity 140 tps, 6 tk

Plus craft: 10 *Vasco da Gama* LCU

SUPPORT AND MISCELLANEOUS 31

1 *Jyoti* AO, 6 small AO, 1 *Amba* (Sov *Ugra*) AS, 1 div spt, 2 AT/E, 6 *Sandhyak* and 4 *Makar* AGHS, 1 Trg, 1 *Sagarbhawan* AGOR, 3 torpedo recovery vessels, 1 AH, 2 *Osa* 1 (special forces insertion), 1 *Deepak* plus 1 mod *Deepak* AOR

NAVAL AVIATION (5,000)

79 cbt ac, 83 armed hel Flying hours some 180

ATTACK 2 sqn with 20 *Sea Harrier* FRS Mk-51, 1 T-60 trg plus 2 T-4 (on order)

ASW 6 hel sqn with 26 *Chetak*, 7 Ka-25, 18 Ka-28, 31 *Sea King* Mk 42A/B

MR 3 sqn with 8 *Il-38*, 11 Tu-142M *Bear* F, 19 Do-228, 18 BN-2 *Defender*

COMMS 1 sqn with ac 10 Do-228 hel 3 *Chetak*

SAR 1 hel sqn with 6 *Sea King* Mk 42C

TRG 2 sqn with ac 6 HJT-16, 8 HPT-32 hel 2 *Chetak*, 4 Hughes 300

MISSILES

AAM R-550 *Magic* I and II

ASM *Sea Eagle*, *Sea Skua*

MARINES (1,200)

1 regt (3 gp)

Air Force 140,000

774 cbt ac, 34 armed hel. 5 Air Comd Flying hours 150

Five regional commands

FGA 18 sqn

1 with 8 Su-30K, 3 with 53 MiG-23 BN/UM, 4 with 88 *Jaguar* S(I), 6 with 147 MiG-27, 4 with 69 MiG-21 MF/PFMA

FTR 20 sqn

4 with 66 MiG-21 FL/U, 10 with 169 MiG-21 bis/U, 1 with 26 MiG-23 MF/UM, 3 with 64 MiG-29, 2 with 35 *Mirage* 2000H/TH (believed to have secondary GA capability), 8 Su-30MK

ECM 4 *Canberra* B(I) 58 (ECM/target towing, plus 2 *Canberra* TT-18 target towing)

ELINT 2 Boeing 707, 2 Boeing 737

AEW 4 HS-748

TANKER 6 IL-78

MARITIME ATTACK 6 *Jaguar* S(I) with *Sea Eagle*

ATTACK HEL 3 sqn with 32 Mi-25

RECCE 2 sqn

1 with 8 *Canberra* (6 PR-57, 2 PR-67)

1 with 6* MiG-25R, 2* MiG-25U

MR/SURVEY 2 *Gulfstream* IV SRA, 2 *Learjet* 29

TRANSPORT

ac 12 sqn

6 with 105 An-32 *Sutlej*, 2 with 45 Do-228, 2 with 28 BAe-748, 2 with 25 Il-76 *Gajraj*

hel 11 sqn with 73 Mi-8, 50 Mi-17, 10 Mi-26 (hy tpt)

VIP 1 HQ sqn with 2 Boeing 737-200, 7 BAe-748, 6 Mi-8

TRG ac 28 BAe-748 (trg/tpt), 120 *Kiran* I, 56 *Kiran* II,

88 HPT-32, 38 *Hunter* (20 F-56, 18 T-66), 14* *Jaguar*

B(1), 9* MiG-29UB, 44 TS-11 *Iskara* hel 20 *Chetak*, 2

Mi-24, 2* Mi-35

MISSILES

ASM AS-7 *Kerry*, AS-11B (ATGW), AS-12, AS-30, *Sea Eagle*, AM 39 *Exocet*, AS-17 *Krypton*

AAM AA-7 *Apex*, AA-8 *Aphid*, AA-10 *Alamo*, AA-11 *Archer*, R-550 *Magic*, *Super* 530D

SAM 38 sqn with 280 *Divina* V75SM/VK (SA-2), *Pechora* (SA-3), SA-5, SA-10

Forces Abroad

UN AND PEACEKEEPING

IRAQ/KUWAIT (UNIKOM): 5 obs SIERRA LEONE

(UNOMSIL): 6 obs WESTERN SAHARA

(MINURSO): 10 obs

Paramilitary 1,090,000 active

NATIONAL SECURITY GUARDS 7,400

(Cabinet Secretariat)

Anti-terrorism contingency deployment force, comprising elements of the armed forces, CRPF and Border Security Force

SPECIAL PROTECTION GROUP 3,000

Protection of VVIP

SPECIAL FRONTIER FORCE 9,000

(Cabinet Secretariat)

mainly ethnic Tibetans

RASHTRIYA RIFLES 40,000 (Ministry of Defence)

36 bn in 12 Sector HQ

DEFENCE SECURITY CORPS 31,000

provides security at Defence Ministry sites

INDO-TIBETAN BORDER POLICE 32,200 (Ministry of Home Affairs)

28 bn, Tibetan border security

ASSAM RIFLES 52,500 (Ministry of Home Affairs)

7 HQ, 31 bn, security within north-eastern states, mainly Army-officered; better trained than BSF

RAILWAY PROTECTION FORCES 70,000

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 88,600

(Ministry of Home Affairs)*

guards public-sector locations

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE (CRPF) 165,300

(Ministry of Home Affairs)

130-135 bn incl 10 rapid action, 2 *Mahila* (women);

internal security duties, only lightly armed, deployable throughout the country

BORDER SECURITY FORCE (BSF) 185,000 (Ministry of Home Affairs)

some 150 bn, small arms, some lt arty, tpt/liaison air sqn

HOME GUARD (R) 472,000

authorised, actual str 416,000 in all states except Arunachal Pradesh and Kerala; men on lists, no trg

STATE ARMED POLICE 400,000

For duty primarily in home state only, but can be moved to other states, incl 24 bn India Reserve Police

(commando-trained)

CIVIL DEFENCE 394,000 (R)

in 135 towns in 32 states

COAST GUARD over 5,500

PATROL CRAFT 36

3 *Samar* OPV, 9 *Vikram* OPV, 21 *Jija Bai*, 3 SDB-2 plus 16 boats

AVIATION

3 sqn with ac 14 Do-228, hel 15 *Chetak*

* Lightly armed security guards only

Opposition

HOLY ISLAMIC ARMY: str n.k. Operates in Kashmir

Foreign Forces

UN (UNMOGIP): 46 mil obs from 8 countries

India		Ind			
rupee Rs		1998	1999	2000	2001
GDP	Rs	17.0tr	18.9tr		
	US\$	412bn	440bn		
<i>per capita</i>	US\$	1,700	1,800		
Growth	%	6.7	5.9		
Inflation	%	13.2	4.7		
Debt	US\$	94bn	99bn		
Def exp^a	Rs	580bn	610bn		
	US\$	14.1bn	14.2bn		
Def bdgt	Rs	412bn	533bn	709bn	
	US\$	10.0bn	12.4bn	15.9bn	
FMA^b (US)	US\$	0.2m	0.5m	0.5m	0.5m
FMA (Aus)	US\$	0.2m	0.2m		
US\$1=Rs		41.3	43.0	44.4	

^a Incl exp on paramil org

^b UNMOGIP 1997 US\$7m 1998 US\$8m

Population		1,016,242,000		
(Hindu 80%, Muslim 14%, Christian 2%, Sikh 2%)				
Age		13-17	18-22	23-32
Men		53,812,000	49,257,000	87,033,000
Women		50,432,000	45,713,000	79,562,000

Total Armed Forces

ACTIVE 1,303,000

RESERVES 535,000

Army 300,000 (first-line reserves within 5 years' full-time service, a further 500,000 have commitment until age 50) Territorial Army (volunteers) 40,000 Air Force 140,000 Navy 55,000

Army 1,100,000

HQ: 5 Regional Comd, 4 Fd Army, 12 Corps
 3 armd div (each 2-3 armed, 1 SP arty (2 SP fd, 1 med regt) bde) • 4 RAPID div (each 2 inf, 1 mech bde) • 18 inf div (each 2-5 inf, 1 arty bde; some have armd regt) • 9 mtn div (each 3-4 bde, 1 or more arty regt) • 1 arty div (3 bde) • 15 indep bde: 7 armd, 5 inf, 2 mtn, 1 AB/cdo • 1 SSM regt (*Prithvi*) • 4 AD bde (plus 14 cadre) • 3 engr bde

These formations comprise

- 59 tk regt (bn) • 355 inf bn (incl 25 mech, 8 AB, 3 cdo)
- 190 arty regt (bn) reported: incl 1 SSM, 2 MRL, 50 med (11 SP), 69 fd (3 SP), 39 mtn, 29 AD arty regt; perhaps 2 SAM gp (3-5 bty each) plus 15 SAM regt • 22 hel sqn: incl 5 ATK

RESERVES

Territorial Army 25 inf bn, plus 29 'departmental' units

EQUIPMENT

MBT €3,414 (€1,100 in store): some 700 T-55 (450 op), €1,500 T-72/M1, 1,200 *Vijayanta*, €14 *Arjun*

LT TK €90 PT-76

RECCE €100 BRDM-2

AIFV 350+ BMP-1, 1,000 BMP-2 (*Sarath*)

APC 157 OT-62/-64 (in store), some *Casspir*

TOWED ARTY 4,175 (perhaps 600 in store) incl:

75mm: 900 75/24 mtn, 215 FRY M-48; 105mm:

some 1,300 IFG Mk I/II, 50 M-56; 122mm: some

550 D-30; 130mm: 750 M-46; 155mm: 410 FH-77B

SP ARTY 105mm: 80 *Abbot* (€30 in store); 130mm:

100 mod M-46 (€70 in store); 152mm: some 2S19

MRL 122mm: €100 incl BM-21, LRAR; 214mm:

Pinacha (being deployed)

MOR 81mm: L16A1, E1; 120mm: 500 Brandt AM-50,

F1; 160mm: 500 M-1943

SSM *Prithvi* (3-5 launchers)

ATGW *Milan*, AT-3 *Sagger*, AT-4 *Spigot* (some SP), AT-

5 *Spandrel* (some SP)

RCL 84mm: *Carl Gustav*; 106mm: 1,000+ M-40A1

AD GUNS some 2,400: 20mm: Oerlikon (reported);

23mm: 300 ZU 23-2, 100 ZSU-23-4 SP; 30mm: 24

2S6 SP; 40mm: 1,200 L40/60, 800 L40/70

SAM 180 SA-6, 620 SA-7, 50 SA-8B, 400 SA-9, 45 SA-

3, SA-13, 500 SA-16

SURV MUFAŘ, *Green Archer* (mor)

UAV *Searcher*, *Nishant*

HEL 120 *Chetak*, 40 *Cheetah*

LC2 LCVP
DEPLOYMENT

North 3 Corps with 8 inf, 2 mtn div West 3 Corps with 1 armd, 5 inf div, 3 RAPID Central 1 Corps with 1 armd, 1 inf, 1 RAPID East 3 Corps with 1 inf, 7 mtn div South 2 Corps with 1 armd, 3 inf div

Navy 53,000

(incl 5,000 Naval Aviation and 1,000 Marines, €2,000 women)

PRINCIPAL COMMAND Western, Southern, Eastern (incl Far Eastern sub command)

SUB-COMMAND Submarine, Naval Air

BASES Mumbai (Bombay) (HQ Western Comd), Goa (HQ Naval Air), Karwar (under construction), Kochi (Cochin) (HQ Southern Comd), Vishakhapatnam (HQ Eastern), Calcutta, Madras, Port Blair (Andaman Is) (HQ Far Eastern Comd), Arakonam (Naval Air)

FLEETS Western base Bombay Eastern base Visakhapatnam

SUBMARINES 16

SSK 16

- 10 *Sindhughosh* (Sov *Kilo*) with 533mm TT
- 4 *Shishumar* (Ge T-209/1500) with 533mm TT
- 2 *Kursura* (Sov *Foxtrot*)† with 533mm TT (plus 3 in reserve)

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 26

CARRIERS 1 *Viraat* (UK *Hermes*) (29,000t) CVV

Air group typically ac 6 *Sea Harrier* frt/attack hel 6 *Sea King* ASW / ASUW (*Sea Eagle* ASM) (in refit until April 2001)

DESTROYERS 8

DDG 8

- 5 *Rajput* (Sov *Kashin*) with 4 SS-N-2C *Styx* SSM, 2 × 2 SA-N-1 *Goa* SAM, 2 × 76mm gun, 5 × 533mm ASTT, 2 ASW RL, 1 Ka-25 or 28 hel (1 in refit)
- 3 *Delhi* with 16 SS-N-25 *Switchblade* SSM, 2 × SA-N-7 *Gadfly* SAM, 1 × 100mm gun, 5 × 533mm ASTT, 2 hel

FRIGATES 12

FFG 4

- 1 *Brahmaputra* with 8 × SS-N-25 *Switchblade* SSM, 20 SA-N-4 *Gecko* SAM, 1 × 76mm gun, 2 × 3 324mm ASTT, 1 hel
- 3 *Godavari* with SS-N-2D *Styx* SSM, 1 × 2 SA-N-4 *Gecko* SAM, 2 × 3 324mm ASTT, 1 *Sea King* hel

FF 8

- 4 *Nilgiri* (UK *Leander*) with 2 × 114mm guns, 2 × 3 ASTT, 1 × 3 *Limbo* ASW mor, 1 *Chetak* hel (2 with 1 *Sea King*)
- 1 *Krishna* (UK *Leander*) (trg role)
- 3 *Arnala* (Sov *Petya*) with 4 × 76mm gun, 3 × 533mm ASTT, 4 ASW RL

CORVETES 5

- 4 *Khukri* FSG with 2 or 4 SS-N-2C *Styx* SSM, 1 × 76mm gun, hel deck

1 mod *Khukri* FSG with 8 × SS-N-25 *Switchblade* SSM, SA-N-5 *Grail* SAM, 1 × 76mm gun

PATROL AND COASTAL COMBATANTS 38

CORVETTES 14

- 1 *Vijay Durg* (Sov *Nanuchka* II) FSG with 4 SS-N-2C *Styx* SSM, SA-N-4 *Gecko* SAM (plus 1 non-op)
- 3 *Veer* (Sov *Tarantul*) FSG with 4 *Styx* SSM, SA-N-5 *Grail* SAM, 1 × 76mm gun (plus 2 non-op)
- 6 *Vibhuti* (similar to *Tarantul*), armament as *Veer*
- 4 *Abhay* (Sov *Pauk* II) FS with SA-N-5 *Grail* SAM, 1 × 76mm gun, 4 × 533mm ASTT, 2 ASW mor

MISSILE CRAFT 6 *Vidyut* (Sov *Osa* II) with 4 *Styx* SSM†

PATROL, OFFSHORE 7 *Sukanya* PCO

PATROL, INSHORE 11

- 7 SDB Mk 3
- 4 *Super Dvora* PCI<

MINE WARFARE 17

MINELAYERS 0

none, but *Kamorta* FF and *Pondicherry* MSO have minelaying capability

MINE COUNTERMEASURES 17

- 11 *Pondicherry* (Sov *Natya*) MSO, 6 *Mahé* (Sov *Yevojenya*) MSI<

AMPHIBIOUS 9

- 2 *Magar* LST, capacity 500 tps, 18 tk, 1 hel
- 7 *Ghorpad* (Sov *Polnocny* C) LSM, capacity 140 tps, 6 tk
- Plus craft: 10 *Vasco da Gama* LCU

SUPPORT AND MISCELLANEOUS 26

- 1 *Aditya* (mod *Deepak*) AO, 1 *Deepak* AO, 1 *Jyoti* AO, 4 small AOT; 1 YDT, 1 *Tir* trg, 2 AT/F, 3 TRV, 1 AH; 6 *Sandhayak* AGHS, 4 *Makar* AGHS, 1 *Sagardhwani* AGOR

NAVAL AVIATION (5,000)

- 37 cbt ac, 72 armed hel Flying hours some 180
- ATTACK** 2 sqn with 23 *Sea Harrier* FRS Mk-51, 1 T-60 trg* plus 2 T-4 (on order)
- ASW** 6 hel sqn with 24 *Chetak*, 7 Ka-25, 14 Ka-28, 25 *Sea King* Mk 42A/B
- MR** 3 sqn with 5 Il-38, 8 Tu-142M *Bear* F, 19 Do-228, 18 BN-2 *Defender*
- COMMS** 1 sqn with ac 10 Do-228 hel 3 *Chetak*
- SAR** 1 hel sqn with 6 *Sea King* Mk 42C
- TRG** 2 sqn with ac 6 HJT-16, 8 HPT-32 hel 2 *Chetak**, 4 Hughes 300

MISSILES

- AAM R-550 *Magic* I and II
- ASM *Sea Eagle*, *Sea Skua*

MARINES (1,200)

- 1 regt (3 gp)

Air Force 150,000

- 774 cbt ac, 34 armed hel Flying hours 150
- Five regional air commands: **Central** (Allahabad),

Western (New Delhi), Eastern (Shillong), Southern (Tiruvettipuram), South-Western (Gandhinagar); 2 spt cmds: trg and maint

FGA 18 sqn

1 with 10 Su-30K, 3 with 53 MiG-23 BN/UM, 4 with 88 Jaguar S(I), 6 with 147 MiG-27, 4 with 69 MiG-21 MF/PFMA

FTR 20 sqn

4 with 66 MiG-21 FL/U, 10 with 169 MiG-21 bis/U, 1 with 26 MiG-23 MF/UM, 3 with 64 MiG-29, 2 with 35 *Mirage* 2000H/TH (believed to have secondary GA capability), 8 Su-30MK

ECM 4 *Canberra* B(I) 58 (ECM/target towing, plus 2 *Canberra* TT-18 target towing)

ELINT 2 Boeing 707, 2 Boeing 737

AEW 4 HS-748

TANKER 6 IL-78

MARITIME ATTACK 6 *Jaguar* S(I) with *Sea Eagle*

ATTACK HEL 3 sqn with 32 Mi-25

RECCE 2 sqn

1 with 8 *Canberra* (6 PR-57, 2 PR-67)

1 with 6* MiG-25R, 2* MiG-25U

MR/SURVEY 2 *Gulfstream* IV SRA, 2 *Learjet* 29

TRANSPORT

ac 12 sqn

6 with 105 An-32 *Sutlej*, 2 with 45 Do-228, 2 with 28 BAe-748, 2 with 25 Il-76 *Gajraj*

hel 11 sqn with 73 Mi-8, 50 Mi-17, 10 Mi-26 (hy tpt)

VIP 1 HQ sqn with 2 Boeing 737-200, 7 BAe-748, 6 Mi-8

TRG ac 28 BAe-748 (trg/tpt), 120 *Kiran* I, 56 *Kiran* II, 88

HPT-32, 38 *Hunter* (20 F-56, 18 T-66), 14* *Jaguar* B(1),

9* MiG-29UB, 44 TS-11 *Iskara* hel 20 *Chetak*, 2 Mi-24,

2* Mi-35

MISSILES

ASM AS-7 *Kerry*, AS-11B (ATGW), AS-12, AS-30, *Sea Eagle*, AM 39 *Exocet*, AS-17 *Krypton*

AAM AA-7 *Apex*, AA-8 *Aphid*, AA-10 *Alamo*, AA-11

Archer, R-550 *Magic*, *Super* 530D

SAM 38 sqn with 280 *Divina* V75SM/VK (SA-2),

Pechora (SA-3), SA-5, SA-10

Forces Abroad

UN AND PEACEKEEPING

DROC (MONUC): 12 obs IRAQ/KUWAIT

(UNIKOM): 6 obs LEBANON (UNIFIL): 618 SIERRA

LEONE (UNAMSIL): 3,161 incl 14 obs

Paramilitary 1,069,000 active

NATIONAL SECURITY GUARDS 7,400

(Cabinet Secretariat)

Anti-terrorism contingency deployment force, comprising elements of the armed forces, CRPF and Border Security Force

SPECIAL PROTECTION GROUP 3,000

Protection of VVIP

SPECIAL FRONTIER FORCE 9,000

(Cabinet Secretariat)

mainly ethnic Tibetans

RASHTRIYA RIFLES 36,000 (Ministry of Defence)

36 bn in 12 Sector HQ

DEFENCE SECURITY CORPS 31,000

provides security at Defence Ministry sites

INDO-TIBETAN BORDER POLICE 30,000 (Ministry of Home Affairs)

28 bn, Tibetan border security

ASSAM RIFLES 52,000 (Ministry of Home Affairs)

7 HQ, 31 bn, security within north-eastern states, mainly Army-officered; better trained than BSF

RAILWAY PROTECTION FORCES 70,000

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 88,600

(Ministry of Home Affairs)^a

guards public-sector locations

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE (CRPF) 160,000

(Ministry of Home Affairs)

130-135 bn incl 10 rapid action, 2 *Mahila* (women);

internal security duties, only lightly armed, deployable throughout the country

BORDER SECURITY FORCE (BSF) 174,000 (Ministry of Home Affairs)

some 150 bn, small arms, some lt arty, tpt/liaison air spt

HOME GUARD (R) 472,000

authorised, actual str 416,000 in all states except

Arunachal Pradesh and Kerala; men on lists, no trg

STATE ARMED POLICE 400,000

For duty primarily in home state only, but can be

moved to other states, incl 24 bn India Reserve Police

(commando-trained)

CIVIL DEFENCE 394,000 (R)

in 135 towns in 32 states

COAST GUARD over 8,000

PATROL CRAFT 36

3 *Samar* PCO, 9 *Vikram* PCO, 21 *Jija Bai*, 3 SDB-2 plus

16 boats

AVIATION

3 sqn with ac 14 Do-228, hel 15 *Chetak*

^a Lightly armed security guards only

Opposition €2,000+

HIZBUL MUJAHIDEEN: str n.k. Operates in Indian Kashmir

HARKAT-UL-MUJAHIDEEN: str n.k. Operates from Pakistan Kashmir

LASHKAR-E-TOIBA: str n.k. Operates from Pakistan Kashmir

TEHRIK-E-JIHAD: str n.k. Operates from Pakistan Kashmir

AL-BADR: str n.k. Operates in Indian Kashmir

India Ind

rupee Rs		1999	2000	2001	2002
GDP	Rs	18.9tr	20.9tr		
	US\$	440bn	471bn		
<i>per capita</i>	US\$	1,800	1,900		
Growth	%	5.9	6.4		
Inflation	%	4.7	4.0		
Debt	US\$	99bn	103bn		
Def exp^a	Rs	610bn	655bn		
	US\$	14.2bn	14.7bn		
Def bdtg	Rs	533bn	709bn	732bn	
	US\$	12.4bn	15.9bn	15.6bn	
FMA (US)	US\$	0.5m	0.5m	0.5m	
FMA (Aus)	US\$	0.2m			
US\$1=Rs		43.0	44.4	46.9	

^aIncl exp on paramil org

Population	1,029,548,000			
Hindu 80% Muslim 14% Christian 2% Sikh 2%				
Age	13-17	18-22	23-32	
Men	54,638,000	49,922,000	88,478,000	
Women	51,292,000	46,415,000	80,937,000	

Total Armed Forces

ACTIVE 1,263,000

RESERVES 535,000

Army 300,000 (first-line reserves within 5 years' full-time service, a further 500,000 have commitment until age 50) Territorial Army (volunteers) 40,000 Air Force 140,000 Navy 55,000

Army 1,100,000

HQ: 5 Regional Comd, 4 Fd Army, 12 Corps
3 armd div (each 2-3 armed, 1 SP arty (2 SP fd, 1 med regt) bde) • 4 RAPID div (each 2 inf, 1 mech bde) • 18 inf div (each 2-5 inf, 1 arty bde; some have armd regt) • 9 mtn div (each 3-4 bde, 1 or more arty regt) • 1 arty div (3 bde) • 15 indep bde: 7 armd, 5 inf, 2 mtn, 1 AB/cdo • 1 SSM regt (*Prithvi*) • 4 AD bde (plus 14 cadre) • 3 engr bde

These formations comprise

- 59 tk regt (bn) • 355 inf bn (incl 25 mech, 8 AB, 3 cdo)
- 190 arty regt (bn) reported: incl 1 SSM, 2 MRL, 50 med (11 SP), 69 fd (3 SP), 39 mtn, 29 AD arty regt; perhaps 2 SAM gp (3-5 bty each) plus 15 SAM regt • 22 hel sqn: incl 5 ATK

RESERVES

Territorial Army 25 inf bn, plus 29 'departmental' units

EQUIPMENT

MBT €3,414 (€1,100 in store): some 700 T-55 (450 op), €1,500 T-72/M1, 1,200 *Vijayanta*, €14 *Arjun*
LT TK €90 PT-76
RECCE €100 BRDM-2
AIFV 350+ BMP-1, 1,000 BMP-2 (*Sarath*)
APC 157 OT-62/-64 (in store), €160 *Casspir*
TOWED ARTY 4,175 (perhaps 600 in store) incl:
75mm: 900 75/24 mtn, 215 FRY M-48; 105mm: some 1,300 IFG Mk I/II, 50 M-56; 122mm: some 550 D-30; 130mm: 750+ M-46; 155mm: 410 FH-77B
SP ARTY 105mm: 80 *Abbot* (in store); 130mm: 100 mod M-46 (€70 in store); 152mm: some 2S19
MRL 122mm: €100 incl BM-21, LRAR; 214mm: *Pinacha* (being deployed)
MOR 81mm: LI6A1, E1; 120mm: 500 Brandt AM-50, E1; 160mm: 500 M-1943
SSM *Prithvi* (3-5 launchers)
ATGW *Milan*, AT-3 *Sagger*, AT-4 *Spigot* (some SP), AT-5 *Spandrel* (some SP)
RCL 84mm: *Carl Gustav*; 106mm: 1,000+ M-40A1
AD GUNS some 2,424: 20mm: Oerlikon (reported); 23mm: 300 ZU 23-2, 100 ZSU-23-4 SP; 30mm: 24 2S6 SP; 40mm: 1,200 L40/60, 800 L40/70
SAM 180 SA-6, 620 SA-7, 50 SA-8B, 400 SA-9, 45 SA-3, SA-13, 500 SA-16
SURV MUFAR, *Green Archer* (mor)
UAV *Searcher*, *Nishant*
HEL 100 *Chetak*, 50 *Chetali*
LC 2 LCVP

DEPLOYMENT

North 3 Corps with 8 inf, 2 mtn div West 3 Corps with 1 armd, 5 inf div, 3 RAPID Central 1 Corps with 1 armd, 1 inf, 1 RAPID East 3 Corps with 1 inf, 7 mtn div South 2 Corps with 1 armd, 3 inf div

Navy 53,000

(incl 5,000 Naval Aviation and 1,000 Marines; €2,000 women)

PRINCIPAL COMMAND Western, Southern, Eastern (incl Far Eastern sub comd)

SUB-COMMAND SS, Naval Air

BASES Mumbai (Bombay) (HQ Western Comd), Kochi (Cochin) (HQ Southern Comd), Vishakhapatnam (HQ Eastern), Port Blair (Andaman Is, HQ Far Eastern sub Comd), Goa (HQ Naval Avn), Arakonam (Naval Avn), Calcutta, Madras, Karwar (under construction)

FLEETS Western base Bombay Eastern base Visakhapatnam

SUBMARINES 16

SSK 16

10 *Sindhughosh* (Sov Kilo) with 533mm TT (at least 1 with SS-NX-27 Club SSM)

4 *Shishumar* (Ge T-209/1500) with 533mm TT

2 *Kursura* (Sov Foxtrot)† with 533mm TT (plus 3 in reserve)

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 27

AIRCRAFT CARRIERS 1 *Viraat* (UK *Hermes*) CV

Air group typically ac 6 *Sea Harrier* (*Sea Eagle* ASM) fr/attack hel 6 *Sea King* ASW/ASUW

DESTROYERS 8

DDG 8

5 *Rajput* (Sov *Kashin*) with 4 SS-N-2C *Styx* SSM, 2 × 2 SA-N-1 Goa SAM, 2 × 76mm gun, 5 × 533mm ASTT, 2 ASW RL, 1 Ka-25 or 28 hel

3 *Delhi* with 16 SS-N-25 *Switchblade* SSM, 2 × SA-N-7 *Gadfly* SAM, 1 × 100mm gun, 5 × 533mm ASTT, 2 hel

FRIGATES 11

FFG 4

1 *Brahmaputra* with 16 × SS-N-25 *Switchblade* SSM, 20 SA-N-4 *Gecko* SAM, 1 × 76mm gun, 2 × 3 324mm ASTT, 1 hel

3 *Godavari* with SS-N-2D *Styx* SSM, 1 × 2 SA-N-4 *Gecko* SAM, 2 × 3 324mm ASTT, 1 *Sea King* hel

FF 7

4 *Nilgiri* (UK *Leander*) with 2 × 114mm guns, 2 × 3 ASTT, 1 × 3 *Limbo* ASW mor, 1 *Chetak* hel (2 with 1 *Sea King*)

1 *Krishna* (UK *Leander*) (trg role)

2 *Arnala* (Sov *Petya*) with 4 × 76mm gun, 3 × 533mm ASTT, 4 ASW RL

CORVETTES 7

4 *Khukri* FSG with 4 SS-N-2C *Styx* SSM, 1 × 76mm gun, hel deck

3 mod *Khukri* FSG with 16 × SS-N-25 *Switchblade* SSM, SA-N-5 *Grail* SAM, 1 × 76mm gun

PATROL AND COASTAL COMBATANTS 39

CORVETTES 17

1 *Vijay Durg* (Sov *Namuchka* II) FSG with 4 SS-N-2C *Styx* SSM, SA-N-4 *Gecko* SAM (plus 1 non-op)

11 *Veer* (Sov *Tarantul*) FSG with 4 *Styx* SSM, SA-N-5 *Grail* SAM, 1 × 76mm gun

1 *Abhay* (mod *Veer*) FSG with 16 × SS-N-25

Switchblade SSM, SA-N-5 *Grail* SAM, 1 × 76mm gun

4 *Abhay* (Sov *Pauk* II) FS with SA-N-5 *Grail* SAM, 1 × 76mm gun, 4 × 533mm ASTT, 2 ASW mor

MISSILE CRAFT 6 *Vidyut* (Sov *Osa* II) with 4 *Styx* SSM†

PATROL, OFFSHORE 5 *Sukanya* PCO

PATROL, INSHORE 11

7 SDB Mk 3 PCI

4 *Super Dvora* PCF<

MINE WARFARE 18

MINELAYERS 0

none, but all SS and *Pondicherry* MSO have minelaying capability

MINE COUNTERMEASURES 18

12 *Pondicherry* (Sov *Natyia*) MSO, 6 *Mahé* (Sov *Yevgenya*) MSI<

AMPHIBIOUS 7

2 *Magar* LST, capacity 500 tps, 18 tk, 1 hel

5 *Ghorpad* (Sov *Polnochny* C) LSM, capacity 140 tps, 6 tk

Plus craft: 10 *Vasco da Gama* LCU

SUPPORT AND MISCELLANEOUS 32

1 *Aditya* (mod *Deepak*) AO, 1 *Deepak* AO, 1 *Jyoti* AO, 6 small AOT; 3 YDT, 1 *Tir* trg, 2 AWT, 3 TRV, 1 AH; 8 *Sandhyak* AGHS, 4 *Makar* AGHS, 1 *Sagardhwani* AGOR

NAVAL AVIATION (5,000)

ORGANISATION

Flying hours *Sea Harrier* 180

AIRCRAFT

FTR 2 sqn with *Sea Harrier* FRS Mk-1, 1 T-60 trg*

MR 3 sqn with Il-38, Tu-142F *Bear*, Do-228, BN-2 *Defender*

COMMS 1 sqn with Do-228

TRG 1 sqn with HJT-16, 8 HPT-32

HELICOPTERS

ASW 6 sqn with *Chetak*, Ka-25, Ka-28, *Sea King* Mk-42A/B

SAR 1 sqn with *Sea King* Mk-42C

TRG 1 sqn with *Chetak**, Hughes 300

EQUIPMENT

37 cbt ac; 72 armed hel

AIRCRAFT

23 *Sea Harrier* FRS Mk-1 • 1 T-60 trg* • 5 Il-38 • 5

Tu-142F *Bear* • 29 Do-228 (18 -MR, 10 -COMMS) •

18 BN-2 *Defender* • 6 HJT-16 • 8 HPT-32

HELICOPTERS

26 *Chetak* (24 - ASW, 2 - TRG) • 7 Ka-25 • 14 Ka-

28 • 25 *Sea King* Mk-42A/B • 6 *Sea King* Mk-42C

• 4 Hughes 300

MISSILES

AAM R-550 *Magic* 1 and 2

ASM *Sea Eagle*, *Sea Skua*

MARINES (1,000)

1 regt (3 gp)

Air Force 110,000

738 cbr ac, 22+ armed hel Flying hours 150
Five regional air comds: **Central** (Allahabad), **Western** (New Delhi), **Eastern** (Shillong), **Southern** (Trivandrum), **South-Western** (Gandhinagar); 2 spt comds: trg and maint
FGA 21 sqn

1 with 16 Su-30K/MK, 3 with 52 MiG-23 BN/UM, 4 with 84 *Jaguar* S(I), 6 with 135 MiG-27M, 5 with 55 MiG-21 MF/PFMA, 10 with 165 MiG-21bis/U (125 being upgraded), 2 with 40 *Mirage* 2000H/TH (secondary ECM role)

FTR 19 sqn

5 with 66 MiG-21 FL/U, 1 with 26 MiG-23 MF/UM, 3 with 63 MiG-29

ECM 1 sqn with 4 *Canberra* B(I) 58 (ECM/target towing), 2 *Canberra* TT-18 (target towing), some MiG-21M (ECM)

ELINT 2 Boeing 707, 2 Boeing 737

TANKER 6 IL-78

MARITIME ATTACK 1 sqn with 6 *Jaguar* S(I) with *Sea Eagle*

ATTACK HEL 2 sqn with 20+ Mi-25/35

RECCE 2 sqn

1 with 8 *Canberra* (6 PR-57, 2 PR-67)

1 with 5* MiG-25R, 2* MiG-25U

MR/SURVEY 2 *Gulfstream* IV SRA, 2 *Learjet* 29

TRANSPORT

ac 12 sqn

6 with 105 An-32 *Sut'aj*, 2 with 45 Do-228, 2 with 28

BAe-748, 2 with 25 Il-76 *Gajraj*

hel 14 sqn with 73 Mi-8/50 Mi-17, 1 sqn with 10 Mi-26 (hy tpt), 8 sqn with *Cheetah/Chetak*

VIP 1 HQ sqn with 2 Boeing 737-200, 7 BAe-748, 6 Mi-8

TRG ac 28 BAe-748 (trg/tpt), 120 *Kiran* I, 56 *Kiran* II, 88

HPT-32, 38 *Hunter* (20 F-56, 18 T-66), 14* *Jaguar* B(1),

9* MiG-29UB, 44 TS-11 *Iskara* hel 20 *Chetak*, 2 Mi-24,

2* Mi-35

UAV *Searcher-2*

MISSILES

ASM *Prithvi* SS250, AS-7 *Kerry*, AS-11B (ATGW), AS-12, AS-30, *Sea Eagle*, AM 39 *Exocet*, AS-17 *Krypton*

AAM AA-7 *Apex*, AA-8 *Aphid*, AA-10 *Alamo*, AA-11 *Archer*, R-550 *Magic*, *Super* 530D

SAM 38 sqn with 280 *Divina* V75SM/VK (SA-2), *Pechora* (SA-3), SA-5, SA-10

Forces Abroad

UN AND PEACEKEEPING

DROC (MONUC): 20 incl 18 obs ETHIOPIA/

ERITREA (UNMEE): 1,328 incl 5 obs IRAQ/KUWAIT

(UNIKOM): 6 obs LEBANON (UNIFIL): 792

Paramilitary 1,089,700 active

NATIONAL SECURITY GUARDS 7,400

(Cabinet Secretariat)

Anti-terrorism contingency deployment force, comprising elements of the armed forces, CRPF and Border Security Force

SPECIAL PROTECTION GROUP 3,000

Protection of VVIP

SPECIAL FRONTIER FORCE 9,000

(Cabinet Secretariat)

mainly ethnic Tibetans

RASHTRIYA RIFLES 40,000 (Ministry of Defence)

36 bn in 12 Sector HQ

DEFENCE SECURITY CORPS 31,000

provides security at Defence Ministry sites

INDO-TIBETAN BORDER POLICE 32,400 (Ministry of Home Affairs)

29 bn, Tibetan border security

ASSAM RIFLES 52,500 (Ministry of Home Affairs)

7 HQ, 31 bn, security within north-eastern states, mainly Army-officered; better trained than BSF

RAILWAY PROTECTION FORCES 70,000

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 95,000

(Ministry of Home Affairs)^a

guards public-sector locations

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE (CRPF) 167,400

(Ministry of Home Affairs)

137 bn incl 10 rapid action, 2 *Mahila* (women); internal security duties, only lightly armed, deployable throughout the country

BORDER SECURITY FORCE (BSF) 174,000 (Ministry of Home Affairs)

some 157 bn, small arms, some lt arty, tpt/liaison air spt

HOME GUARD (R) 574,000

authorised, actual str 399,800 in all states except Arunachal Pradesh and Kerala; men on lists, no trg

STATE ARMED POLICE 400,000

For duty primarily in home state only, but can be moved to other states, incl 24 bn India Reserve Police (commando-trained)

CIVIL DEFENCE 453,000 (R)

in 135 towns in 32 states

COAST GUARD over 8,000

PATROL CRAFT 36

3 *Samar* PCO, 9 *Vikram* PCO, 21 *Jija Bai*. 3 SDB-2 plus 16 boats

AVIATION

3 sqn with ac 14 Do-228, hel 15 *Chetak*

^a Lightly armed security guards only

Opposition 2,000-2,500

HIZB-UL-MUJAHIDEEN str 1,000-1,200 Operates in Ind Kashmir

Sumber : The Military Balance. The International Institute for Strategic Studies. Oxford University Press.

